BUPATI PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR : 100.3.3.2 / 269 / KPTS/ 2026

TENTANG
PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2025
DALAM *e-WALIDATA* SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

BUPATI PADANG LAWAS,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 274 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 391 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

d. bahwa telah dilakukan pemeriksaan data statistik sektoral berbasis elektronik pada e-Walidata SIPD RI;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Padang Lawas tentang

Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1447);
9. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 21 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023 Nomor 21).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Dirjen Bina Pembangunan Daerah Nomor 600.3.4/3929/Bangda tanggal 12 Mei 2026 Hal Pelaksanaan Fasilitasi Ranperkada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Berbasis SIPD;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2025 DALAM *e-WALIDATA* SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH.

KESATU : Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 dalam e-Walidata Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dengan rincian data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Data statistik sektoral daerah Kabupaten Padang Lawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Kabupaten Padang Lawas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 30 Juli 2026
BUPATI PADANG LAWAS,

PUTRA MAHKOTA ALAM HASIBUAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan, dan
3. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 100.3.3.2/268/KPTS/2026
TENTANG
PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2025
DALAM e-RALDATA SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025

1. DSSD BIDANG PENDIDIKAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
1	1.01.000001	Aarama sekolah	Unit	jumlah aarama sekolah yang tersedia	2
2	1.01.000022	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Buah	Jumlah Keseluruhan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	8262
3	1.01.000023	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang dimunikan	Buah	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang dimunikan	38804
4	1.01.000036	Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	226
5	1.01.000037	Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15
6	1.01.000040	Dokumen hasil pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformala yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformala yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	30
7	1.01.000042	Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	226
8	1.01.000043	Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15
9	1.01.000046	Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	307
10	1.01.000054	gedung PAUD	Unit	jumlah gedung paud yang tersedia	213
11	1.01.000055	gedung PAUD yang layak	Unit	jumlah gedung paud yang layak	213
12	1.01.000059	gedung PKBM	Unit	jumlah gedung pkbm	64
13	1.01.000060	gedung PKBM yang layak	Unit	jumlah gedung pkbm yang layak	64
14	1.01.000083	Media pendidikan	Paket	jumlah media pendidikan yang tersedia	12
15	1.01.000089	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan sekolah dasar	2853
16	1.01.000090	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi	Orang	Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi	541
17	1.01.000093	Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama	Orang	Jumlah pendidik pada sekolah menengah pertama	643
18	1.01.000094	Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi	Orang	jumlah pendidik pada sekolah menengah pertama yang telah lulus sertifikasi	377
19	1.01.000096	Pendidik yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan	Orang	jumlah pendidik yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan	529

20	1.01.000100	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang memperoleh Peningkatan Kesejahteraan	Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang memperoleh Peningkatan Kesejahteraan	4465
21	1.01.000103	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keasteraanyang didistribusikan	Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keasteraanyang didistribusikan	4465
22	1.01.000110	Pendidik Non ASN	Orang	jumlah pendidik non asn yang tersedia	1944
23	1.01.000111	Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Orang	jumlah pendidik pada satuan pendidikan nonformal / kesetaraan	140
24	1.01.000112	Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Jumlah Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV	92
25	1.01.000113	Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi	Orang	Jumlah Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi	11
26	1.01.000114	Pendidik pada satuan PAUD	Orang	jumlah pendidik pada satuan paud yang tersedia	529
27	1.01.000115	Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Jumlah Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV	304
28	1.01.000116	Pendidik pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi	Orang	Jumlah Pendidik pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi	32
29	1.01.000117	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV	2716
30	1.01.000119	Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV	600
31	1.01.000141	Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Belajar	Siswa	Jumlah Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Belajar	16903
32	1.01.000142	Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Siswa	Jumlah Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	34599
33	1.01.000143	Peserta DidikSekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik	Peserta Didik	Jumlah Peserta DidikSekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik	376
34	1.01.000146	Prasarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah Prasarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan	270
35	1.01.000151	Prasarana sekolah	Unit	Jumlah Prasarana sekolah yang tersedia	2417
36	1.01.000152	Prasarana sekolah yang perlu direhabilitasi	Unit	jumlah prasarana sekolah yang perlu direhabilitasi	310
37	1.01.000156	Prasarana sekolah yang layak	Unit	jumlah prasarana sekolah yang layak	2417
38	1.01.000157	Prasarana sekolah yang rusak sedang/berat	Unit	jumlah prasarana sekolah yang rusak sedang/berat	310
39	1.01.000162	rasio Pendidik pada jdiatnan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	jumlah rasio Pendidik pada satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8.82
40	1.01.000163	rasio Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	Jumlah rasio Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8.82
41	1.01.000190	Ruang Guru	Ruang	Jumlah Ruang Guru yang tersedia	173
42	1.01.000196	Ruang Guru yang layak	Ruang	Jumlah Ruang guru yang layak	249
43	1.01.000197	Ruang Guru yang rusak sedang/berat	Ruang	Jumlah ruang guru yang rusak sedang/berat	37
44	1.01.000198	Ruang guru yang telah direhabilitasi	Ruang	Jumlah guru yang telah direhabilitasi	136

45	1.01.000199	ruang kantor	Ruang	jumlah ruang kantor yang tersedia	264
46	1.01.000201	Ruang kelas	Ruang	jumlah ruang kelas yang tersedia	2417
47	1.01.000207	Ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi	Ruang	jumlah ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi	622
48	1.01.000208	Ruang kelas yang layak	Ruang	jumlah ruang kelas yang layak	1285
49	1.01.000209	Ruang kelas yang rusak sedang/berat	Ruang	jumlah ruang kelas yang rusak sedang/berat	57
50	1.01.000210	Ruang Kepala Sekolah	Ruang	jumlah ruang kepala sekolah yang tersedia	61
51	1.01.000214	Ruang Kepala Sekolah yang layak	Ruang	jumlah ruang kepala sekolah yang layak	39
52	1.01.000213	Ruang kepala sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	jumlah ruang kepala sekolah yang telah direhabilitasi	43
53	1.01.000218	Ruang laboratorium	Ruang	jumlah ruang laboratorium yang tersedia	71
54	1.01.000225	Ruang laboratorium yang layak	Ruang	jumlah ruang laboratorium yang layak	36
55	1.01.000241	Ruang laboratorium IPA	Ruang	Jumlah ruang laboratorium IPA	36
56	1.01.000261	ruang PAUD yang memiliki meibel yang masih baik	Ruang	Jumlah ruang PAUD yang memiliki meibel yang masih baik	466
57	1.01.000263	ruang pembelajaran	Ruang	Jumlah ruang pembelajaran yang tersedia	2417
58	1.01.000266	ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memiliki meibel yang masih baik	Ruang	Jumlah ruang pendidikan nonformal / kesetaraan yang memiliki meibel yang masih baik	64
59	1.01.000268	Ruang perpustakaan	Ruang	Jumlah perpustakaan yang tersedia	139
60	1.01.000269	Ruang Perpustakaan Sekolah	Ruang	Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang tersedia	139
61	1.01.000270	Ruang Perpustakaan Sekolah yang layak	Ruang	Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang layak	75
62	1.01.000271	Ruang Perpustakaan Sekolah yang rusak sedang/berat	Ruang	Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang rusak sedang/berat	17
63	1.01.000272	Ruang pimpinan	Ruang	Jumlah ruang pimpinan yang tersedia	81
64	1.01.000281	ruang sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah ruang sekolah yang memerlukan pemeliharaan	1220
65	1.01.000288	ruang tenaga pendidik	Ruang	Jumlah ruang tenaga pendidik yang tersedia	264
66	1.01.000296	Ruang UKS	Ruang	Jumlah ruang UKS yang tersedia	45
67	1.01.000297	Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang tersedia	45
68	1.01.000299	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang layak	Ruang	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang layak	30
69	1.01.000303	Ruang yang memiliki meibel yang masih baik	Ruang	Jumlah ruang yang memiliki meibel yang masih baik	30
70	1.01.000307	ruangan Sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah ruangan sekolah yang memerlukan pemeliharaan	1220
71	1.01.000331	Sarana sekolah	Unit	Jumlah sarana sekolah yang tersedia	31
72	1.01.000332	sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Unit	Jumlah sarana sekolah nonformal / kesetaraan yang tersedia	64
73	1.01.000334	sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak	Unit	Jumlah sarana sekolah nonformal/kesetaraan yang layak	64
74	1.01.000335	Sarana sekolah yang layak	Unit	Jumlah sarana sekolah yang layak	1,265
75	1.01.000337	Sarana Sekolah yang rusak sedang/berat	Unit	Jumlah sarana sekolah yang rusak sedang/berat	1,132
76	1.01.000340	satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima pembinaan kelembagaan	Orang	Jumlah satuan pendidikan nonformal / kesetaraan yang menerima pembinaan kelembagaan	30
77	1.01.000342	satuan PAUD yang melaksanakan rekomendasi	satuan PAUD	Jumlah satuan PAUD yang melaksanakan rekomendasi	213
78	1.01.000343	satuan PAUD yang membutuhkan perlengkapan sekolah	satuan PAUD	Jumlah satuan PAUD yang membutuhkan perlengkapan sekolah	6
79	1.01.000345	satuan PAUD yang memiliki peralatan rumah tangga yang masih baik	satuan PAUD	jumlah satuan PAUD yang memiliki peralatan rumah tangga yang masih baik	213

80	1.01.000348	satuan PAUD yang menerima pembinaan kelembagaan	Orang	jumlah satuan paud yang menerima pembinaan kelembagaan	213
81	1.01.000349	satuan PAUD yang menerima perlengkapan sekolah	satuan PAUD	jumlah satuan paud yang menerima perlengkapan sekolah	1
82	1.01.000350	satuan PAUD yang mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	jumlah satuan paud yang mengelola dana BOP	213
83	1.01.000351	satuan PAUD yang menyelenggarakan proses belajar	satuan PAUD	jumlah satuan paud yang menyelenggarakan proses belajar	213
84	1.01.000352	satuan PAUD yang siap dievaluasi	satuan PAUD	jumlah satuan paud yang siap dievaluasi	213
85	1.01.000353	satuan PAUD yang telah memfurnitikan alat praktik dan peraga siswa	satuan PAUD	jumlah satuan paud yang telah memfurnitikan alat praktik dan peraga siswa	6
86	1.01.000354	satuan PAUD yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa	satuan PAUD	satuan paud yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa	1
87	1.01.000363	Satuan Pendidikan Menengah Atas yang siap dievaluasi	Satuan Pendidikan	jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang siap dievaluasi	29
88	1.01.000366	satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memiliki peralatan rumah tangga yang harus dijaga	satuan PAUD	jumlah satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memiliki peralatan rumah tangga yang harus dijaga	30
89	1.01.000367	satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memiliki peralatan rumah tangga yang masih baik	satuan PAUD	jumlah satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memiliki peralatan rumah tangga yang masih baik	30
90	1.01.000371	satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang mengelola Dana BOP	30
91	1.01.000372	satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menyelenggarakan proses belajar	satuan PAUD	jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menyelenggarakan proses belajar	30
92	1.01.000373	satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa	satuan PAUD	jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa	30
93	1.01.000374	satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki perlengkapan yang difurnitikan dalam penyelenggaraan proses belajar	satuan PAUD	jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki perlengkapan yang difurnitikan dalam penyelenggaraan proses belajar	30
94	1.01.000376	Satuan pendidikan yang belum memiliki ruang UKS	Ruang	jumlah Satuan pendidikan yang belum memiliki ruang UKS	202
95	1.01.000393	Satuan pendidikan yang memiliki peralatan rumah tangga yang masih baik	Satuan Pendidikan	jumlah Satuan pendidikan yang memiliki peralatan rumah tangga yang masih baik	479
96	1.01.000392	Satuan pendidikan yang menerima pembinaan kelembagaan	Orang	Jumlah Satuan pendidikan yang menerima pembinaan kelembagaan	479
97	1.01.000394	Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan AN	Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan AN	266
98	1.01.000395	Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar	Satuan Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar	479
99	1.01.000396	Satuan Pendidikan yang siap menyelenggarakan AN	Satuan Pendidikan	jumlah satuan pendidikan yang siap menyelenggarakan AN	266
100	1.01.000399	Satuan pendidikan yang telah memiliki alat praktik dan peraga Siswa	Satuan Pendidikan	jumlah satuan pendidikan yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa	479
101	1.01.000400	Satuan Pendidikan yang telah memiliki perlengkapan yang difurnitikan dalam penyelenggaraan proses belajar	Satuan Pendidikan	jumlah Satuan Pendidikan yang telah memiliki perlengkapan yang difurnitikan dalam penyelenggaraan proses belajar	479
102	1.01.000402	Sekolah Dasar yang melaksanakan rekomendasi	Satuan Pendidikan	jumlah sekolah dasar yang melaksanakan rekomendasi	197

103	1.01.000404	Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	jumlah sekolah dasar yang mengelola dana bos	197
104	1.01.000405	Sekolah Dasar yang siap diverifikasi	Satuan Pendidikan	jumlah sekolah dasar yang siap diverifikasi	197
105	1.01.000408	Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan rekomendasi	Satuan Pendidikan	jumlah sekolah menengah pertama yang melaksanakan rekomendasi dari hasil pelaksanaan akreditasi	39
106	1.01.000409	Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	jumlah sekolah menengah pertama yang mengelola dana bos	39
107	1.01.000415	Sekolah yang memiliki kantin yang memadai	Satuan Pendidikan	jumlah sekolah yang memiliki kantin dengan kondisi memadai	479
108	1.01.000416	Sekolah yang memiliki ruang/sudut baca	Satuan Pendidikan	jumlah sekolah yang memiliki ruang/sudut baca	479
109	1.01.000418	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dokumen	Jumlah silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	236
110	1.01.000422	Siswa PAUD yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik	Siswa	Jumlah siswa PAUD yang layak menerima namun belum menerima biaya personil peserta didik	7,283
111	1.01.000435	Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik	Siswa	Jumlah siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang layak menerima namun belum menerima biaya personil peserta didik	61
112	1.01.000426	Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik	Siswa	jumlah siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik	14
113	1.01.000435	Tempat berludah	Ruang	jumlah sekolah yang memiliki tempat berludah	29
114	1.01.000436	Tempat bermain/berolahraga	Unit	jumlah sekolah yang memiliki tempat bermain/berolahraga	143
115	1.01.000440	Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi	11
116	1.01.000441	Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi	Orang	Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi	32
117	1.01.000443	Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi	Orang	jumlah tenaga kependidikan pada sekolah menengah pertama yang telah lulus sertifikasi	377
118	1.01.000444	Tenaga Kependidikan pada SSekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi	Orang	jumlah tenaga kependidikan pada sekolah dasar yang telah lulus sertifikasi	1,591
119	1.01.000449	Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	jumlah tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal / kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV	11
120	1.01.000450	Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD	Orang	jumlah tenaga kependidikan pada satuan paud	529
121	1.01.000451	Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	jumlah tenaga kependidikan pada satuan paud yang berkualifikasi akademik S1/DIV	504
122	1.01.000452	Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	jumlah tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	2,868
123	1.01.000453	Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Jumlah Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV	2,718
124	1.01.000456	Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada sekolah menengah pertama	643
125	1.01.000457	Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Jumlah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi akademik S1/DIV pada Sekolah Menengah Pertama	600

126	1.01.000458	Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kesalahan jangkat/golongan	Orang	jumlah tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kesalahan jangkat/golongan	2,359
127	1.01.000462	Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	3
128	1.01.000463	Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Orang	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP pendidikan Nonformal / Kesetaraan	3
129	1.01.000465	Tenaga Pengelola ying meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	3
130	1.01.000468	Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	3
131	1.01.000474	Unit sekolah	Unit	jumlah unit sekolah yang tersedia	7
132	1.01.000475	Unit sekolah yang layak	Unit	jumlah unit sekolah yang layak	7
133	1.01.000476	Unit sekolah yang rusak ringan/berat	Unit	jumlah unit sekolah yang rusak ringan/berat	1,133
134	1.01.000487	Utilitas sekolah	Unit	jumlah utilitas sekolah yang tersedia	4,992
135	1.01.000488	Utilitas sekolah yang perlu direhabilitasi	Unit	jumlah utilitas sekolah yang perlu direhabilitasi	1,124
136	1.01.000489	utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Unit	jumlah utilitas sekolah nonformal/kesetaraan	64
137	1.01.000490	utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak	Unit	jumlah utilitas sekolah nonformal/kesetaraan yang layak	64
138	1.01.000491	utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak ringan/berat	Unit	jumlah utilitas sekolah nonformal/kesetaraan yang rusak ringan/berat	0
139	1.01.000492	Utilitas sekolah yang layak	Unit	jumlah utilitas sekolah ying layak	1,860
140	1.01.000493	Utilitas Sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Unit	jumlah utilitas sekolah yang memerlukan pemeliharaan	1,124
141	1.01.000494	Utilitas sekolah yang rusak ringan/berat	Unit	jumlah utilitas sekolah yang rusak ringan/berat	1,663
142	1.01.000497	Jumlah Sekolah Dasar negeri	Unit	Jumlah SD yang ying dikelola oleh pihak pemerintah	182
143	1.01.000498	Jumlah Sekolah Dasar swasta	Unit	Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta	15
144	1.01.000499	jumlah Sekolah Dasar	Unit	Jumlah Sekolah Dasar Negeri dan Swasta	197
145	1.01.000500	Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri	Orang	Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah	31,362
146	1.01.000501	Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta	Orang	Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pihak swasta	3,037
147	1.01.000502	jumlah Siswa Sekolah Dasar	Orang	Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta	34,599
148	1.01.000503	Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki negeri	Orang	Jumlah siswa sekolah dasar negeri berjenis kelamin laki-laki	12501
149	1.01.000504	Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki swasta	Orang	Jumlah siswa sekolah dasar swasta berjenis kelamin laki-laki	5358
150	1.01.000505	jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki	Orang	Jumlah siswa sekolah dasar negeri dan swasta berjenis kelamin laki-laki	17859
151	1.01.000506	Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan negeri	Orang	Jumlah siswa sekolah dasar negeri berjenis kelamin perempuan	11718
152	1.01.000507	Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan swasta	Orang	Jumlah siswa sekolah dasar swasta berjenis kelamin Perempuan	5022
153	1.01.000508	jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan	Orang	Jumlah siswa sekolah dasar negeri dan swasta berjenis kelamin Perempuan	16740
154	1.01.000509	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1 negeri	Orang	Jumlah Siswa kelas 1 pada Sekolah Dasar negeri	3915

155	1.01.000510	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1 swasta	Orang	Jumlah Siswa kelas 1 pada Sekolah Dasar negeri	1678
156	1.01.000511	jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1	Orang	Jumlah Siswa kelas 1 pada Sekolah Dasar negeri	3580
157	1.01.000512	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 negeri	Orang	Jumlah Siswa kelas 2 pada Sekolah Dasar negeri	4105
158	1.01.000513	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 swasta	Orang	Jumlah Siswa kelas 2 pada Sekolah Dasar negeri	1739
159	1.01.000514	jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2	Orang	Jumlah Siswa kelas 2 pada Sekolah Dasar negeri	5864
160	1.01.000515	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3 negeri	Orang	Jumlah Siswa kelas 3 pada Sekolah Dasar negeri	4180
161	1.01.000516	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3 swasta	Orang	Jumlah Siswa kelas 3 pada Sekolah Dasar negeri	1791
162	1.01.000517	jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3	Orang	Jumlah Siswa kelas 3 pada Sekolah Dasar	5971
163	1.01.000518	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4 negeri	Orang	Jumlah Siswa kelas 4 pada Sekolah Dasar negeri	4110
164	1.01.000519	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4 swasta	Orang	Jumlah Siswa kelas 4 pada Sekolah Dasar swasta	1765
165	1.01.000520	jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4	Orang	Jumlah Siswa kelas 4 pada Sekolah Dasar	5883
166	1.01.000521	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5 negeri	Orang	Jumlah Siswa kelas 5 pada Sekolah Dasar negeri	3888
167	1.01.000522	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5 swasta	Orang	Jumlah Siswa kelas 5 pada Sekolah Dasar swasta	1666
168	1.01.000523	jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5	Orang	Jumlah Siswa kelas 5 pada Sekolah Dasar	5553
169	1.01.000524	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 negeri	Orang	Jumlah Siswa kelas 6 pada Sekolah Dasar negeri	4013
170	1.01.000525	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 swasta	Orang	Jumlah Siswa kelas 6 pada Sekolah Dasar swasta	1720
171	1.01.000526	jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6	Orang	Jumlah Siswa kelas 6 pada Sekolah Dasar	5733
172	1.01.000527	Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diawah 7 tahun negeri	Orang	Jumlah siswa usia diawah 7 tahun pada Sekolah Dasar Negeri	1566
173	1.01.000528	Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diawah 7 tahun swasta	Orang	Jumlah siswa usia diawah 7 tahun pada Sekolah Dasar Swasta	671
174	1.01.000529	jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diawah 7 tahun	Orang	Jumlah siswa usia diawah 7 tahun pada Sekolah Dasar	2239
175	1.01.000533	Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun negeri	Orang	Jumlah siswa usia diatas 12 tahun pada Sekolah Dasar Negeri	394
176	1.01.000534	Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun swasta	Orang	Jumlah siswa usia diatas 12 tahun pada Sekolah Dasar Swasta	168
177	1.01.000535	jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun	Orang	Jumlah siswa usia diatas 12 tahun pada Sekolah Dasar	562
178	1.01.000536	Jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang negeri	Orang	Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Dasar Negeri	80
179	1.01.000537	Jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang swasta	Orang	Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Dasar Swasta	33
180	1.01.000538	jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang	Orang	Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Dasar	113
181	1.01.000539	Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus negeri	Orang	Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Dasar Swasta	0
182	1.01.000540	Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus swasta	Orang	Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Dasar Swasta	0
183	1.01.000541	jumlah Siswa Sekolah Dasar putus	Orang	Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Dasar	0
184	1.01.000542	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru negeri	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru pada Sekolah Dasar Negeri	1677
185	1.01.000543	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru swasta	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru pada Sekolah Dasar Swasta	15
186	1.01.000544	jumlah kepala Sekolah Dasar & guru	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru pada Sekolah Dasar	2664
187	1.01.000545	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki negeri	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar Negeri	323
188	1.01.000546	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki swasta	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar Swasta	223
189	1.01.000547	jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar	746

190	1.01.000548	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan negeri	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar Negeri	1405
191	1.01.000549	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan swasta	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar Swasta	717
192	1.01.000550	jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar	2122
193	1.01.000551	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1 negeri	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 pada Sekolah Dasar Negeri	34
194	1.01.000552	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1 swasta	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 pada Sekolah Dasar Swasta	14
195	1.01.000553	jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah dibawah S1 pada Sekolah Dasar	48
196	1.01.000554	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas negeri	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 keatas pada Sekolah Dasar Negeri	852
197	1.01.000555	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas swasta	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 keatas pada Sekolah Dasar Swasta	279
198	1.01.000556	jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 keatas pada Sekolah Dasar	931
199	1.01.000557	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar Negeri	465
200	1.01.000558	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar Swasta	200
201	1.01.000559	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin laki laki pada Sekolah Dasar	664
202	1.01.000560	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar Negeri	1405
203	1.01.000561	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar Swasta	802
204	1.01.000562	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar	2007
205	1.01.000563	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA pada Sekolah Dasar	0
206	1.01.000564	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA pada Sekolah Dasar Swasta	34
207	1.01.000565	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA pada Sekolah Dasar	34
208	1.01.000566	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA ke atas pada Sekolah Dasar Negeri	1739
209	1.01.000567	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA keatas pada Sekolah Dasar Swasta	767
210	1.01.000568	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA ke atas pada Sekolah Dasar	2.506
211	1.01.000569	Jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar negeri	Orang	Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Dasar Negeri	267
212	1.01.000570	Jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar swasta	Orang	Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Dasar Swasta	30
213	1.01.000571	jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar	Orang	Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Dasar	297
214	1.01.000572	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar negeri	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Dasar Negeri	1.454
215	1.01.000573	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar swasta	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Dasar Swasta	123
216	1.01.000574	jumlah ruang kelas Sekolah Dasar	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Dasar	1577

217	1.01.000575	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Dasar Negeri	951
218	1.01.000576	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Dasar Swasta	75
219	1.01.000577	jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Dasar	626
220	1.01.000581	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Dasar Negeri	852
221	1.01.000582	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Dasar Swasta	33
222	1.01.000583	jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Dasar	885
223	1.01.000584	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Dasar Negeri	251
224	1.01.000585	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Dasar Swasta	15
225	1.01.000586	jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Dasar	266
226	1.01.000590	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar (jenjang s1 negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki jenjang S1 pada Sekolah Dasar Negeri	1776
227	1.01.000591	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar (jenjang s1 swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki (jenjang S1 pada Sekolah Dasar Swasta	761
228	1.01.000592	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar (jenjang s1	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki (jenjang S1 pada Sekolah Dasar	2537
229	1.01.000593	Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri	Unit	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri	34
230	1.01.000594	Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta	Unit	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta	5
231	1.01.000595	jumlah Sekolah Menengah Pertama	Unit	Jumlah Sekolah Menengah Pertama	39
232	1.01.000596	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri	Orang	Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	3,593
233	1.01.000597	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama swasta	Orang	Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	407
234	1.01.000598	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama	Orang	Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama	4,295
235	1.01.000599	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki laki negeri	Orang	Jumlah siswa dengan jenis kelamin laki (laki pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	2,722
236	1.01.000600	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki laki swasta	Orang	Jumlah siswa dengan jenis kelamin laki (laki pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	1,166
237	1.01.000601	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki laki	Orang	Jumlah siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama	3888
238	1.01.000602	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan negeri	Orang	Jumlah siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	385
239	1.01.000603	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan swasta	Orang	Jumlah siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	122
240	1.01.000604	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan	Orang	Jumlah siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama	407
241	1.01.000605	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 7 negeri	Orang	Jumlah siswa tingkat 7 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	939
242	1.01.000606	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 7 swasta	Orang	Jumlah siswa tingkat 7 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	360
243	1.01.000607	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 1	Orang	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 1 atau kelas 7	1340
244	1.01.000608	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 negeri	Orang	Jumlah siswa tingkat 8 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	1008

245	1.01.000609	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 swasta	Orang	Jumlah siswa tingkat 8 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	445
246	1.01.000610	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 2	Orang	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 2 atau kelas 8	1483
247	1.01.000611	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 negeri	Orang	Jumlah siswa tingkat 9 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	1030
248	1.01.000612	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 swasta	Orang	Jumlah siswa tingkat 9 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	422
249	1.01.000613	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 3	Orang	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 3 atau kelas 9	1472
250	1.01.000614	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeri	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	939
251	1.01.000615	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swasta	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	360
252	1.01.000616	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama	1340
253	1.01.000617	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeri	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	1058
254	1.01.000618	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swasta	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	445
255	1.01.000619	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama	1483
256	1.01.000620	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeri	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	1030
257	1.01.000621	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swasta	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	422
258	1.01.000622	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama	1472
259	1.01.000629	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun negeri	Orang	Jumlah Siswa yang berusia diatas 12 tahun yang ada pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	3.067
260	1.01.000630	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun swasta	Orang	Jumlah Siswa yang berusia diatas 12 tahun yang ada pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	1.289
261	1.01.000631	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun	Orang	Jumlah Siswa yang berusia diatas 12 tahun yang ada pada Sekolah Menengah Pertama	4295
262	1.01.000633	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang swasta	Orang	Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	7
263	1.01.000634	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang	Orang	Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Pertama	7
264	1.01.000636	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru negeri	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	457
265	1.01.000639	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru swasta	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	186
266	1.01.000640	jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Pertama	643
267	1.01.000641	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki negeri	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	151
268	1.01.000642	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki swasta	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	55
269	1.01.000643	jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama	206

270	1.01.000644	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan negeri	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	340
271	1.01.000645	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan swasta	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	136
272	1.01.000646	jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama	476
273	1.01.000647	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru (jumh dibawah s1 negeri)	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berpunah dibawah S1 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	322
274	1.01.000648	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru (jumh dibawah s1 swasta	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijumh dibawah S1 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	35
275	1.01.000649	jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru (jumh dibawah s1	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijumh dibawah S1 pada Sekolah Menengah Pertama	70
276	1.01.000650	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru (jumh s1 keatas negeri)	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berpunah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	436
277	1.01.000652	jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru (jumh s1 keatas	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijumh S1 ke atas pada Sekolah Menengah Pertama	640
278	1.01.000653	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	117
279	1.01.000654	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	50
260	1.01.000655	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama	167
281	1.01.000656	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	306
282	1.01.000657	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	131
283	1.01.000658	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama	437
284	1.01.000659	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama jumh SMA negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijumh SMA pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	21
285	1.01.000660	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama jumh SMA swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijumh SMA pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	31
286	1.01.000661	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama jumh SMA	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijumh SMA pada Sekolah Menengah Pertama	31
287	1.01.000662	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama jumh diatas SMA negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijumh diatas SMA pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	401
288	1.01.000663	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama jumh diatas SMA swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijumh diatas SMA pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	172
289	1.01.000664	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama jumh diatas SMA	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijumh diatas SMA pada Sekolah Menengah Pertama	573

290	1.01.000665	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama negeri	Orang	Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	70
291	1.01.000666	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama swasta	Orang	Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	10
292	1.01.000667	jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama	Orang	Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Pertama	80
293	1.01.000668	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama negeri	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	259
294	1.01.000669	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama swasta	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	21
295	1.01.000670	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Pertama	310
296	1.01.000671	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengn kondisi baik pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	116
297	1.01.000672	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengn kondisi baik pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	13
298	1.01.000673	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Menengah Pertama	129
299	1.01.000677	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	129
300	1.01.000678	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	8
301	1.01.000679	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Pertama	137
302	1.01.000680	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	44
303	1.01.000682	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Pertama	44
304	1.01.000686	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama jjaah s1 negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah S1 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	420
305	1.01.000687	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1 swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah S1 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	180
306	1.01.000688	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah S1 pada Sekolah Menengah Pertama	600

2. DSSD BIDANG KESEHATAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
307	1.02.000001	Alat uji dan kalibrasi pada RMC	Unit	Alat kalibrasi adalah sebuah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur, membandingkan, dan menyesuaikan akurasi atau parameter suatu alat atau perangkat lainnya agar sesuai dengan standar atau nilai yang telah ditentukan .Jumlah alat kalibrasi dengan kondisi baik	0
308	1.02.000002	Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting	Unit	Alat atau perangkat Sistem Informasi Kesehatan (Health Information System) adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis informasi terkait dengan layanan kesehatan. Jaringan Internet adalah jaringan global yang terdiri dari ribuan jaringan komputer yang terhubung menggunakan protokol Internet. .Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting	10
309	1.02.000004	Alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya	Paket	Alat kesehatan adalah instrumen atau perangkat yang digunakan dalam produk medis, perawatan kesehatan, atau diagnosis untuk membantu mendeteksi, mencegah, mengobati, atau mengurangi gangguan kesehatan pada manusia. Obat adalah zat atau substansi kimia yang digunakan untuk mencegah, mengobati, atau meredakan penyakit, kondisi medis, atau gejala yang tidak diinginkan pada manusia atau hewan. Bahan habis pakai adalah bahan atau produk yang digunakan sekali atau dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat digunakan lagi setelah digunakan. Bahan medis habis pakai adalah bahan atau produk yang digunakan dalam prosedur medis, diagnosis, atau perawatan kesehatan dan tidak dapat digunakan kembali setelah digunakan satu kali. .Jumlah Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman yang didistribusikan ke Fasilitas Kesehatan	0

310	1.02.000005	Alkes/alat penunjang medik Fasyankes	Unit	Alat Penunjang medis, sering disebut juga sebagai Alat Kesehatan (Alkes), adalah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk membantu dalam diagnosis, pencegahan, dan pemantauan kesehatan pasien. Jumlah Alat kesehatan seperti: instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh yang diesering. Jumlah Alat penunjang medis fasilitas pelayanan kesehatan seperti: alat, apparatus, mesin yang membantu fungsi pelayanan medis, antara lain seperti peralatan di instalasi rumah sakit, instalasi laundry, dan instalasi gizi yang diesering.	63
311	1.02.000006	Anak Usia Pendidikan Dasar	Orang	Anak usia pendidikan dasar adalah kelompok usia anak yang berada pada tingkat pendidikan dasar, yang biasanya berkisar antara usia 6 hingga 12 tahun. Jumlah anak usia pendidikan dasar	0
312	1.02.000049	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana	Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0

313	1.02.000010	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memenuhi Komitmen Izin	Sarana	Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memenuhi Komitmen Izin	0
314	1.02.000011	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/belum masa izinnya	Sarana	Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/belum masa izinnya	0

315	1.02.000012	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin	Jarang	Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, peranghat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, peranghat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, peranghat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin	0
316	1.02.000014	Balita	Orang	Definisi operasional balita merujuk pada kategori usia anak yang berada pada rentang 1 hingga 5 tahun yang masuk dalam perhitungan. Balita perlu mendapatkan pelayanan mencakup pemantauan pertumbuhan, vaksinasi, pemenuhan gizi yang adekuat, serta stimulasi perkembangan yang sesuai dengan tahapan usia untuk memastikan tumbuh kembang kesehatan dan kognitif yang baik.	0
317	1.02.000015	Barang penunjang operasional RS	Unit	Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit adalah barang untuk memenuhi keperluan perkantoran, langganan daya listrik, telpon, internet dan air. Jumlah barang penunjang operasional RS	0
318	1.02.000016	Bayi baru lahir	Orang	Bayi baru lahir, atau yang dikenal dengan istilah neonatus, adalah bayi yang baru saja dilahirkan dan berusia antara 0 hingga 28 hari. Jumlah bayi baru lahir	0
319	1.02.000018	BMHP yang disediakan	Paket	Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang disediakan oleh kabupaten/kota mencakup berbagai jenis alat dan perlengkapan medis yang diperlukan untuk mendukung pelayanan kesehatan, terutama di Puskesmas. Berikut adalah beberapa kategori dan contoh BMHP yang umumnya disediakan: Kategori BMHP Alat Kesehatan Termometer Stetoskop Alat pengukur tekanan darah Sediaan Farmasi Obat-obatan dasar seperti analgesik, antibiotik, dan vaksin Bahan Medis Habis Pakai Jarum suntik Sarung tangan medis Pembalut luka Perlengkapan Kesehatan Lainnya Alat bantu pernapasan (misalnya masker oksigen) Alat untuk pemeriksaan laboratorium (misalnya alat tes gula darah)	0

320	1.02.000021	Data Perizinan Industri Rumah Tangga	Dokumen	Industri rumah tangga adalah sektor ekonomi yang mencakup produksi barang/ jasung dan jasa yang dilaksanakan oleh rumah tangga atau individu untuk kelangsuhan sehari-hari dan kebiasaan pribadi. Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga	0
321	1.02.000022	Dokter Gigi	Orang	Dokter gigi adalah seorang profesional medis yang memiliki spesialisasi dalam bidang kedokteran gigi. Jumlah dokter gigi	3
322	1.02.000023	Dokter Spesialis Anak	Orang	Dokter Spesialis Anak, juga dikenal sebagai dokter spesialis pediatri, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melanjutkan spesialisasi dalam bidang pediatri. Jumlah Dokter Spesialis Anak	2
323	1.02.000024	Dokter Spesialis Anestesi	Orang	Dokter Spesialis Anestesi, juga dikenal sebagai dokter anestesiologis, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melakukan spesialisasi dalam bidang anestesiologi. Jumlah Dokter Spesialis Anestesi	1
324	1.02.000025	Dokter Spesialis Bedah	Orang	Dokter Spesialis Bedah, juga dikenal sebagai dokter bedah atau dokter bedah spesialis, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melanjutkan spesialisasi dalam bidang bedah. Jumlah Dokter Spesialis Bedah	3
325	1.02.000026	Dokter Spesialis Jantung	Orang	Dokter Spesialis Jantung, juga dikenal sebagai dokter kardiolog, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melakukan spesialisasi dalam bidang kardiologi. Jumlah Dokter Spesialis Jantung	2
326	1.02.000027	Dokter Spesialis kebidanan	Orang	Jumlah Dokter Spesialis kebidanan	3
327	1.02.000028	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	1
328	1.02.000029	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	1
329	1.02.000030	Dokter Spesialis Mata	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Mata	1
330	1.02.000031	Dokter Spesialis Paru	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Paru	1
331	1.02.000032	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Penyakit Dalam	3
332	1.02.000033	Dokter Spesialis Radiologi	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Radiologi	1
333	1.02.000034	Dokter Spesialis THT	Orang	Jumlah Dokter Spesialis THT	1
334	1.02.000035	Dokter Spesialis Urologi	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Urologi	0
335	1.02.000036	Dokter Umum	Orang	Jumlah Dokter Umum	2
336	1.02.000038	Dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Penyerapan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Penerapan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0
337	1.02.000039	Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	0

338	1.02.000041	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	&Pelayanan Kesehatan Khusus, juga dikenal sebagai pelayanan kesehatan spesialis, merujuk pada layanan medis dan perawatan kesehatan yang disediakan oleh dokter atau tenaga medis yang memiliki spesialisasi tertentu dalam bidang kesehatan tertentu. Pelayanan ini diberikan untuk mengatasi masalah kesehatan yang kompleks atau kondisi medis yang memerlukan penanganan lebih lanjut dan lebih mendalam daripada yang biasanya dapat diberikan oleh dokter umum atau pelayanan kesehatan primer. Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus&	0
339	1.02.000049	Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1

3. DSSD BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
340	1.03.000010	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung	Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan dan kegiatan usaha	10
341	1.03.000018	Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Negara	Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan dibalkan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara	7
342	1.03.000019	Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Negara	Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan dibalkan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara	2
343	1.03.000021	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan dibalkan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara	6
344	1.03.000032	Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kabupaten/kota lain)	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan perbatasan untuk wilayah kabupaten/kota di dalam/luar provinsi yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing daerah yang hadir.	5
345	1.03.000040	Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil dari kegiatan konsultasi publik yang di tandatangani oleh perwakilan peserta yang hadir.	1
346	1.03.000042	Berita Acara Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang ditandatangani secara langsung atau tanda tangan elektronik oleh perwakilan instansi yang hadir.	3

347	1.03.000069	Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan	Dokumen	Dokumen data kondisi jaringan jalan dan jembatan yang meliputi: 1) Survei Deskripsi Ruas Jalan, Titik Referensi Lokasi, Survei Inventori Perangkang Jalan dan Survei Inventori Konstruksi/Pemeliharaan jalan 2) Survei Profil Memanjang 3) Survei Kondisi Perkerasan Jalan 4) Survei kekuatan struktur Perkerasan Jalan 5) Survei Lalu Lintas 6) Survei Lereng Jalan 7) Survei Kondisi Drainase Jalan 8) Survei Lokasi Titik Rawan Kecelakaan	1
348	1.03.000070	Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan	Dokumen	Dokumen data kondisi jembatan untuk mengetahui saat jembatan yang berada di jaringan jalan berada dalam keadaan aman terhadap penggunaan jalan dan juga untuk mengamankan nilai investasi jembatan	1
349	1.03.000071	Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum	Dokumen	Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum Provinsi adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.	1
350	1.03.000083	Dokumen Leger Jalan	Dokumen	Leger Jalan adalah dokumen yang memuat antara lain peta lokasi ruas jalan, data jalan dan jembatan, data utilitas dan reklame dan data ruang milik jalan	1
351	1.03.000107	Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum	Dokumen	Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum yang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan seluruh kurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air minum serta mencantumkan rekomendasi penerapan SPM Daerah Provinsi	1
352	1.03.000135	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Minum	Dokumen	Dokumen pengumpulan data SPM air minum disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air minum yang setidaknya memuat jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air minum dan jumlah akses air minum yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	1
353	1.03.000136	Dokumen Penyusunan Skenario Induk Sebagai Ruang Strategis Kawasan dan Kabupaten	Dokumen	Dokumen dan laporan hasil bantuan penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis kawasan dan satuan ruang strategis kabupaten Dasar Hukum: Perdata No. 2 Tahun 2017	1
354	1.03.000139	Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	dihapus sesuai PP 21/2021	0

355	1.03.000140	Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	Surat Persetujuan Substansi yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menyatakan bahwa materi rancangan peraturan daerah tentang RTRW telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada RTR secara hierarki (sumber : Permen ATR/BPN 11/2021). Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Raperda RTRW Kabupaten/Kota hasil dari pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Permendagri 13/2016). Penetapan RTRW Kabupaten/Kota adalah penetapan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota oleh [illegible]	1
356	1.03.000150	Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran praktik yang ingin diwujudkan.	1
357	1.03.000159	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Minum	Dokumen	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Minum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah Provinsi sebagai prioritas kerja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1
358	1.03.000162	Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	Dokumen Rencana Teknis berisi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan d. Penyesuaian geometrik e. Konstruksi f. Konstruksi bangunan g. Perlengkapan h. Ruang dan i. Kelestarian lingkungan hidup.	1
359	1.03.000165	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang disusun	1
360	1.03.000193	Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota	Forum Penataan Ruang	Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Forum Penataan Ruang kabupaten/kota	1
361	1.03.000196	Jembatan	Jembatan	bangunan penghubung guna mengatasi rintangan antarruas jalan	1
362	1.03.000198	Jumlah Dokumen Rencana Induk pada Ruang Strategi Kawasan dan Kabupaten	Dokumen	Dokumen dan laporan hasil lanturan penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis kawasan dan satuan ruang strategis kabupaten. Dasar Hukum: Perdan No. 2 Tahun 2017	1

362	1.03.000212	Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Liter/Detik	Kapasitas unit produksi merupakan kapasitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi an/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum dengan satuan L/detik	85
364	1.03.000213	Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	Kapasitas unit produksi merupakan kapasitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi an/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum dengan satuan L/detik	25
365	1.03.000220	Kelengkapan dokumen Raperda RTRW (Raperda, Dokumen Rencana, Album Peta, Indikasi program)	Dokumen	Dokumen Raperda RTRW Kabupaten/Kota dan lampirannya (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)	1
366	1.03.000228	koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	Laporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1
367	1.03.000246	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing	KM	Panjang perkuatan tebing yang dibangun, strukturnya dapat berupa tumpukan tanah, kaya, pasangan batu, dan/atau beton	2
368	1.03.000249	Panjang Jalan	KM	Panjang Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.	1104.104
369	1.03.000251	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	KM	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibentuk	5.1
370	1.03.000257	Panjang Sungai	KM	Panjang sungai yang dipersatikan dan dipelihara	5
371	1.03.000258	Panjang Tanggul	KM	Tanggul Sungai adalah bangunan yang berada di daerah sempadan sungai yang berfungsi sebagai penahan aliran atau mencegah banjir. Panjang tanggul yang dipersatikan dan dipelihara	5
372	1.03.000268	Penerbitan PKKPR	Dokumen	Surat persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTR yang diterbitkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN.	1
373	1.03.000276	Penyempurnaan Ranperda RTRW Kabupaten/Kota, tindaklanjut Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	Raperda RTRW Kabupaten/Kota hasil penyempurnaan oleh Pemda Kab/Kota dengan DPRD Kab/Kota yang disempurnakan berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Ranperda RTRW Kabupaten/Kota.	1
374	1.03.000300	Rapat Persiapan persetujuan substansi	Dokumen	Laporan penyiapan kelengkapan dokumen untuk persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1
375	1.03.000304	Rekomendasi peta dari BIG	Dokumen	duplikasi dengan nomor 271	1

376	1.03.000306	Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan	Dokumen	Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial	1
377	1.03.000342	Surat penyampaian Ranperda RTRW Kabupaten/Kota yang telah ditandatangani oleh Bupati/Walikota Kepada Gubernur	Dokumen	Surat penyampaian Ranperda RTRW Kabupaten/Kota yang telah ditandatangani oleh Bupati/Walikota Kepada Gubernur dengan cap basah, atau tanda tangan elektronik yang telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN)	1
378	1.03.000407	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dirawat	Bangunan Gedung	Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.	1
379	1.03.000415	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota	Unit	Bangunan Konstruksi kabupaten/Kota merupakan produk konstruksi baik bangunan gedung maupun bangunan sipil yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber data APBD Kab/Kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha	17
380	1.03.000434	Jumlah Dokumen Pengawasan	Dokumen	&Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap: a. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung b. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau c. pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau d. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung e. pendaftaran Bangunan Gedung dan/atau f. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan &.	1

381	1.03.000455	Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	&Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap: a. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung b. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam menerbitkan penerapan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau c. pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau d. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung e. pendaftaran Bangunan Gedung dan/atau f. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan &	1
382	1.03.000460	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen perencanaan pembangunan gedung yang dimaksud adalah dokumen Detail Engineering Design (DED) beserta kelengkapannya seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS)	1
383	1.03.000466	Jumlah Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Dokumen	1. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan 2. Persiapan dokumen SLF yang dilaksanakan oleh Dinas Teknis Kabupaten/Kota maupun Dinas Perizinan Kabupaten/Kota 3. Jumlah Dokumen SLF yang Terbit Dari 2 Agustus 2021 s.d 7 Agustus 2023 berjumlah 30.291 sertifi dari	10
384	1.03.000505	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum	Dokumen	Dokumen meliputi Data Umum SPAM Lintas Kabupaten/Kota (jumlah unit SPAM Lintas Kabupaten/Kota, ketenagakerjaan, jam operasional). Data Teknis SPAM Lintas Kabupaten/Kota (status keberfungsian SPAM, kapasitas terpasang, produksi, distribusi, terjual dan idle capacity, NRW, jumlah sambungan rumah)	1

385	1.03.000509	Jumlah Lembaga pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Lembaga	Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari lembaga penyelenggaraan SPAM dan nomenklatur penyelenggara SPAM 1. Lembaga Pengelola SPAM dengan hasil penilaian kinerja yang meningkat dari hasil Buku Kinerja Penilaian BUMD Air Minum 2. Lembaga pengelola yang menetapkan tarif FCR dan termuat dalam hasil Buku Kinerja Penilaian BUMD Air Minum 3. Lembaga Pengelola SPAM dalam bentuk BUMD yang sudah memiliki SK pembentukan, SK tarif, SK organisasi. Kalau bentuk UPTD, yang sudah memiliki Perda Pembentukan Dinas, Perkada Pembentukan dan Struktur Organisasi UPTD, SK Pejabat, SK Kepala Dinas tentang Tupoksi dan Penunjukkan SDM , Perda Retribusi Jasa Pelayanan Air 4. Lembaga Pengelola SPAM yang pendanaannya tidak hanya bersumber dari APBD atau BUMD itu dapat berupa Subsidi Bunga, B to B atau lainnya 5. Lembaga Pengelola SPAM yang telah melakukan pemberian kepada pelanggan/calon pelanggan berupa anjuran untuk melakukan	1
386	1.03.000512	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari lembaga penyelenggaraan SPAM dan nomenklatur penyelenggara SPAM	1
387	1.03.000538	Jumlah Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	Rencana Teknis Rinci SPAM suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu lokasi atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.	1
388	1.03.000542	Jumlah Sambungan Rumah	Sambungan Rumah (SR)	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah /jaringan Perpipaan meliputi individual atau komunal (HU dan KU)	2244
389	1.03.000552	Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	SDM pelaksana penyelenggara SPAM adalah orang / personil penyelenggara SPAM	7
390	1.03.000586	Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem perpompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik	25 l/dtk
391	1.03.000603	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	KM	Panjang Prasarana transportasi darat kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi segala ruang jalan, termasuk bangunan pengubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan kir, dan jalan kabel.	1104.104

392	1.03.000609	Regulasi yang mengatur Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Regulasi	Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Perda No 1 2024A
393	1.03.000613	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	Dokumen	Dokumen meliputi jumlah air baku (mata air, air tanah, air permukaan) kapasitas air baku (l/det), kapasitas yang sudah digunakan (l/det), kapasitas masih dapat dimanfaatkan (l/det)	1
394	1.03.000630	Rehabilitasi Bendungan	Unit	Jumlah bendungan yang direhabilitasi, dapat berupa perbaikan sebagian ataupun menyeluruh satu kesatuan bangunan bendungan Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi bendungan untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Bagian yang direhabilitasi dapat hanya berupa perbaikan sebagian (tubuh bendungan saja atau bangunan pelengkap saja) ataupun perbaikan menyeluruh (tubuh bendungan beserta bangunan pelengkapnya). Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah rehabilitasi/perbaikan	1
395	1.03.000642	Panjang Pembangunan Kanal Banjir	Km	Panjang kanal banjir yang dibangun. Konstruksinya dapat berupa saluran terbuka, seperti saluran tanah terbuka, atau saluran yang diperkuat jti lining dengan beton atau pasangan batu. Dapat juga berupa saluran tertutup (terowongan atau knorfait)	2
396	1.03.000649	Panjang Pembangunan Tanggul Sungai	Km	Merupakan infrastruktur pelindung yang berada di daerah sempadan sungai yang berfungsi sebagai penahan aliran air atau untuk mencegah banjir. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Panjang tanggul sungai yang dibangun, strukturnya dapat berupa timbunan tanah, beton, pasangan batu, dan/atau beton	0.75
397	1.03.000653	Panjang Normalisasi/Restorasi Sungai	Km	Panjang sungai yang dinormalisasi/direstorasi	3
398	1.03.000694	Operasi dan Pemeliharaan Teluing Sungai	Km	Panjang teluing sungai yang dioperasikan dan dipelihara	0.15
399	1.03.000704	Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	Jumlah bendung irigasi yang dibangun	1
400	1.03.000709	Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	Km	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan	0.187
401	1.03.000715	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	Km	Panjang Jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi atau diperbaiki	0.75
402	1.03.000721	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Km	Panjang Jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	1.2
403	1.03.000741	Panjang Drainase Perkotaan	Km	Panjang Drainase Perkotaan yang ditingkatkan	10
404	1.03.000748	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum	Dokumen	Dokumen meliputi Data Umum SPAM (jumlah unit SPAM, kecamatan/desa, jam operasional). Data Teknis SPAM (status beroperasi/non aktif, kapasitas terpasang, produksi, distribusi, terjual dan idle capacity, NRW, jumlah sambungan rumah)	1

405	1.03.910117	Sambungan Rumah Penyediaan Air Minum	Sambungan Rumah (SR)	Sambungan Rumah adalah jaja dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah Jaringan Perpipaan meliputi individual atau komunal Hidran Umum dan Keran Umum.	2244
406	1.03.910120	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah.	11
407	1.03.910138	Dokumen hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	Layanan rekomendasi yang diberikan oleh instansi terkait untuk menilai apakah suatu kegiatan pemanfaatan ruang telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Dokumen ini berfungsi sebagai alat evaluasi dan pengawasan dalam penataan ruang, memastikan bahwa pemanfaatan lahan dan pembangunan yang dilakukan sejalan dengan peraturan dan kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan.	8
408	1.03.910140	Layanan KKPR	Layanan	Layanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (kkpr) adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa rencana pemanfaatan ruang oleh individu atau entitas sesuai dengan rencana tata ruang (rtr) yang telah ditetapkan. Kkpr berfungsi sebagai persyaratan dasar dalam perizinan berusaha, menggantikan izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang sebelumnya.	8
409	1.03.910141	Layanan Persetujuan KKPR	Layanan	Layanan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (pkkpr) adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk menilai dan memastikan bahwa rencana kegiatan pemanfaatan ruang oleh individu atau entitas sesuai dengan rencana tata ruang (rtr) yang berlaku.	8
410	1.03.910151	Data SHP Peta Dasar	Peta	Data shp (shapefile) peta dasar adalah format data vektor yang digunakan dalam sistem informasi geografis (sig) untuk menyimpan dan merepresentasikan fitur-fitur geografis dasar beserta atributnya.	1
411	1.03.910156	Perbida tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy "SHP" dan hardcopy)	Dokumen	Peraturan kepala daerah (perkada) tentang rencana detail tata ruang (rdtr) kabupaten/kota adalah regulasi yang ditetapkan oleh kepala daerah(bupati/walikota) seperti bupati atau wali kota)yang mengatur secara rinci pemanfaatan ruang di wilayahnya. Rdtr berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang pada tingkat kabupaten atau kota, serta menjadi dasar bagi penerbitan perizinan pemanfaatan ruang dan penyusunan peraturan zonasi.	3
412	1.03.910211	Jumlah bangunan gedung negara yang ditangani	Unit	Jumlah Bangunan Gedung Negara: jumlah massa bangunan yang dilakukan pembangunan dan/atau rehabilitasi melalui pendanaan APBD dalam satuan unit	7

413	1.03.910212	Luas bangunan gedung negara yang ditangani	M2	Luas Bangunan Gedung Negara: luas bangunan gedung negara yang dilakukan pembangunan dan/atau rehabilitasi melalui pendanaan APBD dalam satuan m2	240
414	1.03.910220	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dipelihara	Bangunan Gedung	Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.	3
415	1.03.910223	Jumlah Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Dokumen	Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Dokumen PBG terdiri dari Permohonan PBG, Permohonan PBG yang diproses, Permohonan PBG yang disetujui, dan Permohonan PBG yang ditolak, termasuk pada Bangunan Gedung Hijau (BGH)	71
416	1.03.910230	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempat	Dokumen	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST): biaya paling tinggi untuk per meter persegi pekerjaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah secara berkala	1
417	1.03.910257	Jumlah warga negara penerima layanan penyediaan air minum	Jiwa	Sambungan Rumah adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Provinsi	8976

4. DSSD BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
418	1.04.000004	Backlog Kepemilikan Rumah	Unit Rumah	Data sekunder rekapitulasi backlog kepemilikan rumah yang yang dihimpun dari data backlog pemerintah kab/kota atau data olahan dari BPS	2327
419	1.04.000005	Backlog Kepenghunian Rumah	Unit Rumah	Data sekunder rekapitulasi backlog kepenghunian rumah yang yang dihimpun dari data backlog pemerintah kab/kota atau data olahan dari BPS	3100
420	1.04.000006	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan	Orang	Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang berkomitmen menerima bantuan	1
421	1.04.000007	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik	Orang	Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang menempati rumah dengan status hak milik	1
422	1.04.000008	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk rehabilitasi bagi korban bencana kabupaten/kota	1
423	1.04.000040	Dokumen Surah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen BA serah terima aset Pemda kepada masyarakat, Sertifikat Hak Milik masyarakat	1
424	1.04.000113	lokasi perumahan dan permukiman kumuh hasil survei	Lokasi	Hasil survei yang menggambarkan profil kumuh daerah (nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh), serta dapat merumuskan strategi dan prioritas penanganan kawasan kumuh di daerah.	50
425	1.04.000114	Lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang ditetapkan	Lokasi	Hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan: a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman dan b. peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksudberisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan. Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain. Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud, dibuat dalam suatu wilayah daerah kabupaten/kota. khusus DKI Jakarta dalam suatu wilayah daerah provinsi berdasarkan tabel daftar lokasi. Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khusus untuk DKI Jakarta oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan melibatkan	39
426	1.04.000137	Penerima Bantuan Dalam Bentuk Rehabilitasi Rumah	Orang	Jumlah penerima bantuan dalam bentuk rehabilitasi rumah yang diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni	1

427	1.04.000166	Rumah Korban bencana kabupaten/kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Unit Rumah	Jumlah unit rumah yang belum ditangani berdasarkan data capaian pelaksanaan SPM dan dokumen Rencana Aksi yang telah dirpelate sesuai pelaksanaan	155
428	1.04.000167	Rumah Korban bencana kabupaten/kota Kejadian Sebelumnya yang Sudah Tertangani	Unit Rumah	Jumlah unit rumah yang sudah ditangani berdasarkan data capaian pelaksanaan SPM dan dokumen Rencana Aksi yang telah dirpelate sesuai pelaksanaan	3
429	1.04.000168	Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terrehabilitasi	Unit	Jumlah rumah yang memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang dan dilakukan rehabilitasi sehingga memenuhi kriteria rumah layak huni	3
430	1.04.000173	Rumah MBA di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	Jumlah unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Atas (MBA) di lokasi rawan bencana	20
431	1.04.000175	Rumah MBM di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	Jumlah unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Menengah (MBM) di lokasi rawan bencana.	60
432	1.04.000177	Rumah MBR di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	Jumlah unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di lokasi rawan bencana.	75
433	1.04.000182	Rumah Sewa Milik Masyarakat	Unit Rumah	Data ketersediaan rumah sewa milik masyarakat yang layak huni dan terjangkau	2300
434	1.04.000190	Rumah yang berkualitas (aman/andal terhadap bencana) di lokasi rawan bencana kabupaten/kota	Unit Rumah	Jumlah unit rumah yang berkualitas di lokasi rawan bencana.	2700
435	1.04.000194	Rumah yang Rusak Berat Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	Jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 65%, kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya	49
436	1.04.000196	Rumah yang Rusak Ringan Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	Jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 30%, kerusakan tersebar pada komponen non-struktural seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi.	88
437	1.04.000198	Rumah yang Rusak Sedang Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	Jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 45%, kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan/atau komponen struktural, seperti atap dan lantai.	5
438	1.04.000200	Rumah yang tidak berkualitas (tidak aman/ tidak andal terhadap bencana) di lokasi rawan bencana	Unit Rumah	Jumlah unit rumah yang tidak berkualitas di lokasi rawan bencana.	1600
439	1.04.000201	Rumah yang Tidak Rusak pasca Terkena Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	Jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah di bawah 5%, tidak berdampak pada komponen struktural maupun non-struktural	1700
440	1.04.000235	Jumlah Backlog Rumah di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	Unit	Jumlah backlog unit rumah di luar kawasan permukiman kumuh	1300
441	1.04.000273	Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 Hapeluhg Ha	Unit	Jumlah unit rumah dengan rincian tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Permukiman Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan baik yang sudah direvitalisasi maupun belum.	12200

442	1.04.000274	Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang diverifikasi	Unit	Jumlah unit rumah dengan rincian tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Permukiman Kumuh dan Permukiman Kumuh yang disiapkan dan sudah diverifikasi.	3100
443	1.04.000275	Jumlah Rumah di Lokasi Kumuh yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kekumuhan dan penanganannya	Unit	Jumlah rumah di lokasi kumuh dapat dilihat dari data hasil survey sekunder: data wilayah administrasi penanganan RTRW, RPJKP, RJTR, dokumen perencanaan teknis bidang perumahan kumuh dan data survey primer	2700
444	1.04.000276	Jumlah Rumah di lokasi rawan bahaya (bantaran sungai, sempadan rel, dll)	Unit	Jumlah rumah yang berada di lokasi rawan bahaya yaitu sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan rel KA, di kolong jembatan, di lereng SUTET yang bersumber RPJKP.	2500
445	1.04.000277	Jumlah rumah di lokasi rawan bencana	Unit	Jumlah rumah yang berada di lokasi rawan bencana dengan risiko tinggi.	2500
446	1.04.000278	Jumlah Rumah di lokasi yang tidak sesuai dengan tata guna lahan	Unit	Jumlah rumah yang tidak sesuai dengan tata guna lahan dapat dilihat dari data hasil survey sekunder: data wilayah administrasi penanganan RTRW, RJTR, dan data survey primer	400
447	1.04.000280	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	Jumlah keseluruhan unit Rumah Tidak Layak Huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh daerah dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	6000
448	1.04.000290	Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Laporan	Jumlah dokumen yang menjelaskan Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dari perbaikan yang dilaksanakan	1
449	1.04.000324	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit	Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni milik masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh yang telah Diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	2600
450	1.04.000330	Peta lokasi dan delinasi kawasan permukiman kumuh	Dokumen	Peta lokasi dan delinasi kawasan permukiman kumuh adalah representasi visual dalam bentuk peta yang menunjukkan lokasi serta batasan (delineasi) dari suatu wilayah yang dikategorikan sebagai permukiman kumuh berdasarkan kriteria tertentu.	1
451	1.04.000336	Jumlah Data dan Profil Permukiman Kumuh	Dokumen	Jumlah data dan profil permukiman kumuh merujuk pada total jumlah informasi yang terdokumentasi mengenai kawasan permukiman kumuh dalam suatu wilayah, termasuk karakteristik fisik, sosial, dan ekonomi dari kawasan tersebut.	1
452	1.04.000809	Jumlah dan kondisi rumah di kawasan permukiman kumuh	Unit Rumah	Jumlah dan kondisi rumah di kawasan permukiman kumuh adalah data yang mencatat total unit rumah yang berada di wilayah permukiman kumuh serta kondisi fisiknya. Data ini mencakup kelayakan huni, kualitas bangunan, kepadatan hunian, serta akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, sanitasi, jalan, dan drainase.	2600

453	1.04.000090	Jumlah rumah tangga di kawasan permukiman kumuh yang memiliki /&eLack of Access& terhadap 7 aspek dan 16 kriteria kumuh	Rumah Tangga	Jumlah rumah tangga di kawasan permukiman kumuh yang tidak memenuhi akses terhadap 7 aspek dan 16 kriteria kumuh sesuai indikator penilaian kumuh.	400
454	1.03.000343	Pemindahan atas Gangguan Ketentraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berkenaikan Perda dan Perkada Meliputi Penerbitan dan Penanganan Untuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	Laporan Gangguan Ketentraman , Ketertiban Umum dan Linmas dalam bentuk Untuk Rasa dan Kerusuhan Massa merupakan laporan hasil penertiban dan untuk rasa dan Pemindakan : a. Untuk Rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengekspresikan fikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum yang berkaitan dengan peraturan daerah, pergub, kebijakan pemerintah dan kebijakan lainnya terkait dengan pemerintah b. Kerusuhan massa adalah suatu keadaan /situasi rusuh dan kekacauan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang mengakibatkan kesalamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan , pengerusakan fasilitas umum, aset daerah, rumah Ibadah dll	20
455	1.03.000347	Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran adalah upaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran yang dilaksanakan setiap tahun dengan sasaran orang, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	120
456	1.05.000348	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Laporan hasil pelaksanaan memuat uraian keterangan pelaksanaan pengawasan, hasil pengawasan, dan evaluasi atas hasil pengawasan	20

5: DSSD BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
457	1.05.000007	Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Oyang	Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana prioritas kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih aspek manajerial mampan selma dalam hal komunikasi, koordinasi, manajun pengerahan sumber daya untuk penanganan darurat bencana berdasarkan skenario yang disusun mendekati kondisi sebenarnya	85
458	1.05.000006	Aparatur Penatfaan Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Penanggulangan Kebakaran	Oyang	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah	8
459	1.05.000005	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Kejerampilan Teknis Dalam Penanggulangan Kebakaran	Oyang	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah	3
460	1.05.000013	Data Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	Data kebencanaan adalah Data mengenai Bencana yang sesuai kriteria dan ditetapkan oleh validata bencana yang disediakan secara berkala otoputi mudit sebagai hasil pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan yang berisi catatan atau kumpulan fakta atau deskripsi yang merepresentasikan dampak/kejadian bencana yang menjadi urusan kabupaten/kota	38
461	1.05.000022	Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	Dokumen analisis risiko bencana berisi tentang kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menjadi sumber bahaya/menimbulkan bencana baik yang terjadi secara tiba tiba dan/atau berangsur di lokasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	3
462	1.05.000030	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan pihet petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (bencana membahayakan manusia) dengan adanya dokumen, dan dilaksanakan oleh instang yang berwenang Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	8

462	1.03.000031	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Pemplamatan dan Evaluasi Kerban Kebakaran dan Non Kebakaran adalah pemplasan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	3
464	1.03.000056	Dokumen Hasil Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisi aktivitas Pusat Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Bencana dalam bentuk laporan periodik penerapan prosedur teknis (check list prosedur) untuk penyelenggaraan tugas Pimdalops baik pada aktivitas internal (misal: prosedur serah terima piket) maupun layanan peringatan dini (misal: prosedur sistem peringatan dini banjir) dan/atau layanan pada tindakan awal operasi penanganan darurat bencana tingkat kabupaten/kota provinsi (misal: prosedur aktivasi ruang krisis, prosedur pengendalian evakuasi,dll) aktivitas tersebut termasuk dalam pelayanan dasar SPM (SUB)	3
465	1.03.000058	Dokumen Hasil Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisi aktivitas Pusat Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Bencana dalam bentuk laporan periodik penerapan prosedur teknis (check list prosedur) untuk penyelenggaraan tugas Pimdalops baik pada aktivitas internal (misal: prosedur serah terima piket) maupun layanan peringatan dini (misal: prosedur sistem peringatan dini banjir) dan/atau layanan pada tindakan awal operasi penanganan darurat bencana tingkat kabupaten/kota provinsi (misal: prosedur aktivasi ruang krisis, prosedur pengendalian evakuasi,dll) aktivitas tersebut termasuk dalam pelayanan dasar SPM (SUB)	5
466	1.03.000064	Dokumen Kerja Sama Antar Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisi perjanjian kesepakatan dan pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana di tingkat provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	2
467	1.03.000065	Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisi perjanjian kesepakatan dan pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana di tingkat kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	6
468	1.03.000077	Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	Merupakan penyediaan dokumen regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota untuk pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota	3

469	1.03.000081	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana merupakan dokumen perencanaan penanggulangan bencana daerah kabupaten/kota yang sah dan legal dan menjadi acuan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana lingkup kewenangan kabupaten/kota yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana, Perda RB, dan kondisi kebencanaan daerah	2
470	1.03.000082	Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	Dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana merupakan dokumen perencanaan kedaruratan bencana daerah kabupaten/kota yang sah dan legal berisi kebijakan operasional, sebagai acuan bagi aktorak pemangku kepentingan dalam menanggulangi keadaan darurat bencana tingkat kabupaten/kota	2
471	1.03.000083	Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisikan kebijakan/regulasi/SOP Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota dalam rangka penata kelolaan kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota baik dalam hal antara lain struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan penganggaran	2
472	1.03.000110	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerumunan Massa yang Dilakukan Pemindahan	Kasus	Dokumen Hasil Pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kementrian merupakan dokumen dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kesepakatan dalam lingkup tugas dan fungsi Pol PP dalam Pencegahan dalam gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum	20
473	1.03.000111	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerumunan Massa yang Dilakukan Pemindahan	Kasus	Kegiatn dalam Pemindahan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerumunan Massa	20
474	1.03.000112	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Diregah Melalui Cegah Dini	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Diregah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini	15
475	1.03.000113	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Diregah Melalui Deteksi Dini	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Diregah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini	15
476	1.03.000114	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Diregah Melalui Patroli	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Diregah Melalui patroli	15
477	1.03.000115	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Diregah Melalui Pembinaan	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Diregah Melalui pembinaan	15
478	1.03.000116	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Diregah Melalui Pengumuman	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Diregah Melalui Pengumuman	15

479	1.05.000117	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Diregah Melalui Penguasaan	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Diregah Melalui penguasaan	15
480	1.05.000119	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana merupakan kegiatan Peningatan Kapasitas Kawasan untuk penceghahan memperkuat pada aspek pengaatan kesiapsiagaan atas potensi bahaya dan kerentanan melalui peningkatan kapasitas kelompok masyarakat/komunitas yang ada dimatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah kabupaten/kota	16
481	1.05.000120	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana	Kawasan	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana merupakan kegiatan Pengatan Kapasitas Kawasan untuk penceghahan memperkuat pada aspek pengurangan potensi bahaya dan kerentanan, maupun peningkatan kapasitas kelompok masyarakat/komunitas yang ada dimatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah kabupaten/kota	16
482	1.05.000123	Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi Korban Bencana	Orang	Merupakan layanan dalam rangka pendistribusian logistik operasionalisasi peralatan pengelamatan dan evakuasi, serta kebutuhan dasar korban bencana, selama berlangsungnya penanganan awal bencana (masa krisis) lingkup daerah kabupaten/kota	261
483	1.05.000124	Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Korban Bencana	Orang	Merupakan layanan dalam rangka pendistribusian logistik operasionalisasi peralatan penyelamatan dan evakuasi, serta kebutuhan dasar korban bencana, selama berlangsungnya penanganan awal bencana (masa krisis) lingkup daerah kabupaten/kota	261
484	1.05.000125	Korban yang Berhasil Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	Merupakan pelaksanaan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk memindahkan/mengevakuasi korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman	1.307
485	1.05.000126	Korban yang Berhasil Ditemukan Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	Merupakan pelaksanaan pencarian Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk upaya untuk menemukan korban bencana di lokasi bencana	3
486	1.05.000127	Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	Merupakan memberikan pertolongan pada Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk menolong korban bencana pada tempat kejadian bencana	263
487	1.05.000146	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegatan kesiapsiagaan piket petugas dari atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh instang yang mengatur Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	17

488	1.05.000147	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan sarana dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	17
489	1.05.000172	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	Pengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Bupati/Walikota	15
490	1.05.000173	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	Laporan	Pengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah	15
491	1.05.000219	Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara	Unit	Warga Negara yang membutuhkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Penyediaan Peralatan keselamatan keselamatan diri di kawasan rawan bencana daerah kabupaten/kota	10
492	1.05.000220	Peralatan Penyelamatan Diri bagi Keluarga	Unit	Merupakan penyediaan alat penyelamatan diri bagi keluarga yang tinggal di daerah rawan bencana lingkup daerah kabupaten/kota	1
493	1.05.000221	Peralatan Penyelamatan Diri bagi Petugas	Unit	Merupakan Penyediaan Peralatanpenyelamatan diri bagi petugas operasi kedaruratan bencana daerah kabupaten/kota	10
494	1.05.000224	Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Manajerialnya	Orang	Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas manajerialnya dalam hal koordinasi/ dukungan lagi dan/atau di wilayah kabupaten/kota untuk melakukan penanganan awal, penilaian dampak bencana secara cepat, maupun pengendalian luas area terpapar	84
495	1.05.000225	Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis	Orang	Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas teknis operasionalnya dalam hal meningkatkan kecepatan respon time untuk dukungan penanganan awal darurat bencana di wilayah kabupaten/kota untuk melakukan penilaian dampak bencana secara cepat, maupun pengendalian luas area terpapar	84
496	1.05.000242	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	Merupakan tahapan kecepatan respon penanganan awal dalam penetapan status darurat bencana paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil penilaian secara cepat dampak awal suatu kejadian bencana daerah Kabupaten/Kota	2
497	1.05.000250	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	Fasilitasi yang dilakukan BPBD Kabupaten/Kota untuk memastikan tertanganinya pasca bencana meliputi Sektor : Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman, Ekonomi, Sosial dan Lintas Sektor	7

498	1.05.060251	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	Peningkatan kapasitas meliputi kompetensi, karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, sikap dan keahlian yang dimiliki aparatur sesuai dengan standar dan pelayanan yang ditetapkan untuk memberikan pelayanan penanggulangan bencana	84
499	1.05.060279	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Laporan	Kegiatan sosialisasi perda atau perkada kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah	20
500	1.05.060319	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran adalah penyediaan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan pihak petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuannya adalah laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	40
501	1.05.060320	Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	Laporan	Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab kebakaran adalah serangkaian proses dalam menyelidiki dan mencari fakta terkait penyebab suatu kejadian kebakaran dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Investasi Kejadian kebakaran	2
502	1.05.060342	Pencegahan Gangguan Ketentraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	Laporan Gangguan Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan laporan hasil tindakan yang dilakukan terhadap Suatu Kondisi Yang Tidak Teratur yang Disebabkan Oleh Tidak Taatnya Kepada Hukum, Norma Serta Kesepakatan umum, yang dilakukan melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.	20
503	1.05.060343	Penindakan atas Gangguan Ketentraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penegakan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	Laporan Gangguan Ketentraman , Ketertiban Umum dan Linmas dalam bentuk Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa merupakan laporan hasil penertiban dan unjuk rasa dan Penindakan : a. Unjuk Rasa adalah kegatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan fikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum yang berkaitan dengan peraturan daerah, pergub, kebijakan pemerintah dan kebijakan lainnya terkait dengan pemerintah b. Kerusuhan massa adalah suatu keadaan /situasi rusuh dan kekacauan yang dilakukan oleh sesorang ataupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan , pengerusakan fasilitas umum, aset daerah, rumah dinas dll	20

304	1.05.000347	Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran adalah upaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran yang dilaksanakan setiap tahun dengan jumlah orang, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	120
305	1.05.000349	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Laporan hasil pelaksanaan memuat uraian keterangan pelaksanaan pengawasan, hasil pengawasan, dan evaluasi atas hasil pengawasan.	20

6. DSSD BIDANG SOSIAL

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
306	1.06.000007	Anak Telantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	Anak terlantar yang dilindungi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	13
307	1.06.000018	Anak Telantar yang menerima kebutuhan sandang	Orang	Anak telantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	13
308	1.06.000028	Anak-Anak Terlantar yang dijangkau	Orang	Anak telantar yang mendapatkan layanan kedaruratan berupa penjangkauan	13
309	1.06.000031	Fakir Miskin	Orang	&Fakir miskin yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya	15.82.0dc
310	1.06.000039	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar dimasukkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta untuk mendapatkan layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, kelubas, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	1
311	1.06.000040	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan rujukan	Orang	Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan	1
312	1.06.000041	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	1
313	1.06.000044	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pemakaian sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang mendapatkan pemakaian sesuai dengan Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	1
314	1.06.000047	Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandang	Orang	Gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	1
315	1.06.000055	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Keluarga	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan	110x2
316	1.06.000059	Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	Dokumen	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	4

317	1.06.000072	Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat	Orang	Korban bencana yang mendapatkan permakanan berupa bahan permakanan/makanan siap saji dalam masa tanggap darurat	7Hkk
318	1.06.000075	Lanjut Usia Telantar yang mendapat pemakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	Lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan pemakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga sebesar 2100 kilo kalori per orang per hari pada trajekt konsumsi	73
319	1.06.000083	Lanjut Usia Telantar yang mendapat akses ke Kesehatan Dasar	Orang	Lanjut usia telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	73
320	1.06.000084	Lanjut Usia Telantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	Lanjut usia telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	2
321	1.06.000085	Lanjut Usia Telantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	Lanjut usia telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar dimasukan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, laporan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	73
322	1.06.000090	Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga	Lembaga Kesejahteraan Sosial yaitu organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum	1
323	1.06.000097	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	Pekerja profesional/tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	52
324	1.06.000098	pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan sosial	Orang	Pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan sosial	52

525	1.06.000101	Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	52
526	1.06.000102	pekerja sosial profesional yang memberikan bimbingan sosial	Orang	Pekerja Sosial Profesional yaitu seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan sosial	52
527	1.06.000112	Penyandang Disabilitas Terlantar yang menerima kebutuhan sandang	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	14
528	1.06.000113	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	1
529	1.06.000115	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	4
530	1.06.000116	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	Fasilitasi penyandang Disabilitas telantar di luar panti yang mendapatkan layanan data agar dimasukkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	6
531	1.06.000117	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan rujukan	Orang	Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan kepada provinsi atau sesuai kebutuhan	6
532	1.06.000118	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	Penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena ancaman kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	6

533	1.06.000119	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan pemakaman	Orang	Penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan pemakaman keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi	6
534	1.06.000128	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Buku Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Buku Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	6
535	1.06.000129	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	2
536	1.06.000132	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar tercatat masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, kebutuan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.	2
537	1.06.000139	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima kebutuhan sandang	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang menerima kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	2
538	1.06.000162	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersedia yaitu seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan	17
539	1.06.000170	Taruna Siaga Bencana	Orang	Jumlah relawan sosial yang sudah terlatih atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana	30
540	1.06.000179	Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersedia yaitu seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan	16

341	1.06.000185	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perlekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	Penyediaan perlekalan kesehatan kepada penyandang disabilitas terlantar di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/pekerja medis	14
342	1.06.000186	Anak Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perlekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	Penyediaan perlekalan kesehatan kepada anak terlantar di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/pekerja medis	15
343	1.06.000187	Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perlekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	Penyediaan perlekalan kesehatan kepada lanjut usia terlantar di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota berupa alat obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/pekerja medis	73
344	1.06.000188	Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perlekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	Penyediaan perlekalan kesehatan kepada gelandangan dan pengemis di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota berupa obat obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/pekerja medis	1
345	1.06.000189	Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Orang	Fasilitasi pemberdayaan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan di bidang sosial, ekonomi, penyediaan akses dan kesempatan kerja, pendidikan dan literasi, serta pelayanan yang diperlukan bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan, gelandangan dan pengemis dalam menjaga kemandirian diri.	3
346	1.06.000190	Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Orang	Fasilitasi pemberdayaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis di bidang sosial, ekonomi, penyediaan akses dan kesempatan kerja, pendidikan dan literasi, serta pelayanan yang diperlukan bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan, gelandangan dan pengemis dalam menjaga kemandirian diri.	2
347	1.06.000191	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial	Orang	Reintegrasi adalah penyiapan perevitasi layanan untuk dapat kembali kepada keluarga, termasuk penyiapan ekosistem di masyarakat (keluarga dan lingkungan).	10
348	1.06.000192	Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.	14

549	1.06.000193	Anak Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.	14
550	1.06.000194	Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.	73
551	1.06.000195	Gelandang dan Pengemis di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.	3
552	1.06.000196	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Orang	Fasilitasi pemberdayaan dan pelatihan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di bidang sosial, ekonomi, penyediaan akses dan kesempatan kerja, pendidikan dan literasi, serta pelayanan yang diperlukan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya dalam menjaga kemandirian diri. Salah satu bentuk pemberdayaan dan pelatihan yang dimaksud termasuk mendorong pelatihan literasi keuangan rumah tangga dan pengelolaan keuangan usaha/mata pencaharian, sehingga PPKS Lainnya peserta program Graduasi memiliki pengetahuan dan keterampilan pengelolaan keuangan rumah tangga.	27

353	1.06.000197	Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pemberian kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.	27
354	1.06.000206	Tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang	Pelatihan tenaga sukarelawan tenaga Perdatn dilaksanakan untuk membantu masyarakat bila terjadi bencana sosial dan non alam	2
355	1.06.000207	Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	Peningkatan kompetensi melalui Management of Training, Training Officer Course, Training of Trainers, Training of Facilitator dan upaya lain yang relevan kepada TAGANA. TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial, yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan penanggulangan bencana secara berkala oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah	30

7. DSSD BIDANG TENAGA KERJA

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
356	2.07.000001	Angkatan Kerja (AK)	Orang	jumlah dari kualitas Penduduk Usia Kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran	57
357	2.07.000019	Instruktur swasta	Orang	Instruktur swasta adalah instruktur yang terdaftar dan bekerja di instansi/lembaga milik pemerintah	8
358	2.07.000024	Kapasitas terpasang pemerintah	Orang	Kapasitas latih adalah jumlah orang maksimum yang dapat dilatih dalam satu tahun untuk program pelatihan tertentu oleh lembaga pelatihan kerja	16
359	2.07.000032	Lembaga Bipartit	Lembaga	LKS Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh	3
360	2.07.000045	Lulusan pelatihan pemerintah	Orang	Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus pada pelatihan yang diselenggarakan oleh LPK pemerintah	16
361	2.07.000066	Penduduk Usia Kerja (PUK)	Orang	jumlah penduduk yang berumur 15 (lima belas) tahun atau lebih yang disebut juga tenaga kerja	139559
362	2.07.000080	Persediaan Tenaga Kerja	Orang	jumlah dari kualitas angkatan kerja yang tersedia dengan berbagai karakteristiknya	17016
363	2.07.000083	Perusahaan dengan tenaga kerja minimal 50 orang	Perusahaan	Perusahaan yang memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 50 orang atau lebih	37
364	2.07.000084	Perusahaan Kecil	Perusahaan	Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dideskan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 20/2008	3720

365	J.07.000006	Perusahaan mikro kecil,menengah,dan besar	Perusahaan	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 20/2008 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 20/2008 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan	5617

366	2.07.000087	Perusahaan peserta jamsostek aktif	Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang mendaftarkan Pekerjanya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	132
367	2.07.000088	Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan	Perusahaan	Perusahaan yang melaporkan ketenagakerjaan dalam sistem WLKP Online	132
368	2.07.000895	Petugas Antar Kerja	Orang	Petugas Antarkerja adalah petugas yang memiliki kompetensi melaksanakan kegiatan Antarkerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan Antarkerja	2
369	2.07.000100	Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	Produktivitas tenaga kerja adalah rasio antara nilai PDRB dengan jumlah PYB yang digunakan baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi PYB dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dari proses kegiatan ekonomi pada suatu lapangan usaha secara nasional dan regional	1b
370	2.07.000109	Tenaga Kerja Disabilitas	Orang	Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain	27
371	2.07.000110	Tenaga kerja peserta jamsostek aktif	Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	23946
372	2.07.000114	Tenaga Kerja yang terputus dari adanya pertumbuhan kesempatan kerja	Orang	Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.	10

8. DSSD BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
373	2.08.000002	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan	Orang	Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan provinsi	10
374	2.08.000003	Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/ kota yang mengacu pada pedoman teknis standarisasi yang ditetapkan oleh KPPPA	100
375	2.08.000018	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kegiatan	Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas hidup anak di tingkat kabupaten/kota	1
376	2.08.000019	Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPengarusutamaan Gender (PUG)	Kegiatan	Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan audit internal PUG	1
377	2.08.000021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan	Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat kabupaten/kota	1
378	2.08.000026	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PelaksanaanPengarusutamaan Gender (PUG)	Kegiatan	Meliputi harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, produk hukum daerah, dan kebijakan operasional tentang penyelenggaraan PUG kewenangan kab/kota	1
379	2.08.000029	layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	Layanan AMPK meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenangan kabupaten/kota	10
380	2.08.000031	Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan	Layanan	Layanan pemenuhan korban kekerasan meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenangan kabupaten/kota	5
381	2.08.000032	lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	Lembaga	Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/ kota yang mengacu pada pedoman teknis standarisasi LPLP yang ditetapkan oleh KPPPA	7
382	2.08.000038	Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Utama	Organisasi	Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak	51

383	2.08.000039	organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	2
384	2.08.000042	Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu	1
385	2.08.000045	Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KS dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	Pendampingan pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan Kualitas Keluarga dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan PPPA kepada perangkat daerah terkait di Kab/Kota sesuai kebutuhan, seperti penyusunan dokumen PPRG dengan baseline IKK/ data pembangunan keluarga lain atau pelaksanaan teknis lainnya.	43
386	2.08.000048	Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan PelaksanaanPengarusutamaan Gender (PUG) termasukPenerapan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat Daerah	Meliputi : (1) Diseminasi kebijakan penyelenggaraan PUG meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan, kepada perangkat dan (2) penguatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan PUG	43
387	2.08.000049	Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarusutamaan Gender (PUG) termasukPenerapan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	Meliputi : (1) advokasi/ penguatan/ bimbingan teknis dalam rangka optimalisasi fungsi dan peran kelembagaan PUG (Pokja, Focal Point, Gender Champion, Tim ARG, Tim Driver); (2) pendampingan PUG dalam perencanaan dan penganggaran daerah yg responsif gender, serta PUG dalam pengawasan di daerah	43
388	2.08.000054	penerimaan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang menduga dan layanan pengaduan masyarakat	Orang	Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan kabupaten/kota	1
389	2.08.000055	SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan kepada UPTD tingkat kab/kota dalam rangka meningkatkan kapasitas dan jumlah perempuan pelapor &SIAP& yang memiliki kemampuan sebagai fasilitator/champion dan pelapor aksi nyata di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	100
390	2.08.000057	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan layanan penanganan perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	16
391	2.08.000061	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kegiatan	Meliputi : (1) Diseminasi kebijakan penyelenggaraan PUG meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan, kepada perangkat dan (2) penguatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan PUG	1

942	2.03.000067	Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Lembaga		1

9. DSSD BIDANG PANGAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
393	2.09.000090	Konsumsi per kapita per tahun	Laporan	Capaian konsumsi energi (kkal/kap/hari), konsumsi protein (gram/kap/hari) dan konsumsi pangan utama (kg/kapita/tahun) berdasarkan wilayah. Konsumsi pangan utama merupakan konsumsi komoditas pangan utama dari sembilan kelompok pangan PPH	1
394	2.09.000053	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen	Peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisis indikator ketahanan dan kerentanan pangan.	1
395	2.09.000068	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	Dokumen	Sasaran total konsumsi energi (kkal/kap/hari), total konsumsi protein (gram/kap/hari), skor PPH selama lima tahun perencanaan pembangunan daerah yang dihitung dari data dasar konsumsi pangan aktual. (Target konsumsi pangan tercantum dalam RPJMD)/dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/ target konsumsi energi sejalan dengan standar AKE yang ditetapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku) Penetapan target skor PPH kabupaten/kota mengacu pada Perbadan 11/2023 tentang Pola Pangan Harapan.	1
396	2.09.000076	Data daerah rentan rawan pangan	Laporan	data daerah yang memiliki karakteristik berpotensi mengalami kejadian rawan pangan. Dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, yang termasuk daerah rentan rawan pangan adalah daerah pada prioritas 1 sampai 3.	1
397	2.09.000078	Data harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen	Dokumen	Data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi harga dan pasokan pangan tingkat produsen (petani/peternak/penggilingan) dan tingkat konsumen (pedagang grosir/eceran) dengan subjek tertentu melalui pencatatan berulang secara berkala	1
398	2.09.000079	Data Jumlah Penduduk	Dokumen	Data jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun berjalan yang digunakan untuk menghitung total kebutuhan pangan, dengan perhitungan konsumsi kg per kapita dikalikan jumlah penduduk. Sumber data dari BPS	1
399	2.09.000081	Data Konsumsi Pangan	Dokumen	Data jumlah pangan yang dibutuhkan untuk konsumsi baik rumah tangga maupun non rumah tangga (untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres 66/2021	1
400	2.09.000083	Data Produksi Pangan	Dokumen	Data jumlah pangan yang diproduksi atau dihasilkan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, baik yang belum mengalami proses pengolahan maupun yang sudah mengalami proses pengolahan (angka tetap dan angka sementara)	1

601	2.09.000064	Data Stok Pangan	Dokumen	Data jumlah bahan pangan yang disimpan/dikuasai oleh pemerintah/swasta, seperti yang ada di pabrik, gudang, depo, lumbung petani/rumah tangga, dan pasar/pedagang yang dimaksudkan sebagai cadangan pangan untuk satu jenis pangan tertentu. Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres 66/2021	1
602	2.09.000036	Informasi Harga Pangan di tingkat Konsumen berkala	Laporan	Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi harga pangan tingkat konsumen (pedagang grosir/eceran) dengan subjek tertentu melalui pencatatan berulang secara berkala	1
603	2.09.000100	Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun	Dokumen	Dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun adalah catatan atau rekaman pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Keamanan pangan, yang mencakup pelatihan internal dan eksternal	1
604	2.09.000115	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala	Laporan	Kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi untuk memantau jumlah stok, pasokan dan kondisi harga pangan pokok strategis dengan melibatkan semua pelaku usaha produsen/penggilingan/pedagang/ asosiasi/distributor serta melakukan pemantauan harga di tingkat produsen dan harga eceran di pasar tradisional, grosir, dan retail yang dilakukan secara berkala	1
605	2.09.000119	Jumlah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar	Laporan	Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau kegiatan dengan sebutan lainnya yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan, dengan harga terjangkau dengan tujuan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi	1
606	2.09.000132	Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi	Dokumen	Peta tematik yang menggambarkan situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi sesuai data dan analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) yang menyediakan cepat ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, dengan unit analisanya data di tingkat	1
607	2.09.000135	Jumlah Infrastruktur Pendukung Ketersediaan Pangan Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah infrastruktur jaringan internet dan software/aplikasi yang dimiliki untuk mendukung ketersediaan pangan	1
608	2.09.000144	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam Pengembangan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	Banyaknya kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan penerapan konsumsi pangan B2SA di desa/kelurahan di kabupaten/kota	1

609	2.09.000145	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Laporan	dimaksud meliputi yang dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penilaian capaian konsumsi energi, konsumsi protein, dan skor PPH, serta evaluasi terhadap target RPJMD/dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penetapan target skor PPH setelah dengan	1
610	2.09.000144	Indeks Ketahanan Pangan Level Desa	Dokumen	Ukuran dari indikator-indikator yang mewakili aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan level desa/kelurahan. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan	1
611	2.09.000152	Data Penerima Manfaat	Dokumen	Penerima manfaat dalam rangka pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten/kota di desa/kelurahan rentan rawan pangan atau terdampak bencana	1
612	2.09.000190	data cadangan pangan pemerintah Pemerintah kab/kota	Dokumen	data cadangan pangan pemerintah Pemerintah kab/kota , yaitu pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan	1
613	2.09.000213	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang terpelihara	Ton	Jumlah stok cadangan pangan pemerintah yang terpelihara	14.75
614	2.09.000216	Jumlah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	Jumlah dan jenis pangan pengadaan cadangan pangan pemerintah	14.75
615	2.09.000217	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi	Dokumen	Laporan mengenai pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi yang melibatkan OPD terkait dan stakeholder lainnya.	1
616	2.09.000255	Data Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Dokumen	Data jumlah LPM, data pengadaan dan stok pangan yang dikelola LPM, jenis pangan yang dikelola LPM	1

10. DSSD BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
617	2.11.000004	Data Capaian IKLH Per tahun	Poin	Tersedianya data hasil pengukuran capaian IKLH meliputi: IKA, IKU, IKAL, IKL pada tingkat Kab/kota	77.46
618	2.11.000021	Data pengujian parameter kualitas lingkungan	Data	Data hasil penetapan dan penentuan parameter kualitas lingkungan baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu	3
619	2.11.000075	Keluarga yang diidentifikasi memerlukan Pemberdayaan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman Yang Sehat	Keluarga	Jumlah Keluarga yang diidentifikasi memerlukan Pemberdayaan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman Yang Sehat	150
620	2.11.000098	Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1
621	2.11.000100	Laporan hasil Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kab/kota	Dokumen	Tersedianya laporan hasil penyelenggaraan penyuluhan dalam bentuk dalam bentuk sosialisasi, kampanye, workshop, publikasi, ajang kreatifitas dan aktivasi, tema teknis, tema kasus dan kampanye lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	3
622	2.11.000105	Laporan pelaksanaan penyiaran informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat	Dokumen	Laporan hasil sosialisasi dan penyampaian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat	3
623	2.11.000106	Laporan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dokumen	Data seluruh lokasi yang dinilai oleh pemerintah provinsi akibat adanya pencemaran	1
624	2.11.000127	Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk memberdayakan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman Yang Sehat	Materi	Jumlah Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk memberdayakan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman Yang Sehat	1 Materi (Pengelolaan Sampah an organik dan Non Organik)
625	2.11.000129	Nilai IKA n-1	Poin	Nilai yang menunjukan kualitas air pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air sesuai dengan NSPK yang berlaku	70.73
626	2.11.000130	Nilai IKLH n-1	Poin	Nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan nilai komposit dari IKA, IKU, IKTL, dan IKAL	72.9
627	2.11.000131	Nilai IKTL n-1	Poin	Nilai yang menunjukan kualitas tutupan lahan pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas tutupan lahan sesuai dengan NSPK yang berlaku	77.46
628	2.11.000132	Nilai IKU n-1	Poin	Nilai yang menunjukan kualitas udara pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas udara sesuai dengan NSPK yang berlaku	86.15

629	2.11.000149	PPLHD yang dilatihkan	Orang	Data kebutuhan PPLHD	1
630	2.11.000150	Sarana dan prasarana pengangkutan sampah	Unit	1. tersedianya data dan jumlah sarana pengangkutan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pengangkutan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengoperasionalkan sarana pengangkutan sampah	10
631	2.11.000160	Sarana dan prasarana pengumpulan sampah	Unit	1. tersedianya data dan jumlah sarana pengumpulan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pengumpulan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengoperasionalkan sarana pengumpulan sampah	92 SDM Anggaran: 1.653.500.000
632	2.11.000165	Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)	Titik	Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah provinsi untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut	15
633	2.11.000172	Volume timbulan sampah yang diangkut	Ton	1. tersedianya data jumlah sampah yang di tangani melalui penanganan dari TPS/TPST/Bank Sampah/PDU/TPS3R dll ke TPA 2. tersedianya data jumlah timbulan sampah yang di tangani melalui penanganan (ton) sumber sampah ke TPA	10000
634	2.11.000175	Volume timbulan sampah yang dilakukan pemilahan	Ton	1. Data jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengumpoan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2. Data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengumpoan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui penganggkutan 3. Data jumlah/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, sraggot, kompos dll - ton	900
635	2.11.000183	Jumlah data contoh uji	Data	Data jumlah contoh uji yang diinventaris oleh laboratorium lingkungan hidup, baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu	3
636	2.11.000186	Jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup	Dokumen	Data Laporan hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan hidup daerah	3
637	2.11.000192	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi	Unit	1. Data dan jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah 2. Data biaya operasional setiap sarana penanganan sampah 3. Data biaya pemeliharaan setiap sarana penanganan sampah (servis berkala)	10 Unit

638	2.11.000220	Jumlah Laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Laporan	1. jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. jumlah kegatan sosialisasi pembatasan sampah 3. jumlah kegatan pemantauan pembatasan sampah	12
639	2.11.000224	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah berwenang bersama dengan K/L terkait, pemerintah daerah kabupaten/kota serta lembaga lainnya dalam hal pencegahan pencemaran lingkungan hidup	4
640	2.11.000230	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Nilai yang menunjukan kualitas tutupan lahan pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas tutupan lahan sesuai dengan NSPK yang berlaku	4
641	2.11.000231	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Laporan hasil kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan Hidup untuk peningkatakan kualitas air, udara dan laut pada lingkup provinsi, Kabupaten, dan/atau Kota	4
642	2.11.000254	Jumlah PPLHD yang dibutuhkan	Orang	Tersedianya data kebutuhan PPLHD	1
643	2.11.000259	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi	Unit	1. tersedianya data dan jumlah sarana serta prasarana penanganan sampah kabupaten/kota 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota (Rp/bulan atau Rp/ton atau Rp/tahun) 3. tersedianya data biaya pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota (Rp/tahun)	7(Becak Motor) 3 dumptruck
644	2.11.000260	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional yang tersedia	Unit	tersedianya data jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah regional	7(Becak Motor) 3 dumptruck
645	2.11.000268	Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)	Titik	Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut	15
646	2.11.000280	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	%	1. tersedianya data jumlah sumber sampah berdasarkan klasifikasi (perumahan, KK. Industri (I, II, III dst.) Hotel, pasar, kantor Swasta dll) 2. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui Gerobak 3. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui roda 3 4. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui pickup 5. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui truck engkel 6. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui truck double 7. tersedianya data jumlah potensi timbulan sampah yang di kumpulkan oleh penanganan sampah berbasis masyarakat (TPS3R/PDU)	10.45
647	2.11.000281	Tersedianya dokumen IKLH	Dokumen	Dokumen hasil perhitungan IKLH yang terdiri atas perhitungan IKA, IKU, IKL, IKAL	1

648	2.11.000287	Volume sampah yang dimanfaatkan kembali	Ton	tersedianya data jumlah sampah yang di manfaatkan kembali	1000
649	2.11.000290	Volume sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	1. tersedianya data jumlah sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari TPS/TPST/Bank Sampah/PDU/TPS3R dll ke TPA 2. tersedianya data jumlah timbulan sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari sumber sampah ke TPA	10000
650	2.11.000297	Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Laporan	Laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan kewenanganya	1
651	2.11.000301	Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenanganya	1
652	2.11.000302	Jumlah usaha yang dibina dan diperiksa berdasarkan Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	Usaha	Tersedianya data usaha yang dibina dan diperiksa berdasarkan Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	9
653	2.11.000303	laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Laporan	laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan pencemaran lingkungan hidup sesuai kewenanganya	2
654	2.11.000305	Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenanganya	1
655	2.11.000313	Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenanganya	1
656	2.11.000314	Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup	Dokumen	Laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegatan yang dilakukan dalam rangka pemulihan pencemaran lingkungan hidup	2
657	2.11.000319	Data unit sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir eksiting	Unit	Tersedianya data jumlah sarana prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir eksiting	10
658	2.11.000320	Data unit sarana dan prasarana pepenanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang bertambah	Unit	Tersedianya data jumlah sarana prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang bertambah pada tahun anggaran berjalan	10

658	2.11.000321	Data keterangan/kebutuhan unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan/atau Jakstrada	Unit	Tersedianya data keterangan/kebutuhan unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan/atau Jakstrada sebagai dasar untuk pengalokasian anggaran di tahun berikutnya	136
660	2.11.000327	Data pihak swasta yang melakukan pengelolaan sampah	Badan Usaha	tersedianya data jumlah pihak lain (badan usaha) yang dibina dan diawasi kinerjanya dalam pengelolaan sampah.	29
661	2.11.000329	jumlah tonase sampah yang terkelola oleh pihak swasta yang telah memperoleh perizinan pengelolaan sampah	Ton	tersedianya data sampah yang terkelola oleh pihak lain (badan usaha) yag telah memperoleh perizinan pengelolaan sampah	49
662	2.11.000349	Laporan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota termasuk pengelolaan sampah spesifik, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun secara tertulis	Laporan / Dokumen	Tersedianya laporan dari seluruh kegatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota termasuk pengelolaan sampah spesifik, baik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun secara tertulis	1
663	2.11.000350	Jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembali	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembali	900
664	2.11.000351	Jumlah tonase sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, proses pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah yang tertangani di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, proses pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya, baik melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah	1000
665	2.11.000352	jumlah tonase sampah yang didaur ulang	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah yang berhasil didaur ulang	900
666	2.11.000354	Jumlah tonase sampah yang terkelola melalui kerja sama/kemitraan dalam pengelolaan sampah	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah yang terkelola melalui kegiatan kerja sama/kemitraan dalam pengelolaan sampah	900
667	2.11.000357	Timbulan Sampah Harian	Ton	Timbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per hari.	192
668	2.11.000358	Timbulan Sampah Tahunan	Ton	Timbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per tahunnya	2309

11. DSSD BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
669	2.12.000001	Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	Data kependudukan kabupaten/kota adalah kumpulan informasi yang mencakup jumlah, distribusi, karakteristik, serta dinamika penduduk dalam suatu wilayah kabupaten atau kota.	7
670	2.12.000002	Data Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan	Dokumen	Data kependudukan terkait pendaftaran penduduk yang dimanfaatkan adalah informasi hasil pencatatan dan pengelolaan identitas penduduk yang digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, pelayanan publik, serta kebijakan pemerintah.	5
671	2.12.000003	Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen	Informasi mengenai identitas dan status kependudukan penduduk yang terverifikasi, valid, mutakhir, serta sesuai dengan kondisi faktual yang ada di lapangan.	3
672	2.12.000004	Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang tersedia	Dokumen	Kumpulan informasi resmi mengenai identitas penduduk yang telah terdaftar dalam sistem administrasi kependudukan, dikelola oleh instansi berwenang, serta dapat digunakan untuk berbagai keperluan layanan publik dan pemerintahan.	4
673	2.12.000005	Data yang telah diolah dan dianjikan	Dokumen	Data yang telah diolah dan dianjikan adalah informasi yang telah melalui proses pengolahan, analisis, dan penyusunan sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengambilan keputusan, perencanaan, atau pelaporan.	2
674	2.12.000006	Dokumen data kependudukan yang diolah dan dianjikan	Dokumen	Dokumen data kependudukan yang telah diolah dan dianjikan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, serta pelaporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.	3
675	2.12.000017	Dokumen Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	Dokumen berisi hasil pelayanan aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk.	2
676	2.12.000020	Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	Dokumen hasil pemanfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil adalah dokumen yang mencatat penggunaan data kependudukan dalam aspek pencatatan sipil, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan perubahan status kependudukan.	4
677	2.12.000026	Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blanko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dokumen	Dokumen hasil pengelolaan dan pelaporan penggunaan blanko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk adalah laporan resmi yang mencatat dan mengontrol distribusi, penggunaan, serta pengelolaan blanko dokumen kependudukan, formulir, dan buku yang digunakan dalam layanan administrasi pendaftaran penduduk.	3

678	2.12.000035	Dokumen kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	Dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan adalah dokumen resmi yang mengatur perjanjian antara instansi pemerintah, perguruan tinggi, atau pihak terkait lainnya dalam pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan perencanaan, penelitian, atau pelayanan publik, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	6
679	2.12.000044	Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	Mencatat proses, mekanisme, serta hasil pemanfaatan data kependudukan untuk berbagai keperluan, seperti perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pengambilan kebijakan. Dokumen ini juga mencakup kerja sama antarinstansi dalam pemanfaatan data kependudukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	9
680	2.12.000086	Laporan pencatatan atas peristiwa kependudukan	Laporan	Laporan yang mendokumentasikan pencatatan berbagai peristiwa kependudukan, seperti kelahiran, kematian, perpindahan, dan perubahan status penduduk, sebagai bagian dari administrasi kependudukan yang tertib dan akurat.	2
681	2.12.000087	Laporan Penerbitan Dokumen atas Hasil PeLaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	Laporan yang berisi informasi mengenai penerbitan dokumen kependudukan berdasarkan hasil pelaporan peristiwa kependudukan, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan perpindahan penduduk, guna memastikan kesesuaian data administrasi kependudukan.	3
682	2.12.000088	Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	Laporan	Laporan yang memuat hasil penyajian data kependudukan yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan, khususnya terkait pencatatan sipil, guna mendukung kebijakan dan perencanaan administrasi kependudukan.	1
683	2.12.000089	Layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	Layanan	Peningkatan kualitas layanan pencatatan sipil melalui optimalisasi prosedur, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kapasitas adm untuk memastikan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan transparan bagi masyarakat.	2
684	2.12.000093	Penyediaan Data Agregat Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Data	Jumlah total penduduk provinsi dan kabupaten/kota, dan dipilah per jenis kelamin (laki-laki dan perempuan)	1

12. DSSD BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
655	2.13.000001	Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	Orang	Aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas.	400
656	2.13.000008	Buku Register Desa	Dokumen	pemberian) evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota merupakan tugas atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka Pencatatan Data dan informasi serta pemrosesan Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati/Wali Kota (Kabupaten/Kota /Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa, untuk memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan	1
657	2.13.000009	BUM Desa di Kabupaten/Kota	Dokumen	Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan melalui strategi: a. revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa b. peningkatan kualitas manajemen dan pengurusan organisasi BUM Desa/BUM Desa c. penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa d. penguatan kerja sama atau e. penguatan pengelolaan aset dan f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan dan g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.	7
658	2.13.000010	Data dasar keluarga, perorangan desa dan Kelurahan, tingkat perkembangan desa dan kelurahan	Dokumen	Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan merupakan upaya membuking proses pelaksanaan Prodeskel mulai dari pengumpulan sampai dengan publikasi data Prodeskel, yang meliputi: 1. Fasilitasi Pengumpulan Data 2. Fasilitasi Pengunjuran dan Pemanfaatan Data 3. Fasilitasi Publikasi Data	1
659	2.13.000013	Desa yang terfasilitasi penataan kewenangannya	Desa	Fasilitasi Kabupaten/Kota untuk menyusun Peraturan Bupati/Wali Kota tetang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menyusun Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagai dasar penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, dan Peraturan/Kebijakan Lainnya.	1

690	2.13.000014	Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan peraturan desa	Dokumen	Dokumen berisi hasil evaluasi dan pengawasan terhadap peraturan desa.	1
691	2.13.000016	Dokumen hasil fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Dokumen	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota merupakan upaya atau dukungan (sosialisasi, bimbingan, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota dan Peraturan Desa.	1
692	2.13.000020	Dokumen hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Dokumen	Fasilitasi pembinaan Laporan Kepala Desa merupakan upaya dukungan (sosialisasi, bimbingan, asistensi, dll) yang di berikan Oleh pemerintah pusat kepada pemda Kab/kota dalam rangka proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sehingga berjalan transparan dan akuntabel	3
693	2.13.000023	Dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa	Dokumen	Perencanaan Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa. Perencanaan Pembangunan Desa terdiri dari: 1. Penyusunan RPJM Desa, dan 2. Penyusunan RKP Desa	1
694	2.13.000025	Dokumen pengelolaan keuangan desa	Dokumen	Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam bentuk: 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 3. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 4. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 5. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa	1
695	2.13.000027	Informasi pelayanan masyarakat desa baik pertemuan maupun media lain	Dokumen	Informasi mengenai pelayanan masyarakat desa yang disampaikan melalui pertemuan maupun media lainnya.	1
696	2.13.000042	Laporan penyelenggaraan musyawarah desa	Laporan	Laporan berisi hasil penyelenggaraan musyawarah desa.	303

697	2.13.000043	lembaga adat di Kabupaten/Kota	Lembaga Adat	Afirmasi atau SK Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui Penelitian SK MHA, Fasilitasi Asistensi, Identifikasi, Verifikasi, Validasi Pengakuan dan Perlindungan MHA	25
698	2.13.000045	Musyawarah Desa	Dokumen	Forum permusyawaratan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa bersama masyarakat untuk membahas dan mengambil keputusan terkait penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.	303
699	2.13.000058	Partisipasi masyarakat Desa pengawasan dan evaluasi secara partisipatif oleh Badan Permusyawaratan Desa.	Peraturan Desa	1. Jenis Produk Hukum Desa terbagi menjadi 3: Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa , 2. Fasilitasi yang dilaksanakan adalah berupa Pengujian Penyusunan Produk Hukum Desa, Bimbingan Teknis penyusunan Produk Hukum Desa dan Pendataan produk Hukum Desa	17
700	2.13.000064	Peraturan Bersama Kepala Desa musyawarah antar desa	Peraturan Kepala Desa	(prinsipal) Kerja Sama Desa dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (kab/Kota) Kesepakatan bersama antar-Desa yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta memberikan hak dan kewajiban para pihak. kerja sama antar Desa dilakukan antara : a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) dan b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	17
701	2.13.000065	Perencanaan, pelaksanaan, Pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	Proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.	254
702	2.13.000069	Rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain	Lembaga Desa dan Desa Adat	penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan NSPK, Musrev dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi terhadap LKD & LAD serta MHA di Desa dan Desa Adat	25
703	2.13.000074	Tingkat pembentukan desa	Desa	Status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasar Indeks Desa Membangun yang diklasifikasikan dalam 5 status Desa yakni: a. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa b. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra c. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa d. Desa Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pra dan e. Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pratama.	5

13. DSSD BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
704	2.14.000003	Daerah Kab/Kota yang telah Menyusun dan Memanfaatkan GDPK	Laporan	Jumlah daerah provinsi yang telah menyusun Dokumen GDPK 5 Pilar, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (DJPK), Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (DJPK) dan memanfaatkannya dalam pembangunan terutama dalam dokumen perencanaan daerah	1
705	2.14.000006	Daerah yang telah melaksanakan Pengaturan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Laporan	Daerah Melaksanakan Pengaturan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui fasilitasi dan orientasi	1
706	2.14.000013	Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	Laporan	Menghasilkan / Mengembangkan / Menyediakan Data dan Informasi Keluarga	17
707	2.14.000014	Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang dimanfaatkan stakeholder/instansi/organisasi	Laporan	Melaksanakan Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1
708	2.14.000015	Data Keluarga yang terurut dan terlaporkan	Laporan	Melaksanakan Perencanaan dan Pengumpulan Data Keluarga	1
709	2.14.000017	Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolah	Laporan	Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolah	1
710	2.14.000018	Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang telah diolah dan dilaporkan	Laporan	Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Keluarga Berencana yang telah diolah dan dilaporkan	17
711	2.14.000022	Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya (Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kegiatan	Terlaksananya Harmonisasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya (Bangga	1
712	2.14.000025	Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kegiatan	Penyusunan Data Pendukung Perencanaan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1
713	2.14.000034	Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)	Orang	Daerah Menyediakan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	5453
714	2.14.000035	kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	Daerah Melaksanakan Orientasi/Pelatihan/Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1628
715	2.14.000036	kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	Daerah yang melaksanakan kegiatan penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1340
716	2.14.000038	Kampung KB yang melaksanakan pengelolaan Program KKBPK (Bangga Kencana)	Kampung	Daerah yang melaksanakan dan mengelola Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berencana	304
717	2.14.000040	Kampung KB yang telah menerima penilaian	Kegiatan	Daerah yang melaksanakan Penilaian Terpadu Kampung Keluarga Berkualitas	304

718	2.14.000044	Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Kelompok	Daerah Mengadakan Semua Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA, TAMASYA, GATI, GENTING)	1001
719	2.14.000045	Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi [illegible]	Kelompok	Daerah Membentuk Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) / Pemberdayaan Ekonomi Keluarga).	1001
720	2.14.000047	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK yang tejadi sesuai Kearifan Budaya Lokal	Laporan	Daerah yang menyediakan Materi Promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	1
721	2.14.000048	Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Laporan	Daerah Melaksanakan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga	1
722	2.14.000049	Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	Daerah melaksanakan Pembinaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	1
723	2.14.000050	Laporan hasil Pengaturan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	Daerah yang melakukan pengaturan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengendalian Program Bangga Kencana untuk Penyuluh KB/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1
724	2.14.000051	Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	Daerah Melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1
725	2.14.000052	Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutanlasan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	Laporan	Daerah Melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutanlasan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1
726	2.14.000053	Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Jaringa Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	Daerah yang melaksanakan pengendalian dan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan yang terregistrasi	1

727	2.14.000061	Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) yang telah berjalannya	Kegiatan	Daerah yang melaksanakan Mekanisme Operasional Program Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1
728	2.14.000063	Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKE) yang dihayagunakan	Organisasi	Daerah Melaksanakan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	15
729	2.14.000065	Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang telah dibebas	Laporan	Daerah yang mengelola Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB	1
730	2.14.000066	orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	Daerah yang melaksanakan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	425
731	2.14.000067	orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang / Sertifikat	Daerah yang melaksanakan peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	3757
732	2.14.000072	Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) berpada Stakeholders dan Mitra Kerja	Laporan	Stakeholder (Lembaga pemerintah) dan Mitra Kerja (Lembaga Non Pemerintah) yang berkomitmen dan mendukung Program Bangga Kencana	1
733	2.14.000081	Parameter Kependudukan yang telah ditetapkan	Dokumen	Melaksanakan Penetapan Parameter Pengendalian Penduduk dan KB sebagai target dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	1
734	2.14.000087	Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kegiatan	Pendidikan Jalur Formal dan Nonformal Terimplementasi / Mengimplementasikan Pendidikan Kependudukan	1
735	2.14.000092	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan	Daerah Melaksanakan /Melaporkan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1
736	2.14.000100	Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1
737	2.14.000105	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Laporan	Daerah melakukan upaya penyebarluasan informasi yang menggunakan melalui Media Massa Cetak dan Elektronik, Media online, Media sosial dan Media tatap muka serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1

738	2.14.000107	Rapat Pengendalian Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah dilaksanakan	Kegiatan	Melaksanakan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	1
739	2.14.000108	Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah terbentuk	Laporan / Dokumen	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	304
740	2.14.000109	Sarana KIE Program KKBPK yang Tersedia dan Telah di Distribusikan	Dokumen	Daerah menyediakan dan mendistribusikan sarana KIE Program Bangga Kencana	1
741	2.14.000110	Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang telah tersedia	Laporan	Daerah yang menyediakan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	1
742	2.14.000113	Satuan Pendidikan yang telah mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	1
743	2.14.000116	Survei/Penelitian Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Kegiatan	Kab/Kota melaksanakan penyediaan data dan analisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	1
744	2.14.000117	Tenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang / Sertifikat	Daerah yang meningkatkan kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	20
745	2.14.000118	Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	Daerah Mengadakan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA, TAMANYA, GENTING, GATI, Sidaya)	10
746	2.14.000119	Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB yang telah tersedia	Unit	Daerah melaksanakan pemenuhan sarana penunjang pelayanan KB sesuai jenis pelayanan yang diberikan	31

14. DSSD BIDANG PERHUBUNGAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
747	2.15.000006	Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan	Unit	Alat yang berfungsi sebagai pengendali kecepatan kendaraan bermotor seperti, Speed Bump, Speed Hump, Speed Table dan pembatas lalu lintas , Selain itu juga alat pengaman untuk kendaraan bermotor dalam mengurangi risiko kecelakaan berupa pagar pengaman, cermin tikungan, patok lalu lintas dan jalur pengelompokan darurat.	10
748	2.15.000040	Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Kabupaten/Kota	Dokumen	Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan umum dalam Trayek meliputi: a. dokumen b. dokumen Angkutan c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan Angkutan d. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang e. tanda identitas perusahaan Angkutan dan f. tanda identitas awak kendaraan Angkutan umum. dan Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan meliputi: a. tanda bukti lulus uji berkala kendaraan b. fisik Kendaraan dan c. Standar Pelayanan Minimal.	4416
749	2.15.000142	Data Perlengkapan Jalan	Dokumen	Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan meliputi: a. alat pemberi isyarat lalu b. rambu lalu c. marka d. alat penerangan e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas: 1. alat pembatas dan 2. alat pemantau tinggi dan lebar kendaraan. f. alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas: 1. pagar 2. cermin 3. tanda patok tikungan (delineator); 4. pulau-pulau lalu dan 5. pita penggaduh. g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan dan/atau h. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.	10
750	2.15.000149	Data personel Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan kompetensinya.	Dokumen	Peningkatan kapasitas SDM dimaksud adalah dengan memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan penguji penguji yang meliputi : a. Pembantu Penguji b. Penguji Pemula c. Penguji Tingkat 1 d. Penguji Tingkat 2 e. Penguji Tingkat 3 f. Penguji Tingkat 4 g. Penguji Tingkat 5	7
751	2.15.000151	Data Perusahaan angkutan Umum Kabupaten/Kota	Dokumen	Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum meliputi: 1. komitmen dan kebijakan 2. pengorganisasian 3. manajemen tuhuya dan risiko 4. fasilitasi pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor 5. dokumentasi dan data 6. peningkatan kompetensi dan pelatihan 7. tanggap darurat 8. pelaporan kecelakaan internal 9. monitoring dan evaluasi 10. peningkatan kinerja	10

752	2.15.000153	Data prakiraan perindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah perpindahan orang dan/atau barang untuk memprediksi bikasi dan kebutuhan simpul yang perlu dibangun dan dikembangkan pelayanan angkutan untuk mendukung kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat-tempat strategis.	1
753	2.15.000168	Data Ruang Lalu Lintas	Dokumen	Hasil pemetaan kebutuhan orang berdasarkan potensi perpindahan orang dan/atau barang	1
754	2.15.000189	Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai, dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara.	2
755	2.15.000224	Rambu Lalu Lintas	Unit	Bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan	20
756	2.15.000225	Rambu Lalu Lintas yang terekalibrasi dan terpelihara	Unit	Bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan untuk menjaga kualitas layanan dari perlengkapan jalan tersebut	30
757	2.15.000261	SDM dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas	Orang	Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas wajib memiliki kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas dengan mampu dan memahami hal: a. sikap dan perilaku sebagai petugas/abdi negara yang profesional dengan dilandasi etika profesi dan pertimbangan aspek hukum dan hak	5
758	2.15.000284	Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dokumen	RUNK LLAJ meliputi: a. visi dan b. c. d. dan e. Program Nasional KLLAJ. Dan penyusunan memperhatikan: a. rencana pembangunan jangka panjang b. rencana pembangunan jangka menengah c. perkembangan lingkungan strategis KLLAJ dalam 10 tahun dan d. tujuan	1
759	2.15.000407	Regulasi Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	Peraturan Daerah / Peraturan Bupati/Walikota tentang tarif retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor	1

18. DSSD BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
760	2.16.000067	Nama Domain Pemerintah Daerah	Domain	Merupakan perhitungan Jumlah Nama Domain Pemerintah Daerah - Nama Domain Pemerintah Daerah adalah alamat resmi pemerintah daerah, layanan publik/layanan administrasi pemerintahan, atau layanan kegiatan berskala nasional/internasional yang telah didaftarkan dan menggunakan Nama Domain .go.id	1
761	2.16.000068	Nama Sub Domain Pemerintah Daerah		Merupakan perhitungan Jumlah Sub Domain Pemerintah Daerah - Nama Sub Domain Pemerintah Daerah adalah penggunaan nama sub domain dari domain .go.id pemerintah daerah yang digunakan oleh seluruh perangkat daerah, termasuk layanan SPBE dan kegiatan di daerah	10
762	2.16.000069	Nama Domain Pemerintah Desa	Domain	Merupakan perhitungan Jumlah Nama Domain Pemerintah Desa - Nama Domain Pemerintah Desa adalah alamat resmi pemerintah desa yang telah didaftarkan dan menggunakan Nama Domain .desa.id (contoh: mekarsari.desa.id)	0
763	2.16.000070	Rancangan Kebijakan domain arsitektur infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah		Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait domain infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah - Domain arsitektur infrastruktur adalah bagian dari arsitektur SPBE Pemda yang secara detail membahas terkait infrastruktur SPBE yang digunakan dan/atau dibangun Pemda - Arsitektur SPBE pemerintah daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	0

764	2.16.000071	Rancangan Kebijakan domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah		- Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah - Domain arsitektur aplikasi adalah bagian dari arsitektur SPBE Pemda yang secara detail membahas terkait aplikasi SPBE yang digunakan, dibangun dan/atau dikembangkan Pemda - Arsitektur SPBE pemerintah daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	1
765	2.16.000072	Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah		Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait peta rencana SPBE Pemerintah Daerah - Peta Rencana SPBE pemerintah daerah adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah	1
766	2.16.000073	Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		- Perhitungan Jumlah Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah -Rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah tersebut telah dikoordinasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah. - Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah masing-masing. - Dinas menkoordinasikan dan memberikan rekomendasi rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang anggaran dan keuangan daerah	1
767	2.16.000075	Data dan informasi dibagipakaikan	Data	- Jumlah perhitungan Data informasi yang dibagipakaikan - Data dan Informasi yang dibagipakaikan adalah Data dan informasi Pemerintah Daerah mencakup semua jenis Data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang dipercaya dan masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain	10

768	2.16.000076	Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi	-Perhitungan Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional - Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melaksikan tugas atau fungsi layanan SPBE. - Pusat Data nasional merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung - Pusat Data nasional terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.	0
769	2.16.000077	Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data Nasional	Unit	-Perhitungan Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data Nasional - Pusat Data yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.	0
770	2.16.000078	Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional	Unit	-Perhitungan Jumlah Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional - Pusat Komputasi adalah Pusat Komputasi adalah fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu. - Pusat Komputasi terdiri dari laberatorium komputer, ruang server farm, dan workstation farm.	0
771	2.16.000079	Pusat pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional	Unit	-Perhitungan Jumlah Pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional - Pusat kendali adalah Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem - Pusat kendali adalah Pusat Kendali terdiri dari Network Operation Center, Data Operation Center, Command/Operation Center, Security Operation Center, dan Emergency Operation Center.	0
772	2.16.000080	Pusat komputasi yang diselenggarakan pemerintah daerah	Unit	-Perhitungan Jumlah Pusat komputasiyang diselenggarakan pemerintah daerah	1
773	2.16.000081	Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah	Unit	-Perhitungan Jumlah Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah	1
774	2.16.000083	Perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota - Dinas di tingkat Pemerintah Daerah kabupaten/kota menghubungkan jaringan di dalam Pemerintah Daerah kabupaten/kota. - Perangkat daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	1

775	2.16.000085	Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah daerah - Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah -Perangkat daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	0
776	2.16.000086	Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	-Perhitungan Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah - Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah. - Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan olehPemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah	0
777	2.16.000087	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Aplikasi	- Keterhubungan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan SPLP -Sistem Penghubung Layanan Pemerintah merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo	0
778	2.16.000088	Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Perida		- Perhitungan Jumlah Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Perida - Kapasitas kecepatan bandwith adalah kapasitas kecepatan jaringan yang disediakan oleh penyedia layanan internet untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik	100 Mbps, Broadband
779	2.16.000089	Perangkat Daerah yang memiliki akses internet	Perangkat Daerah	- Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akses internet - Penyediaan akses internet menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	26

780	2.16.000090	Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas - Penyediaan akses internet menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Penyediaan layanan akses internet terhadap fasilitas layanan dasar yang menjadi kewenangan Provinsi (SMA/SMK/SLB, RSUD) / Kabupaten/Kota (SD/SMP,Puskesmas) dengan kualitas layanan dan keamanan jaringan internet yang sama merata baik di kota besar maupun yang di daerah pelosok.	3
781	2.16.000091	Area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Titik	- Perhitungan area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Titik Lokasi) - Dinas Kominfo melakukan penyediaan internet di area publik dengan penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Area publik tersebut antara lain jalan, pedestrian, taman lingkungan, plaza, lapangan olahraga, taman kota, taman rekreasi, dan lain-lain. - Daerah menyelenggarakan Infrastruktur Pasif sesuai PP 46 Tahun 2021	0
782	2.16.000092	Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah	Aplikasi	-Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan pemerintah daerah. - Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat atau Pemerintah Daerah lain	3
783	2.16.000093	Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo	Aplikasi	Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo melalui mekanisme Pendaftaran PSE Lingkup Publik.	0
784	2.16.000094	Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	Aplikasi	-Perhitungan aplikasi umum yang telah dimanfaatkan - Aplikasi Umum adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB	10

785	2.16.000085	Layanan Perda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	-Perhitungan Jumlah layanan Perda yang memanfaatkan Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Perda -Portal Pelayanan Publik portal pelayanan publik Pemerintah Daerah yang berisi atau semua pelayanan publik di setiap pemerintah daerah: provinsi dan semua pemerintah daerah kabupaten/kota di dalam provinsi tersebut. -Portal Administrasi Pemerintahan merupakan portal yang mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan yang mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. - Portal data nasional merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.	0
786	2.16.000086	Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan perda	Layanan	-Jumlah Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan perda - Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.	2
787	2.16.000087	Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan perda	Layanan	-Jumlah Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan perda - Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, perpajakan, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, pariwisata, sumber daya alam, pertanian, dan sektor strategis lainnya.	2
788	2.16.000088	SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Perda	Surat Keputusan	-Perhitungan Jumlah SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Perda - Dokumen tersebut antara lain SK	1
789	2.16.000089	Server yang dikelola pemerintah daerah	Unit	-Jumlah server yang dikelola pemerintah daerah	0
790	2.16.000100	Utilisasi server yang dikelola pemerintah daerah	Persentase	persentase penggunaan server pemerintah daerah dibandingkan dengan kapasitas total server pemerintah daerah	0
791	2.16.000101	Peranglkat keras media penyimpanan TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit	-jumlah data storage yang digunakan pemerintah daerah - Peranglkat keras media penyimpanan TIK adalah data storage yang dapat diakses dengan metode akses data sharing Direct Attached Storage/DAS atau Network Attached Storage/NAS.	0

792	2.16.000102	Perangkat keras jaringan TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit	- Jumlah perangkat keras jaringan TIK yang digunakan pemerintah daerah - Perangkat keras jaringan TIK adalah jenis jaringan TIK yang terdiri dari Network/Communication Device yang digunakan (Switch L2, Switch L3, Switch L4, Switch L7, Multilayer Switch, Router, Wireless equipment, atau Transmission equipment)	0
793	2.16.000103	Perangkat keras keamanan TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit	- Jumlah perangkat keras keamanan TIK yang digunakan pemerintah daerah - Perangkat keras keamanan TIK adalah perangkat keamanan TIK yang memiliki jenis dari security device (Firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Proxy, Load Balancer, Wireless Intrusion Prevention and Detection System, Unified Threat Management, atau Network Access Control)	0
794	2.16.000104	Perangkat keras pheripheral TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit	- Jumlah perangkat keras peripheral TIK yang digunakan pemerintah daerah. - Perangkat keras peripheral TIK adalah perangkat pendukung TIK yang memiliki jenis dari Perifiral Input, Output, Input/Output	26
795	2.16.000105	Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE	Dokumen	-jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE -Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.	0
796	2.16.000106	Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE	Dokumen	- jumlah dokumen Manajemen Layanan SPBE - Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.	0
797	2.16.000107	SDM Pemda yang memiliki latar belakang dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang TIK	Orang	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi	2
798	2.16.000108	Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas		- Perhitungan jumlah Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas -Pedoman Program Kota Cerdas merupakan pedoman program konsep pengelolaan kota/kabupaten berkelanjutan dan berdaya saing yang dibangun untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan komunikasi serta inovasi yang diarahkan untuk perbaikan kinerja, meningkatkan efisiensi, dan melibatkan partisipasi masyarakat.	0

799	2.16.000109	Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Inovasi	- Perhitungan jumlah Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas -Inovasi Program Kota Cerdas merupakan perubahan cara,metode, teknologi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program atau layanan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan dampak positif kepada masyarakat	0
800	2.16.000110	Pengguna SPBE yang mendapatkan literasi SPBE	Orang	-Perhitungan Jumlah pengguna SPBE yang mengikuti Promosi Literasi SPBE - Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.	0
801	2.16.000111	Audit TIK internal	Dokumen	-Jumlah dokumen Audit TIK internal - audit TIK internal dilaksanakan secara periodik oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi pengawasan internal dan dapat melibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara dari unit kerja lain yang memiliki kompetensi Audit TIK	0
802	2.16.000112	Audit TIK eksternal	Dokumen	-Jumlah dokumen Audit TIK eksternal Pelaksanaan Audit TIK mengacu kepada PM Kominfo Nomor 16 tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK	0
803	2.16.000113	Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Orang	- Menjabarkan perhitungan jumlah orang yang terpapar informasi - Khalayak yang terpapar informasi adalah orang yang mendapatkan informasi terkait Peraturan bidang IKP	0
804	2.16.000114	Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor	Aduan	- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor - Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara	6
805	2.16.000115	Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR	Aduan	- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat - Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnyamedia resmi pemerintah daerah (Misalnya Twitter, IG, FB, Website, dll)	75
806	2.16.000116	Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah	Kanal	- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat - Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnyamedia resmi pemerintah daerah (Misalnya Twitter, IG, FB, Website, dll)	6

807	2.16.000117	Frekuensi laporan hsi publik yang dipantau	Laporan	1. Laporan hsi publik memuat isu sektoral yang sedang berkembang di masyarakat dengan kategorisasi isu Pidhukum, PMK, Perekonomian, Maritim dan Investasi 2. Mengolah isu publik dengan penerapan analisis sentimen, situasional analysis, dll 3. Menyusun Rekomendasi komunikasi bagi pimpinan 4. Menyusun agenda setting komunikasi publik Pemda dan menguatkan agenda komunikasi yang menjadi prioritas 5. Satuan dimaksud berupa laporan/minggu [0 -7]	2
808	2.16.000120	Strategi Komunikasi Publik yang dibuatan	Dokumen	Perhitungan Jumlah strategi komunikasi publik yang disusun - strategi komunikasi memuat: a. tujuan komunikasi b. analisis situasi lingkungan internal dan c. penyesuaian isu dan pemangku d. Perancangan program komunikasi e. Pelaksanaan program komunikasi publik berdasarkan waktu yang telah f. evaluasi program komunikasi publik. Dalam hal terjadi komunikasi krisis maka penanganannya sesuai SOP komunikasi krisis	1
809	2.16.000121	Komunikasi krisis yang telah dikelola	Laporan	Jumlah komunikasi krisis yang telah dikelola -Komunikasi krisis merupakan komunikasi yang berupaya untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga Pemerintah Daerah - Satuan laporan yang dimaksud adalah laporan kasus	0
810	2.16.000122	Prosedur penanganan komunikasi krisis	SOP	Prosedur penanganan komunikasi krisis yang diperbaharui minimal 1 tahun sekali dengan mengacu pada panduan nasional	0
811	2.16.000124	Konten Foto	Konten Digital	- Perhitungan Jumlah konten foto - Konten Foto adalah konten hasil tangkapan kamera	90
812	2.16.000125	Konten Teks	Konten	- Perhitungan Jumlah konten teks - Konten Teks adalah konten berisikan karya tulis yang menghadirkan informasi di dalamnya	32
813	2.16.000126	Konten Grafis	Konten	- Perhitungan Jumlah konten grafis - Konten Grafis adalah konten berupa karya visual	3
814	2.16.000127	Konten Audio Video	Konten	- Perhitungan Jumlah konten audio visual - Konten Audio Visual adalah konten dari kombinasi suara dan juga visual yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi atau konteks yang dituju	27
815	2.16.000128	Konten Audio	Konten	- Perhitungan Jumlah konten foto - Konten Audio adalah konten berformat suara yang bisa di dengarkan	0
816	2.16.000129	Konten digital yang menggunakan bahasa setempat	Konten	Jumlah Konten digital yang di produksi dengan menggunakan bahasa setempat untuk beriinteraksi - Konten digital yang di produksi dengan menggunakan bahasa setempat/dialek setempat untuk beriinteraksi	0
817	2.16.000130	Pertemuan tatap muka	Kegiatan	- Perhitungan Jumlah pertemuan tatap muka - Pertemuan tersebut dilakukan secara langsung antara pemberi dan penerima informasi (misal: melalui forum)	1

818	2.16.000131	Diseminasi melalui Media Berbayar	Kegiatan	- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui Media Berbayar - Media Berbayar adalah Media Komunikasi Publik yang penggunaannya menggunakan akuns berbayar	13
819	2.16.000132	Diseminasi melalui Earned Media	Kegiatan	-Perhitungan jumlah diseminasi melalui earned media - Earned media adalah media yang memiliki konten yang secara sukarela dipublikasikan di platform oleh orang lain -Contoh: postingan tulang diseminasi di akun media sosial masyarakat, review/komentar masyarakat, liputan media (media coverage), dan rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth)	27
820	2.16.000133	Diseminasi melalui shared media	Kegiatan	- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui shared media - Shared media adalah media tidak berbayar , termasuk media sosial populer seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dll	27
821	2.16.000134	Diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kegiatan	- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah - Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yaitu saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung dan dikelola oleh Pemerintah Daerah	27
822	2.16.000135	Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal	Orang	-Jumlah Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal - Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. - Khalayak yang terpapar melalui tatap muka dihitung berdasarkan dari jumlah orang yang mengikuti kegiatan tatap muka	5700
823	2.16.000136	Media cetak yang dikelola Pemda	Media	- Perhitungan Jumlah Media cetak yang dimiliki dan dikelola Pemda - Media cetak adalah suatu wadah tertulis yang dibuat dengan cara dicetak. Contoh dari jenis ini antara lain seperti surat kabar, majalah, koran, tabloid, dan lain sebagainya.	0
824	2.16.000138	Saluran TV yang dikelola pemda	Saluran	-Perhitungan Jumlah Saluran TV yang dikelola pemda	0
825	2.16.000140	Radio milik Pemerintah Daerah	Radio	Perhitungan jumlah Radio milik Pemerintah Daerah	0
826	2.16.000142	Media Online yang dikelola oleh Pemda	Media	Perhitungan jumlah Media Online yang dikelola oleh Pemda	2
827	2.16.000143	Akun media sosial yang dikelola oleh Pemda		Perhitungan jumlah akun media sosial di seluruh Perangkat Daerah Pemda	27
828	2.16.000144	Siaran pers yang dibuat	Siaran Pers	-Jumlah Siaran Pers yang dibuat - Siaran pers merupakan ulasan singkat rekaman yang ditujukan langsung pada media dengan tujuan untuk mengumumkan sesuatu yang memiliki nilai berita agar terpublikasi di media massa.	7

029	2.16.000145	Siaran pers yang dimuat di media.	Siaran Pers	Jumlah Siaran pers yang dimuat di media	0
030	2.16.000146	Komunitas Informasi Masyarakat	Komunitas	-Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang terdaftar di platform digital kim.id - KIM meliputi: a. komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pengelolaan dan diseminasi dan/atau b. komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pemberdayaan masyarakat serta melakukan pengelolaan dan diseminasi informasi.	0
031	2.16.000148	Permohonan Informasi Publik yang disesuaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	-Jumlah permohonan informasi publik yang disesuaikan sesuai peraturan perundangan -Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.	0
032	2.16.000149	Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	- Perhitungan Jumlah Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah - Informasi berkala adalah informasi yang diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali	59
033	2.16.000150	Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	- Perhitungan Jumlah Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah - Informasiserta merta adalah informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan.	0
034	2.16.000151	Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah .	Informasi	Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	7
035	2.16.000152	SDM Pemda yang memiliki latar belakang di bidang Komunikasi Publik	Orang	Jumlah SDM Pemda yang memiliki latar belakang Bidang komunikasi publik	0
036	2.16.000153	SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang Komunikasi Publik	Orang	Jumlah SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di Bidang komunikasi publik	0
037	2.16.000154	Laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah.	Laporan	-Jumlah Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika - Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi meliputi fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan b. penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa Informasi c. pelaksanaan tugas kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan dan d. penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan.	0

838	2.16.000155	Pengaturan relasi media	Perda/Perkada	- Perhitungan Pengaturan relasi media - Pengaturan relasi media mengacu pada UU Pers, aturan Dewan Pers -Ruang lingkup Perkada minimal mencakup pendaftaran media dan/atau jurnalis oleh Dinas/Kominfo berdasarkan kriteria, terverifikasi, terdaftar di Dewan Pers.	0
839	2.16.000158	Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Perangkat Daerah	-Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas -Sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas merupakan kegiatan literasi tentang pembangunan kota/kabupaten cerdas bagi seluruh aparatur negara (ASN),masyarakat, pelaku usaha yang berada pada wilatta kabupaten/kota	0
840	2.16.000160	Jumlah Media Massa yang Bekerja Sama dengan Pemerintah Daerah	Media	Media massa adalah suatu alat untuk melakukan atau menyebarkan informasi kepada komunikan yang luas, berjumlah banyak, dan beralat heterogen	15
841	2.16.000161	Jumlah Menara Telekomunikasi	Unit	Bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan, yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka tegi yang dibuat oleh lerbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain, dan konstruksinya direncanakan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi	Dialihkan Tidak Punya Wewenang Lagi Atas Menara Telekomunikasi
842	2.16.000162	Jumlah Sebaran Titik Koordinat Blankspot	Titik	- Lokasi Desa yang ditandai dengan sepasang angka atau koordinat, pengumpulan berbagi paksi data titik layanan publik/OPD/UPT/area publik (pusat kesehatan masyarakat, kantor pemerintahan, sekolah, rumah sakit, daerah wisata, sentra UMKM, pasar, pusat kuliner, taman kota) yang tidak memiliki akses dan - data titik wilayah blankspot 4G untuk desa-desa non 3T dan 3T	11

16. DSSD BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
043	2.17.000002	Dokumen hasil peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kelembangan	Dokumen	Tatakelola Koperasi adalah kerangka kerja (framework) dalam bentuk peran (role), aturan (rule) dan pola keterhubungan (relationship) dari organ-organ Koperasi beserta dengan turunannya dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Kelembagaan Koperasi adalah suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi Koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat bermitrakan satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan.	13
044	2.17.000003	Dokumen hasil peningkatan pemberian manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat	Dokumen	Tatakelola Koperasi adalah kerangka kerja (framework) dalam bentuk peran (role), aturan (rule) dan pola keterhubungan (relationship) dari organ-organ Koperasi beserta dengan turunannya dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Kelembagaan Koperasi adalah suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi Koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat bermitrakan satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan.	10
045	2.17.000014	Koperasi Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan Pinjam, baik konvensional maupun Syariah.	1
046	2.17.000015	Koperasi Yang akuntabilitas dan memberi manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat	Unit Usaha	Akuntabilitas Koperasi adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh seseorang atau sekelompok orang (organisasi) yang telah menerima amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.	337
047	2.17.000016	Koperasi Yang Diberikan penilaian jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi	Unit Usaha	Jati diri Koperasi meliputi pengertian, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi, seperti dikehendaki oleh anggota dan masyarakat koperasi yang mencerminkan ideologi koperasi.	1
048	2.17.000021	Koperasi Yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Unit Usaha	Penghargaan Kesehatan adalah wujud penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi. Bentuk penghargaan kesehatan diberikan dalam bentuk sertifikat kesehatan kepada Koperasi dengan tingkat kesehatan sehat atau cukup sehat sebagaimana dimaksud dalam Permenkop Nomor 9 Tahun 2020	3
049	2.17.000022	Koperasi yang telah dilakukan Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Koperasi sehat adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus.	1

050	2.17.000023	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi	Unit Usaha	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang memblidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang- undangan.	1
051	2.17.000024	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang memblidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang- undangan.	1
052	2.17.000025	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	337
053	2.17.000026	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	337
054	2.17.000027	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kemandirian Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Kemandirian Koperasi adalah suatu koperasi harus berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang dilasarkan atas kepercayaan kepada pertumbuhan, kepuasan, kerampilan, dan usaha sendiri. Pengawasan atas kemandirian koperasi adalah satu satu faktor kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Koperasi.	337
055	2.17.000032	Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Restrukturisasi usaha Koperasi adalah upaya merata kembali untuk laurin. Aset dan portofolio asset., struktur keuangan, serta manajemen dan struktur organisasi agar memiliki daya saing dan lebih sehat sehingga dapat meningkatkan kinerja bisnis Koperasi.	3
056	2.17.000033	SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Orang	Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.	15
057	2.17.000034	SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.	8

858	2.17.000035	Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengawasan, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil	5
859	2.17.000036	Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan SDM	Unit Usaha	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil	3
860	2.17.000037	Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Desain dan Teknologi	Unit Usaha	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil	1
861	2.17.000038	Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan	Unit Usaha	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil	103
862	2.17.000039	Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan Pengolahan	Unit Usaha	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.	103
863	2.17.000040	Unit Usaha Yang memiliki akses pengisian kelembagaan	Unit Usaha	Pengisian Kelembagaan adalah upaya adiluh organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem, maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan.	50

864	2.17.000047	Unit Usaha Yang memiliki akses pasar	Unit Usaha	Akses pasar adalah kemampuan perusahaan/UMKM untuk memasuki pasar luar negeri dengan menjual barang dan jasanya di negara lain.	20
865	2.17.000048	Unit Usaha Yang memiliki Penguatan Kelembagaan, Perutaan Manajemen, Standarisasi	Unit Usaha	Penguatan Kelembagaan adalah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem, maupun individual dalam mempertahankan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Standardisasi adalah proses merumuskan dan mengimplementasikan suatu teknis berdasarkan kesepakatan berbagai pihak, terutama dalam bidang teknologi dan industri. Pendidikan dapat membantu memaksimalkan kecocokan, kesempurnaan, keamanan, keterikatan, atau mutu.	50
866	2.17.000049	Unit Usaha Yang memiliki restrukturisasi usaha	Unit Usaha	Restrukturisasi usaha adalah upaya untuk kembali sehat. Aset dan portofolio aset, struktur keuangan, serta manajemen dan struktur organisasi agar memiliki daya saing dan lebih sehat sehingga dapat meningkatkan kinerja bisnis Koperasi.	50
867	2.17.000051	Unit Usaha Yang produktif	Unit Usaha	Produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu.	100
868	2.17.000052	Unit Usaha Yang produktif bernilai Tambah	Unit Usaha	Produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Nilai tambah adalah suatu komoditas yang bertambah nilainya karena melalui proses pengolahan, pengangkutan, ataupun penyimpanan dalam suatu produksi.	65
869	2.17.000053	Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro dengan usaha besar.	15
870	2.17.000054	Unit Usaha Yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	Pembinaan dan Pendampingan Usaha mikro adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan, latihan, perluasan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Mikro agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.	300
871	2.17.000055	Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Perizinan adalah merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.	400

872	2.17.00005b	Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Usaha Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman yang terutama anggotanya. Koperasi badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.	32

17. DSSD BIDANG PENANAMAN MODAL

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
873	2.18.000004	Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dokumen	A. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko A.	2548
874	2.18.000005	Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dokumen	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak diberlakukan lagi penggunaan kalimat Non Perizinan	1
875	2.18.000006	Informasi Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dokumen	A. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko A.	1
876	2.18.000010	Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan;	Orang	Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Pelayanan Terpadu Perizinan adalah sistem pelayanan perizinan (izin dan non izin) yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen perizinan dengan transparan dan terpadu pada satu tempat.	2
877	2.18.000013	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Perizinan berbasis Sistem secara Elektronik;	Orang	Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Perizinan berbasis sistem secara elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.	1912
878	2.18.000014	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik.	Orang	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak diberlakukan lagi penggunaan kalimat Non Perizinan	636
879	2.18.000016	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Perizinan berbasis Elektronik;	Orang	Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Pelayanan terpadu perizinan berbasis elektronik adalah Perizinan berbasis sistem secara elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.	1817

880	2.18.000017	Pelaku usaha yang menggunakan Perizinan berbasis Sistem Elektronik	Orang	Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Perizinan berbasis sistem elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.	1617
881	2.18.000022	Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian kemudahan berusaha Penanaman modal di daerah	Dokumen	Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah.	1
882	2.18.000032	Unit Usaha yang dilakukan pengawasan	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya.	39
883	2.18.000037	Unit Usaha yang memperoleh kemudahan berUsaha di daerah	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Kemudahan Berusaha adalah penyediaan fasilitas manfaatkal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan /atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.	1321
884	2.18.000038	Unit usaha yang terpenuhi Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal	Unit Usaha	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak diberlakukan lagi penggunaan kalimat Non Perizinan	636
885	2.18.000040	Unit Usaha yang terpenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal;	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Perizinan adalah merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.	13

18. DSSD BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
886	2.19.000067	Pemuda wirausaha muda pemula	Orang	wirausahawan berusia muda (16 sampai 30 tahun) yang sedang merintis usahanya	12
887	2.19.000068	Organisasi Kepemudaan	Organisasi	Organisasi kepemudaan yang terdaftar dan aktif untuk terfasilitasi dalam Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan	22
888	2.19.000073	atlet/olahragawan talenta muda	Orang	Tersedianya atlet/olahragawan usia 12-18 tahun yang dibina melalui PPLP/PPLPD/SKO/untuk cabor pengurus/pengkot/kab dan klub olahraga dan usia 8-18 tahun pada PPLM/PPLD, untuk cabor, dan klub olahraga	3
889	2.19.000076	kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar satuan pendidikan tingkat menengah	Kegiatan	Terlaksananya kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar di daerah pada satuan pendidikan tingkat dasar (Pekan Olahraga Kab/Kota) dan tingkat menengah (Pekan Olahraga Pelajar Daerah)	2
890	2.19.000078	kompetisi/kejuaraan single event		Terlaksananya kompetisi/kejuaraan olahraga (Kejurkot/kejuaraan antar klub/kejurda) pada cabang olahraga tertentu di daerah	1
891	2.19.000081	pelatih olahraga yang bersertifikat	Orang	Tersedianya pelatih olahraga yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikat pelatih di tingkat Provinsi/Kab/Kota	25
892	2.19.000082	Organisasi Olahraga	Lembaga	Tersedianya pelatih olahraga yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikat pelatih di tingkat Provinsi/Kab/Kota	12
893	2.19.000083	wasit	Orang	Tersedianya wasit/juri yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikasi di tingkat Provinsi/Kab/Kota	43
894	2.19.000084	Sentra pembinaan Olahraga	Lembaga	Tersedianya SKO, PPLP, PPLPD, PPLD di Provinsi/Kab/Kota	0
895	2.19.000085	Sarana Olahraga	Unit	Tersedianya Sarana pada cabang olahraga unggulan di Provinsi/Kabupaten/Kota	36
896	2.19.000086	Prasarana Olahraga	Unit	Tersedianya Prasarana pada cabang olahraga unggulan di Provinsi/Kabupaten/Kota	28
897	2.19.000089	organisasi kepramukaan	Organisasi	Tersedianya data satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis, antara lain profesi, sekolah, dan agama yang terbentuk di daerah	9
898	2.19.000090	tenaga pendidik pramuka	Orang	Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa, terdiri atas: a. b. c. dan d. instruktur. Yang telah diberikan sertifikasi kompetensi oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan	23
899	2.19.000091	kegiatan pramuka	Orang	Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan ketaqwaan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan kebahagiaan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif yang realisasikan peserta didik kepramukaan	9

19. DSSD BIDANG STATISTIK

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
900	2.20.000019	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	Metadata Statistik Sektoral adalah Jumlah metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator yang disampaikan kepada Pembina Data Statistik. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data.	6
901	2.20.000020	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi standar data		Jumlah Statistik Sektoral yang dilengkapi standar data yang sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Standar Data	6
902	2.20.000021	Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi		Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi adalah jumlah indikator statistik statistik sektoral yang menggunakan kode referensi yang sudah diterapkan. Kode referensi adalah kode yang dibahas dan disepakati dalam forum satu data indonesia tingkat pusat.	6
903	2.20.000022	Jumlah Statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil	Dokumen	Analisis kebutuhan data adalah proses identifikasi output statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data dan kemungkinan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang dibutuhkan. Konfirmasi hasil adalah proses konfirmasi output statistik yang telah dihasilkan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan penggunaan data.	9
904	2.20.000023	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Presentase	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu dibagi dengan kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh produsen data. Jumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dimasukkan kedalam penghitungan adalah kegiatan statistik sektoral yang dihasilkan oleh produsen data pada tahun tersebut. Survei Kebutuhan Data Statistik Sektoral adalah Survei yang digunakan untuk identifikasi kebutuhan data statistik sektoral kepada pengguna data.	80%
905	2.20.000024	Jumlah Statistik Sektoral yang telah menerima rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang telah diterbitkan rekomendasi kegiatannya kepada Pembina Data Statistik.	6
906	2.20.000025	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik adalah jumlah pegawai di OPD yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang statistik baik oleh pembina data statistik maupun dari pihak lain.	2

907	2.20.000026	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data	Orang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data adalah jumlah pegawai di OPD yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data baik oleh pembina data statistik maupun dari pihak lain.	2
908	2.20.000028	Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase	Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan adalah Jumlah OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan dibanding dengan total seluruh OPD.	100%
909	2.20.000030	Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data	Laporan	Jumlah Laporan pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data adalah jumlah pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh walidata kepada produsen data.	6
910	2.20.000031	Jumlah sosialisasi hasil statistik sektoral dalam rangka peningkatan literasi pengguna data	Laporan	Jumlah Laporan sosialisasi yang dilakukan oleh produsen data atau walidata untuk meningkatkan literasi/pemahaman data statistik pengguna data	1
911	2.20.000050	Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah	Kegiatan	Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/OPD.	274
912	2.20.000051	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi dan/atau data induk	Kegiatan	Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/OPD yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi	6
913	2.20.000052	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Persentase	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi 4 prinsip SDI dibagi dengan jumlah kegiatan statistik sektoral di pemerintah daerah dikalikan 100 persen.	20%
914	2.20.000053	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data perada	Kegiatan	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data perada adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya (data/indikator) dari kegiatan statistik tersebut) dapat diakses/tersedia di portal data perada	0
915	2.20.000054	Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data perada	Persentase	Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data perada adalah persentase pengguna data pengakses portal data perada yang merasa puas dibandingkan dengan jumlah total pengguna data yang mengakses portal data perada	0

916	2.20.000055	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	Persentase	Persentase kegatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data perada dibagi dengan total jumlah kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh Pemda/OPD dikalikan 100 persen	0
917	2.20.000056	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan	Kegiatan	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah dilengkapi dengan dokumen perencanaan kegiatan statistik yang berisikan rancangan setiap tahapan penyelenggaraan statistik, diantaranya mencakup spesifikasi kebutuhan data, rancangan metodologi, instrumen, pengumpulan data, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi	274
918	2.20.000057	Persentase kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral	Persentase	Persentase kegatan statistik yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral adalah jumlah kegatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan dibagi dengan jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan pemerintah daerah dikali 100 persen.	20%
919	2.20.000058	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Persentase	Persentase kegatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS dibagi dengan jumlah seluruh kegatan statistik sektoral yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dikalikan 100 persen	20%
920	2.20.000059	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Kegiatan	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi rutin dari BPS	6
921	2.20.000060	Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah	Kegiatan	Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah adalah jumlah penyelenggaraan sudah komunikasi dan koordinasi internal Pemerintah Daerah dan/atau Internal Pemerintah Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan dalam 1 tahun	1

20. DSSD BIDANG PERSANDIAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
922	2.21.000001	Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	0
923	2.21.000002	Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	0
924	2.21.000007	Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	0
925	2.21.000008	Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	0
926	2.21.000009	Laporan Analisis Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah laporan penyelarasan informasi kebutuhan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0
927	2.21.000010	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan kegiatan identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan dan pemulihan.	0
928	2.21.000011	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Non Elektronik	Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis non elektronik dengan tahapan pengolahan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi non elektronik	0
929	2.21.000012	Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah laporan pengelolaan sumber daya keamanan informasi yang mencakup pada pengelolaan aset TIK, sumber daya manusia dan manajemen pengetahuan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0

21. DSSD BIDANG KEBUDAYAAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
930	2.22.000008	Cagar Budaya yang dipublikasikan	Unit	a. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan a.	37
931	2.22.000106	objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang diketahi	Objek	- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	37
932	2.22.000114	Objek Cagar Budaya yang dilindungi	Objek	- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	37
933	2.22.000115	Objek Cagar Budaya yang dimanfaatkan	Objek	- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	37
934	2.22.000117	Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	Objek	- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	19

935	2.22.000116	Objek Cagar Budaya yang mendapatkan perijinan Ke Luar Daerah Provinsi	Objek	- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	15
936	2.22.000119	Objek Dirinya Cagar Budaya yang ditaftarkan	Objek	- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	15
937	2.22.000125	Objek Perijinan Kebudayaan yang dilakukan Pengembangan	Objek	- Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. - Pengembangan pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan kemanfaatnya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	1
938	2.22.000178	Sarana dan Prasarana Budaya	Unit	- Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. - Prasarana : Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses	165
939	2.22.000180	Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Unit	- Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. - Prasarana : Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses	1
940	2.22.000182	Sarana dan Prasarana Museum yang direvitalisasi	Unit	- Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. - Prasarana : Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. - Museum : Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. - Revitalisasi : Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya	3

22. DSSD BIDANG PERPUSTAKAAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
941	2.23.000095	Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi	1
942	2.23.000096	Jumlah Perpustakaan yang terotomasi	Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang menggunakan sistem informasi perpustakaan terintegrasi (Inlislite, Slims, atau sejenisnya)	1
943	2.23.000097	Perpustakaan yang memiliki repositori digital kewenangan kabupaten/kota	Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang memiliki sarana penyimpanan dan pelayanan bahan pustaka digital. (Cth: EPrints, DSpace, OJS, aplikasi mobile perpustakaan dan sejenisnya)	1
944	2.23.000098	Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan tertentu, rumah ibadah, atau organisasi lain	3
945	2.23.000099	Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah Dasar sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan.	60
946	2.23.000100	Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah Menengah Pertama sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan.	18
947	2.23.000102	Perpustakaan Kelurahan/Desa	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/ kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender	37
948	2.23.000103	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah pemustaka /masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan umum yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota	6,267
949	2.23.000104	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah pemustaka (karyawan/pegawai) yang berkunjung ke perpustakaan khusus yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota	3,763
950	2.23.000105	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan satuan pendidikan Dasar kewenangan Kabupaten/kota	Orang	Jumlah pemustaka (civitas sekolah) yang berkunjung ke perpustakaan satuan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota	13,086

951	2.23.000106	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota	Orang	Jumlah pemustaka (siswa) sekolah yang berkunjung ke perpustakaan satuan pendidikan menengah pertama yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota	21,373
952	2.23.000107	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Desa/Kelurahan	Orang	Jumlah pemustaka/masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan Desa/Kelurahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota.	3,263
953	2.23.000109	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota	Judul	Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di perpustakaan umum yang berada di wilayah kabupaten/kota	7,560
954	2.23.000110	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota	Judul	Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di perpustakaan khusus yang berada di wilayah kabupaten/kota	2,088
955	2.23.000111	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota	Judul	Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan sekolah dasar/sederajat yang berada di wilayah kabupaten/kota	26,237
956	2.23.000112	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota	Judul	Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan sekolah menengah pertama/sederajat yang berada di wilayah kabupaten/kota	4,758
957	2.23.000114	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Desa/Kelurahan	Judul	Jumlah Semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di Perpustakaan Desa/Kelurahan yang berada di wilayah kabupaten/kota	10,117
958	2.23.000119	Jumlah provinsi gemar membaca tingkat Kabupaten/kota	Kegiatan	Kegemaran membaca adalah kebiasaan atau perilaku yang disadari sesorang untuk mengetahui atau menambah informasi melalui membaca Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah kegiatan provinsi kegemaran membaca di wilayah Kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Kab/Kota	3
959	2.23.000120	Tenaga Teknis Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Umum di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan)	9

960	2.23.000121	Tenaga Teknis Perpustakaan khusus (umum) Kabupaten/kota	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga perpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Khusus di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan)	3
961	2.23.000122	Tenaga Teknis Perpustakaan Sekolah Dasar (umum Kabupaten/Kota	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga perpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Sekolah Dasar di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan)	80
962	2.23.000123	Tenaga Teknis Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (umum Kabupaten/kota	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga perpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan)	20
963	2.23.000125	Tenaga Teknis Perpustakaan desa/Kelurahan (umum Kabupaten/kota	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga perpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Desa/Kelurahan di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan)	9
964	2.23.000126	Pustakawan pada Perpustakaan umum (umum Kabupaten/kota	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Umum di wilayah Kabupaten/Kota	4
965	2.23.000127	Pustakawan pada Perpustakaan khusus (umum Kabupaten/kota	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan khusus di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Khusus di wilayah Kabupaten/Kota	3
966	2.23.000128	Pustakawan pada Perpustakaan Sekolah Dasar (umum Kabupaten/Kota	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan satuan pendidikan menengah di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Sekolah Dasar/sederajat di wilayah Kabupaten/Kota	119

967	2.23.000129	Pustakawan pada Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama binaan Kabupaten/kota	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan satuan pendidikan khusus di wilayah provinsi /Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/sederajat di wilayah Kabupaten/Kota	20
968	2.23.000131	Pustakawan pada Perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan satuan pendidikan khusus di wilayah provinsi /Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten/Kota	9
969	2.23.000132	Anggota perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan umum yang berada di wilayah Kabupaten/Kota	6,267
970	2.23.000133	Anggota perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan khusus yang berada di wilayah Kabupaten/Kota	910
971	2.23.000134	Anggota perpustakaan sekolah dasar binaan Kabupaten/kota	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan satuan Sekolah dasar (SD) /Sederajat yang berada di wilayah Kabupaten/Kota	13,900
972	2.23.000135	Anggota perpustakaan sekolah menengah pertama binaan Kabupaten/kota	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan Sekolah Menegah Pertama (SMP) / Sederajat yang berada di wilayah Kabupaten/Kota	2,930
973	2.23.000137	Anggota perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan desa/kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten/Kota	3,620
974	2.23.000138	Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/kota	Orang	Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/Kota	2,603
975	2.23.000139	Penggiat literasi binaan kabupaten/kota	Orang	Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan Literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan influencer dalam upaya mempromosikan gemar membaca. Duta Baca merupakan sosok inspiratif untuk menjadi motivator dalam membangkitkan kegemaran membaca dan menggalangkan pembudayaan kegemaran membaca melalui berbagai media. Bunda Baca adalah gelar yang diberikan Perpustakaan Nasional untuk sosok di tiap daerah yang menjadi panutan dalam mempelopori serta menumbuhkan minat baca Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah orang yang menjadi pegiat literasi diwilayah Kab/Kota	2
976	2.23.000140	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Orang	Masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan dan terlibat dalam kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial	450

977	2.23.000141	Jumlah Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial	Orang	Perpustakaan hadir sebagai penyedia layanan yang memfasilitasi akses masyarakat pada pengetahuan dan menjadi sarana reproduksi pengetahuan ke dalam alur nyata yang menyejahterakan perpustakaan yang melaksanakan kegiatan yang mendukung program layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan oleh Perpustakaan	10

23. DSSD BIDANG KEARSIPAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
978	2.24.000001	Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	Akuisisi Arsip Statis meliputi verifikasi, melakukan penilaian arsip sesuai dengan JRA. Pengolahan Arsip Statis meliputi pembuatan sarana bantu penemuan berbasis arsip statis yang terdiri dari daftar arsip, inventaris arsip dan guide arsip. Preservasi yang dimaksud meliputi : - Restorasi. Penyimpanan -Reproduksi/Digitalisasi Pengajuan Arsip Akses Arsip Statis meliputi keterbukaan arsip statis, Aksesibilitas arsip dan pelayanan arsip statis kepada publik.	231
979	2.24.000005	Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Penmusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	Penilaian Arsip adalah proses menentukan nilai arsip dilihat dari aspek fungsi dan substansi informasinya serta karakteristik fisik/nilai instrinsiknya yang dilakukan melalui langkah-langkah telah pengaturan secara sistematis dalam unit-unit informasi. Pengaturan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun dilakukan dengan menghitung Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun.	1.176
980	2.24.000006	Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas	Pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh pimpinan OKPD atau penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi setelah mendapat: 1) Pertimbangan tertulis dari panitia penilai 2) Persetujuan tertulis dari gubernur. Pelaksanaan pemusnahan arsip tersebut menjadi tanggungjawab Unit Kearsipan di satuan kerja perangkat daerah atau penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi. Pengukuran Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun dilakukan dengan menghitung Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan.	1.176
981	2.24.000029	Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	Kegiatan meliputi : Pembuatan naskah dinas, pengendalian naskah dinas dan penyajian arsip dinamis	71
982	2.24.000031	Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	Kegiatan meliputi : Pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, pengelolaan arsipvital, terjaga,alih media, penyusutan arsip (pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip statis)	200
983	2.24.000032	Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Arsip	kegiatan meliputi : identifikasi, pendataan, pelaporan arsip terjaga dan penyerahan salinan otentik arsip terjaga ke ANRI	0
984	2.24.000034	SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Dimusnahkan dan ditetapkan	SOP	Aturan yang digunakan dalam penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang dimusnahkan dan ditetapkan	0

9815	2.24.000035	Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Pemusnahan Arsip bagi Pemilahan Perangkat Daerah Provinsi,Kabupaten/Kota	Arsip	Penyelamatan Arsip Pemilahan Perangkat Daerah dilaksanakan dengan pembentukan Tim Penyelamatan Arsip pada perangkat daerah. Kegiatan meliputi : - penataan dan pendaftaran arsip - verifikasi/penilaian arsip -penyerahan dan pemusnahan arsip	0
9816	2.24.000036	Data Base Arsiparis	Orang	Data berupa jumlah arsiparis dan SDM yang ada dimasing-masing OPD, Jumlah diklat dan Bimtek yang diikuti.	0

24. DSSD BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
987	3.25.000006	Benih ikan	Paket	Benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa.	4
988	3.25.000007	dan jenis alat tangkap perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam 1 kab/kota	Unit	Jumlah dan jenis alat tangkap perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam 1 kab/kota	8
989	3.25.000023	Data prasarana dan sarana perikanan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Penyediaan data dan informasi prasarana dan sarana perikanan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1
990	3.25.000027	Data prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam 1 kab/kota	Dokumen	Penyediaan data dan informasi Data prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam 1 kab/kota	1
991	3.25.000032	Data sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Penyediaan data dan informasi sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1
992	3.25.000036	Data sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam 1 kab/kota	Dokumen	Penyediaan data dan informasi sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam 1 kab/kota	1
993	3.25.000046	Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	Dokumen	Penyediaan data dan informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	1
994	3.25.000047	Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	Dokumen	penyediaan data dan informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	1
995	3.25.000051	Data volume dan nilai pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	Penyediaan Data volume dan nilai pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	1
996	3.25.000058	Data volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam 1 kab/kota	Dokumen	Penyediaan data dan informasi volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam 1 kab/kota	1
997	3.25.000063	hasil tangkapan yang di daratkan	Ton	Jumlah hasil tangkapan yang di daratkan	168,75
998	3.25.000065	ikan yang tersedia untuk konsumsi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Ton	Data dan Informasi ikan yang tersedia untuk konsumsi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	8240
999	3.25.000066	ikan yang tersedia untuk usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Ton	Data dan informasi ikan yang tersedia untuk usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota.	15,9
1000	3.25.000072	Informasi prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam 1 kab/kota	Dokumen	Data dan Informasi prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam 1 kab/kota	1

1001	3.25.000076	Informasi sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam 1 kab/kota	Dokumen	Data dan Informasi sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam 1 kab/kota	1
1002	3.25.000082	Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	Dokumen	Data dan Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	1
1003	3.25.000085	Informasi volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam 1 kab/kota	Dokumen	Data dan Informasi volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam 1 kab/kota	1
1004	3.25.000093	Jumlah alat pengangkut hasil produksi pemanfaatanan ikan	Unit	Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/ atau mengawetkan ikan.	4
1005	3.25.000098	kapal perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam 1 kab/kota	Unit	Jumlah kapal perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam 1 kab/kota	24
1006	3.25.000115	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses informasi	Kelompok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses informasi.	17
1007	3.25.000116	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses IPTEK	Kelompok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses IPTEK berupa diseminasi teknologi terapan untuk peningkatan produktivitas usaha	17
1008	3.25.000117	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Kelompok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan.	17
1009	3.25.000118	Kelompok pembudidaya ikan kecil yang terfasilitasi kemitraan usahanya	Kelompok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang terfasilitasi kemitraan usahanya di bidang pemasaran, pengolahan dan kerjasama operasional untuk pengembangan kapasitas usaha.	17
1010	3.25.000127	Luas lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi	Ha	Luas lahan yang telah direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk pembudidayaan ikan di darat.	233.3
1011	3.25.000133	nelayan kecil	Orang	Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan.	187
1012	3.25.000134	Obat Ikan	Unit	Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati ikan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh Ikan.	5

1013	3.25.000136	Pakan Ikan	Unit	Pakan ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, perndilkan, dan berkembang biak baik berupa Pakan Ikan Alami atau Pakan Ikan Buatan	2100
1014	3.25.000139	Panjang saluran air	Meter	Saluran untuk Pembudidayaan Ikan dibuat untuk menyediakan Air yang memenuhi kuantitas dan kualitas Air sesuai dengan standar dan mengalirkan Air limbah dari wadah Pembudidayaan Ikan.	500
1015	3.25.000147	pelaku usaha pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	3
1016	3.25.000148	pelaku usaha perikanan skala kecil yang difasilitasi	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha perikanan skala kecil yang difasilitasi	17
1017	3.25.000154	pembudidaya yang memperoleh pendampingan dan penerapan pembudidayaan ikan di darat	Orang	pembudidaya ikan yang menerapkan usaha budidaya sesuai dengan standar CBIB dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) agar mereka meningkatkan kemauan pangan bagi konsumen	3
1018	3.25.000207	pupuk ikan	Paket	Pupuk yang digunakan dalam Pembudidayaan Ikan dapat berupa dan n harus memenuhi standar persyaratan keamanan pangan dan lingkungan : a. pupuk dan/atau b. pupuk anorganik.	3
1019	3.25.000245	unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai risiko	Unit Usaha	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai risiko	2
1020	3.25.000246	unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha	Unit Usaha	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha	2
1021	3.25.000255	wadah pembudidayaan ikan	Unit	wadah budidaya merupakan tempat atau sarana untuk memelihara dan mengembangkan suatu komoditas perairan seperti ikan, rumput laut, dan lainnya untuk di budidaya	12
1022	3.25.000424	pelaku usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	Data pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diawasi pengawas perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Sesuai dengan Kewenangannya	125
1023	3.25.000427	Pelaku Usaha Pengolahan dan/atau Pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha Pengolahan dan/atau Pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota yang diawasi	3
1024	3.25.004132	Jumlah Alat Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Unit	Jumlah Alat Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	162

23. DSSD BIDANG PARIWISATA

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
1025	3.26.000003	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Revitalisasi)	Lokasi	Melaksanakan Revitalisasi Destinasi Pariwisata Prioritas Kabupaten/Kota agar tercapai destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan dalam RIPPARDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kabupaten/Kota dengan pola evaluatif, peningkatan fungsi dan pengendalian ekosistem	2
1026	3.26.000005	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Lokasi	Menetapkan destinasi pariwisata yang tercantum dalam RIPPARKAB/KOTA melalui SK penetapan oleh Kepala Daerah (Bupati/Walikota)	26
1027	3.26.000017	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota untuk memperoleh data dan informasi tentang pertumbuhan sektor pariwisata Kab/Kota	1
1028	3.26.000026	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri	Dokumen	melakukan pendataan secara real time pada setiap destinasi lokal untuk wisatawan dalam negeri	1
1029	3.26.000046	Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	Melaksakan asesmen dan penilaian terhadap dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota sesuai dengan mengacu pada Pedoman Menparekraf/Baparekraf Nomor PM.3/HK.00.03/MK/2023 tentang Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata	1
1030	3.26.000054	Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kawasan	Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif. Infrastruktur Ekonomi Kreatif selanjutnya dimaksud terdiri atas: a. infrastruktur fisik dan b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur fisik adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pamer, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan toilet. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyirimkan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokasi pusat (Spot), dan pusat data	3
1031	3.26.000144	Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota	Lokasi	Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang tercantum/masuk dalam RIPPARKAB/KOTA	10

1032	3.26.000145	Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota	Lokasi	Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang ditentukan/masuk dalam RIPPARNAS/PROV/KAB/KOTA	10
1033	3.26.000171	Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Lokasi	Mengidentifikasi daya tarik wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam/budaya/buatan di lingkup Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Daya Tarik Wisata Unggulan melalui SK Kepala Daerah	20
1034	3.26.000174	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Destinasi	&Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan/atau tanggub bersama di (destinasi pariwisata Kabupaten/Kota, melalui: 1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 2. jumlah destinasi wisata yang telah melaksanakan assessment mandiri prinsip pariwisata berkelanjutan (kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021) dan destinasi tanggub bersama (Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 3. jumlah destinasi pariwisata yang disertifikasi berkelanjutan (semua kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021). 4. jumlah destinasi pariwisata yang melakukan monitoring dan evaluasi penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan.&	3
1035	3.26.000175	Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Kawasan	&Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan/atau tanggub bersama di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, melalui: 1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 2. jumlah destinasi wisata yang telah melakukan assessment mandiri prinsip pariwisata berkelanjutan (kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021) dan destinasi tanggub bersama (Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 3. jumlah destinasi pariwisata yang disertifikasi berkelanjutan (semua kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021). 4. jumlah destinasi pariwisata yang melakukan monitoring dan evaluasi penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan.&	3
1036	3.26.000181	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Perda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata	Unit	mengidentifikasi alokasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset Perda Provinsi di Destinasi Pariwisata	2
1037	3.26.000182	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Perda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata	Unit	mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Perda Provinsi di Destinasi Pariwisata	2

1038	3.26.000189	Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dokumen	Melaksanakan asesmen dan penilaian terhadap dokumen Perencanaan dan perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menparekraf/Kepmenparekraf Nomor PDM/3/DI.00.03/MK/2023 tentang Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata	1
1039	3.26.000203	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Provinsi yang terpelihara	Unit	Mengidentifikasi alokasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata Provinsi	2
1040	3.26.000203	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Unit	Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Kab/Kota	2
1041	3.26.000202	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategi Pariwisata Kab/Kota	2
1042	3.26.000277	Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota	1

26. DSSD BIDANG PERTANIAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
1043	3.27.000132	pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Laporan	Banyaknya kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi peredaran hewan dan produk hewan yang baik	1
1044	3.27.000238	Jumlah analisis Risiko media pembawa penyakit hewan lainnya	Laporan	Jumlah Pemindaian terhadap Potensi Wabah Penyakit Hewan yang berkaitan dengan lalulintas hewan dan produk hewan	1
1045	3.27.000239	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan	Laporan	Jumlah Pemindaian terhadap Potensi Wabah Penyakit Hewan yang berkaitan dengan lalulintas hewan dan produk hewan	1
1046	3.27.000240	Jumlah analisis Risiko Penyakit zoonosis	Laporan	Jumlah Pemindaian terhadap Potensi penyebaran Penyakit Hewan yang berkaitan dengan lalulintas hewan dan produk hewan di lapangan	1
1047	3.27.000241	Jumlah analisis Risiko produk hewan	Laporan	jumlah kasus pencegahan zoonosis dan tersebarnya penyakit hewan menular prioritas.	1
1048	3.27.000242	Jumlah analisis Risiko zoonosis	Laporan	jumlah kegiatan analisa risiko kejadian zoonosis di suatu wilayah	1
1049	3.27.000243	Jumlah Bahan Pakan/Pakan yang beredar	Ton	Banyaknya bahan pakan dan pakan ternak yang beredar	200
1050	3.27.000244	Jumlah bahan pakan/pakan/tanaman obat/ spill	Ton	Jenis dan banyaknya bahan pakan, pakan dan pakan yang digunakan oleh peternak	10
1051	3.27.000270	Jumlah Benih Ternak yang beredar	Dosis	Jumlah Benih Ternak yang beredar	250
1052	3.27.000271	Jumlah benih ternak bermutu	Dosis	Benih ternak bermutu yang telah dilepas dan dimanfaatkan	150
1053	3.27.000272	Jumlah benih ternak yang bersertifikat	Dosis	Banyaknya benih ternak yang telah disertifikasi	150
1054	3.27.000273	Jumlah Benih Ternak yang dihasilkan	Dosis	Benih Ternak bermutu sesuai standar dan syarat tertentu yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu	150
1055	3.27.000274	Jumlah Benih Ternak yang tersedia	Dosis	Banyaknya benih ternak yang tersedia	200
1056	3.27.000275	Jumlah Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang beredar	Ton	Jenis dan banyaknya benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar	5
1057	3.27.000277	Jumlah benih/bibit ternak yang tersedia	Ekor	Ketersediaan Benih/Bibit Ternak bermutu dalam suatu Wilayah tertentu dan secara kontinyu	150
1058	3.27.000278	Jumlah Bibit Ternak yang beredar	Ekor	Jumlah Bibit Ternak yang beredar dari species/rumpun tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	200
1059	3.27.000279	Jumlah bibit ternak yang bermutu	Ekor	Bibit ternak bermutu yang telah dilepas dan dimanfaatkan	60
1060	3.27.000281	Jumlah Bibit Ternak yang dihasilkan	Ekor	Bibit Ternak bermutu sesuai standar dan syarat tertentu yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu	250
1061	3.27.000287	Jumlah daerah terdampak wabah yang terbentuk	Wilayah	Terbentuknya jumlah daerah yang terdampak dari penyakit hewan menular strategis	4
1062	3.27.000307	Jumlah Eksisting Penyuluh Pertanian ASN	Orang	Jumlah penyuluh pertanian ASN yang terpenuhi sesuai kebutuhan daerah	140
1063	3.27.000309	Jumlah Eksisting Pos Pemeriksaan Hewan	Unit	Unit Pelayanan Pemeriksaan Hewan yang tersedia yang berguna dalam pengawasan, peredaran ternak dan pengendalian penyebaran penyakit hewan menular	1
1064	3.27.000311	Jumlah Eksisting Prasarana Perkebunan Lainnya	Unit	Banyaknya prasarana perkebunan lainnya yang berfungsi baik	1
1065	3.27.000337	Jumlah hewan yang berhasil diimunisasi	Ekor	Banyaknya hewan yang berhasil diimunisasi dari penyakit hewan	200

1066	3.27.000328	Jumlah Hijauan Pakan Ternak (HPT), Bahan Pakan dan Pakan yang beredar	Tun	Hijauan Pakan Ternak, Bahan Pakan dan Pakan yang beredar dan/ spesies/rumpun tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	5
1067	3.27.000342	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang tersedia	Ton	Banyaknya hijauan pakan ternak yang tersedia	10
1068	3.27.000345	Jumlah HPT yang beredar	Ton	Banyaknya hijauan pakan ternak yang beredar	5
1069	3.27.000362	Jumlah kader zoonosis	Orang	Ketersediaan sumber daya manusia yang berperan dalam pencegahan zoonosis melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	6

1070	3.27.000362	Jumlah kasus Gangguan Usaha Perkebunan	Kasus	Jumlah penanganan kasus Gangguan Usaha Perkebunan (misalnya:konflik usaha perkebunan, perizinan usaha)	1
1071	3.27.000368	Jumlah kasus zoonosis pada manusia	Kasus	Jumlah kasus penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia	5
1072	3.27.000369	Jumlah Kebutuhan Benih	Ton	Jumlah benih yang dibutuhkan per hektar sesuai luasan yang tersedia	304 Ton Benih Padi/h
1073	3.27.000372	Jumlah Kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	Unit	Jumlah sarana pascapanen tanaman pangan yang dibutuhkan oleh suatu daerah serta sebarannya	10 Unit
1074	3.27.000376	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Laporan	Kegiatan pengawasan peredaran produk hewan yang dilaksanakan pada tempat / lalu lintas strategis	1
1075	3.27.000377	Jumlah kejadian penyakit hewan dan Zoonosis pada Hewan yang diwabahkan	Kasus	Kasus penyakit hewan yang terjadi dan terlaporkan serta ditindaklanjuti untuk dilakukan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis dan dalam keadaan tertangani	1
1076	3.27.000378	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kasus	Kasus penyakit hewan yang terjadi dan ditindaklanjuti untuk dilakukan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	1
1077	3.27.000385	Jumlah Ketersediaan Alsintan	Unit	Jumlah alat dan mesin pertanian pra panen yang tersedia baik dalam kondisi baik maupun perlu perbaikan atau rusak yang ada di kelompok masyarakat/masyarakat petani di tingkat provinsi	171
1078	3.27.000399	Jumlah ketersediaan pupuk	Ton	Jumlah ketersediaan pupuk di masyarakat secara keseluruhan, baik itu pupuk subsidi maupun pupuk non subsidi	8801
1079	3.27.000415	Jumlah Laporan kejadian penyakit hewan dan zoonosis pada Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional	Kasus	Kasus penyakit hewan yang terjadi dan terlaporkan serta ditindaklanjuti untuk dilakukan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	1
1080	3.27.000417	Jumlah layanan jasa medik veteriner	Unit	Layanan penanganan penyakit hewan yang dilakukan oleh petugas berwenang medik veteriner)	32
1081	3.27.000437	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan	Ha	Jumlah luas areal tanaman pangan yang terserang organisme penggangu tumbuhan (hama, penyakit, dan gulma) sehingga menyebabkan kematian, gangguan kehidupan atau kerusakan pada tumbuhan	56.31
1082	3.27.000438	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang Ditangani	Ha	Jumlah luas areal tanaman pangan yang terserah (tidak bertambah/populasi OPT tidak meningkat/intensitas serangan OPT tidak meningkat) akibat adanya tindakan pengendalian	56.31
1083	3.27.000441	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Orang	sejumlah atau golongan masyarakat yang sadar terhadap kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan aspek persyaratan teknis	25
1084	3.27.000442	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesrawet dan kesejahteraan hewan	Orang	Banyaknya masyarakat yang terdidik dan meningkat pemahamannya terhadap kesrawet dan keswan	25
1085	3.27.000443	Jumlah Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang	Ketersediaan Petugas Medik Veteriner yang memiliki kewenangan dan izin secara penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan , sesuai dengan prosedur dan teknik kerja tertentu	2

1086	3.27.000445	Jumlah Paramedik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang	Ketersediaan Petugas Paramedik Veteriner yang memiliki kewenangan dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan prosedur dan teknik kerja tertentu	2
1087	3.27.000449	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	Banyaknya pelayanan yang dilakukan oleh petugas medik veteriner pada tahun berjalan	1
1088	3.27.000451	Jumlah pemiliman dan pengawasan lahan penggembalaan umum	Laporan	Banyaknya kegiatan pemilihan dan pengawasan terhadap lahan penggembalaan umum	1
1089	3.27.000453	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Laporan	Pemeriksaan yang dilakukan terhadap HPM atau terduga pembawa kasus penyakit zoonosa di tempat pemeriksaan	1
1090	3.27.000454	Jumlah Pemeriksaan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Laporan	Pemeriksaan yang dilakukan terhadap HPM atau terduga pembawa kasus penyakit zoonosa di tempat pemeriksaan	1
1091	3.27.000456	Jumlah Pemeriksaan Produk Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Laporan	Pemeriksaan yang dilakukan terhadap produk hewan baik olahan maupun non olahan di tempat pemeriksaan	1
1092	3.27.000460	Jumlah Pertanggahaan Penerbitan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Dokumen	Kegiatan administrasi yang dilakukan sebagai salah satu proses penerbitan izin usaha rumah potong hewan	1
1093	3.27.000461	Jumlah Pertanggahaan Penerbitan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan	Dokumen	Kegiatan administrasi yang dilakukan sebagai salah satu proses penerbitan izin usaha rumah sakit hewan/pasar hewan	1
1094	3.27.000463	Jumlah Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan	Laporan	Banyaknya penerapan terhadap persyaratan teknis pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan dari dan ke luar daerah Kab/Kota	1
1095	3.27.000467	Jumlah Pengawasan Kesehatan Hewan di Perbatasan di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Laporan	Kegiatan pengawasan kesehatan hewan di daerah perbatasan tempat pemeriksaan hewan dan media pembawa penyakit	1
1096	3.27.000468	Jumlah Pengawasan Kesehatan Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Laporan	Pengawasan yang dilakukan terhadap HPM atau terduga tertular kasus penyakit di tempat pemeriksaan	1
1097	3.27.000469	Jumlah Pengawasan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Laporan	Pengawasan yang dilakukan terhadap HPM atau terduga pembawa kasus penyakit zoonosa di tempat pemeriksaan	1
1098	3.27.000470	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan	Laporan	Pengawasan dengan Penerapan Persyaratan Teknis yang dilakukan dalam rangka Pemasukan/Pengeluaran Hewan Hidup baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi	1
1099	3.27.000471	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya	Laporan	Pengawasan dengan Penerapan Persyaratan Teknis yang dilakukan dalam rangka Pemasukan/Pengeluaran Produk berupa media pembawa penyakit hewan baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi	1
1100	3.27.000472	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan	Laporan	Pengawasan dengan Penerapan Persyaratan Teknis yang dilakukan dalam rangka Pemasukan/Pengeluaran Produk Hewan baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi	1
1101	3.27.000473	Jumlah Pengawasan Produk Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Laporan	Pengawasan yang dilakukan terhadap produk hewan baik olahan maupun non olahan di tempat pemeriksaan	1

1102	3.27.000474	Jumlah penggunaan alsintan	Unit	Kegiatan penggunaan alat dan mesin pertanian pra panen yang meliputi pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pemanfaatan bantuan alsintan pra panen di tingkat kabupaten/Kota	171
1103	3.27.000475	Jumlah penggunaan pestisida	Liter	Kegiatan penggunaan pestisida yang meliputi perijinan, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pemanfaatan bantuan pestisida di tingkat kabupaten/kota	364
1104	3.27.000476	Jumlah penggunaan pupuk	Ton	kegiatan pengelolaan pupuk bersubsidi meliputi perencanaan penginputan, dan penetapan alokasi pupuk bersubsidi, sosialisasi, pembinaan dan pelaksanaan pengawalan terhadap verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota yang dilakukan oleh tim Kecamatan Kegiatan Pengelolaan Pupuk Non Subsidi meliputi kegiatan pendataan pupuk dan pembenah tanah yang terdaftar, pemantauan peredarannya di lapangan serta melakukan edukasi penggunaan pupuk dan pembenah tanah yang tepat	8852
1105	3.27.000497	Jumlah penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kasus	Penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dibandingkan tahun sebelumnya dalam satu daerah kab/kota	16
1106	3.27.000503	Jumlah Peralatan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Unit	Ketersediaan Peralatan pada Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan Hewan dan Pemeriksaan Ternak Keliling yang ada pada suatu wilayah	3
1107	3.27.000506	Jumlah Petugas Medik Veteriner	Orang	Banyaknya petugas medik veteriner di daerah	2
1108	3.27.000517	Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang dibangun	Unit	Unit Pelayanan Pemeriksaan Hewan yang terbangun dan berguna dalam pengawasan, peredaran ternak dan pengendalian penyebaran penyakit hewan menular.	1
1109	3.27.000518	Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang terpelihara	Unit	Unit Pelayanan Pemeriksaan Hewan yang terpelihara dan berguna dalam pengawasan, peredaran ternak dan pengendalian penyebaran penyakit hewan menular	1
1110	3.27.000544	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	Produk	unit usaha produk hewan segar berkemasan yang telah untuk memenuhi syarat persyaratan higiene sanitasi sebagai jaminan keamanan dan kualitas untuk produk pangan asal ternak yang dikonsumsi masyarakat.	1 jenis produk susu kambing
1111	3.27.000556	Jumlah rencana pengembangan Kawasan Hortikultura	Dokumen	banyaknya rencana pengembangan kawasan hortikultura	5
1112	3.27.000557	Jumlah rencana pengembangan Kawasan Peternakan	Dokumen	Banyaknya rencana pengembangan kawasan peternakan, berupa rencana integrasi pertanian-peternakan, perluasan lahan peternakan, rencana penambahan ternak; dan rencana penggunaan lahan baru untuk peternakan	2
1113	3.27.000559	Jumlah rencana pengembangan Kawasan Tanaman Pangan	Dokumen	Banyaknya rencana pengembangan kawasan tanaman pangan, berupa rencana diversifikasi, intensifikasi, maupun rencana perluasan dan penggunaan lahan baru untuk budidaya tanaman pangan	6001

1114	3.27.000560	Jumlah rencana pengembangan Prasarana Hortikultura	Dokumen	tersedianya rencana pengembangan prasarana hortikultura	5
1115	3.27.000565	Jumlah Sekarsu Alsintan	Unit	Jumlah alat dan mesin pertanian pra panen yang tersedia baik dalam kondisi baik maupun perlu perbaikan atau rusak yang ada di masing-masing kelompok masyarakat/masyarakat petani di tingkat provinsi	171
1116	3.27.000584	Jumlah Sekarsu Pestisida	Liter	Jumlah pestisida yang tersedia atau dimiliki oleh masing-masing masyarakat petani untuk digunakan atau dimanfaatkan.	564

1117	3.27.000585	Jumlah Sebaran pupuk	Ton	Jumlah pupuk subsidi maupun non subsidi yang tersebar atau dimiliki oleh masing-masing masyarakat petani untuk digunakan atau dimanfaatkan pada lahan garapannya.	8801
1118	3.27.000598	Jumlah SKKH/SKPH HPM	Dokumen	Ketersediaan Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang berisi standar persyaratan terkait pemeliharaan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan	3
1119	3.27.000599	Jumlah wilayah Penanggulangan Zoonosis	Wilayah	Wilayah dengan risiko zoonosis dan dapat dikendalikan melalui pengawasan yang dilakukan	13
1120	3.27.000602	Jumlah wilayah rekandah Zoonosis	Wilayah	Wilayah dengan risiko zoonosis dan dapat dikendalikan melalui pengawasan yang dilakukan	7
1121	3.27.000603	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	Wilayah yang dilakukan pengawasan melalui peningkatan surveilans terpadu berbasis risiko dan kewaspadaan untuk deteksi kasus, perbaikan biosekuriti	13
1122	3.27.000609	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan dimiliki di Kabupaten/Kota	Ha	LP2B yang ditetapkan akan dijadikan dasar dalam pemberian bantuan di bidang pertanian baik melalui APBN maupun pengendalian terhadap KP2B yang ditetapkan dalam Peraturan daerah Rencana Tata Ruang mengikuti, dengan pengaturan penataan ruang dan UU 41 2009 beserta turunannya	5.536,63
1123	3.27.000613	Luas kawasan peternakan	Ha	Luas area kawasan peternakan yang ditunjukkan dalam rangka pemenuhan produk peternakan seperti susu, telur dan daging	22
1124	3.27.000614	Luas kawasan tanaman pangan	Ha	Luas area kawasan tanaman pangan	6086
1125	3.27.000619	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Ha	- Penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan kab/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah kab/ KP2B yang ditetapkan berupa lahan beririgasi, reklamasi rawa pasang surut dan lebak, tidak Sesuai amanat Perpres 18 Tahun 2020 maka eksisting sawah seluruhnya ditetapkan sebagai Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan penetapan kawasan memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial.&	5536,63

27. DSSD BIDANG PERDAGANGAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
1126	3.30.000007	Agen dan Pasar Rakyat	Unit	Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang dimiliki, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar menawar	29
1127	3.30.000014	fasilitasi proses Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Kegiatan	Fasilitasi proses pelayanan surat tanda pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (stpw) dalam negeri secara terintegrasi melalui sistem elektronik	13
1128	3.30.000015	Gudang yang telah terdaftar	Unit	Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.	11
1129	3.30.000019	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kegiatan	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi terkait ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat.	2
1130	3.30.000020	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kegiatan	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka meningkatkan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen serta pasar rakyat.	13
1131	3.30.000023	Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha di Bidang Metrologi	Kegiatan	Kegiatan pembinaan pelaku usaha di bidang metrologi untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.	20
1132	3.30.000026	Kegiatan Penyidikan Metrologi Legal	Kegiatan	Kegiatan penyidikan di bidang metrologi legal untuk menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.	20
1133	3.30.000046	Pemesan Dagang Lokal yang Diikuti	Kegiatan	Kegiatan partisipasi dalam pameran dagang lokal untuk mempromosikan produk dan memperluas jaringan pasar.	1
1134	3.30.000049	Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Unit	Pasar rakyat yang telah terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan untuk mendukung pemantauan dan pengelolaan data perdagangan.	1
1135	3.30.000057	Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kegiatan	Pelaksanaan operasi pasar khusus yang berdampak dalam satu kabupaten/kota.	1
1136	3.30.000058	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kegiatan	Pelaksanaan operasi pasar reguler yang berdampak dalam satu kabupaten/kota.	1

1137	3.30.000060	Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kegiatan	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah Tersedianya laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan alat ukur laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan satuan laporan	1
1138	3.30.000061	Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kegiatan	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah Tersedianya laporan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% dengan alat ukur laporan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% dengan satuan laporan	1
1139	3.30.000064	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Takar	Kegiatan	Pelaksanaan tera ulang untuk alat takar guna menjamin ketepatan dan kesebatan ukuran.	20
1140	3.30.000065	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Timbang	Kegiatan	Pelaksanaan tera ulang untuk alat timbang guna menjamin ketepatan dan kesebatan ukuran.	20
1141	3.30.000066	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Ukur	Kegiatan	Pelaksanaan tera ulang untuk alat ukur guna menjamin ketepatan dan kesebatan ukuran.	20
1142	3.30.000067	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi	Pelaku Usaha	Pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di bidang metrologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	20
1143	3.30.000068	Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Unit	Pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan distribusi barang dalam satu kabupaten/kota.	36
1144	3.30.000073	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kegiatan	Kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok serta barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	200
1145	3.30.000074	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kegiatan	Kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok serta barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam satu kabupaten/kota	1
1146	3.30.000079	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan	Kegiatan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan distribusi.	1
1147	3.30.000080	Pembinaan dan Pengembalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan	Kegiatan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan distribusi.	8
1148	3.30.000084	Pemeriksaan Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kegiatan	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan adalah Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan dengan alat ukur Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan dengan satuan dokumen	2
1149	3.30.000094	Produk Unggulan Daerah	Produk	Produk khas suatu daerah yang memiliki nilai ekonomi, daya saing, dan potensi sebagai komoditas unggulan.	2
1150	3.30.000097	Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan	Kegiatan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota melalui berbagai media dan kegiatan sosialisasi	1
1151	3.30.000098	Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Disalurkan	Unit	Jumlah pupuk dan pestisida bersubsidi yang disediakan atau disalurkan sesuai ketentuan untuk mendukung kebutuhan petani.	1

1152	3.30.000009	Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diawasi Penyaluran dan Penggunaannya dengan Realisasi Minimal 90%	Unit	Kegiatan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk serta pestisida bersubsidi dengan target realisasi minimal 90%.	1
1153	3.30.000103	Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	Fasilitas yang digunakan untuk menyalurkan dan memperlancar arus barang dari produsen hingga ke konsumen dalam kegiatan perdagangan.	27
1154	3.30.000104	Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Unit	Sistem dan jaringan yang menyediakan, mengelola, serta menyebarkan informasi terkait kegiatan perdagangan.	2
1155	3.30.000105	UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	Usaha mikro, kecil, dan menengah yang beroperasi di tingkat kabupaten/kota sesuai ketentuan perundang-undangan.	23474

28. DSSD BIDANG PERINDUSTRIAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
1156	3.31.000003	Fasilitas non fiskal bagi industri kecil dan industri menengah	Laporan	Bentuk dukungan non fiskal yang diberikan kepada industri kecil dan menengah untuk mendorong pengembangan usaha.	3
1157	3.31.000006	Kegiatan pemeriksaan dokumen dan/atau observasi lapangan	Laporan	Kegiatan berupa pemeriksaan dokumen dan/atau observasi lapangan sebagai bagian dari proses verifikasi atau pengawasan.	1
1158	3.31.000010	Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lain terkait Sektor Industri lingkup Provinsi	Laporan	Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data lain yang terkait dengan sektor industri dalam lingkup provinsi.	41
1159	3.31.000013	Pelaksanaan Pemberian fasilitas Kepada industri kecil dan menengah	Laporan	Pelaksanaan kegiatan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan menengah untuk mendukung pengembangan dan peningkatan usaha.	3
1160	3.31.000016	Pelaksanaan Peningkatan kompetensi internal IKM	Laporan	Pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi internal industri kecil dan menengah (ikm) untuk mendukung produktivitas dan daya saing.	3
1161	3.31.000020	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Laporan	Kegiatan pembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, dan daya saing.	3
1162	3.31.000029	Penyediaan Informasi dan Analisa Industri	Laporan	Kegiatan penyediaan informasi dan analisis industri untuk mendukung perumusan kebijakan serta pengambilan keputusan.	1
1163	3.31.000032	Pemeriksaan verifikasi teknis dalam Perizinan usaha industri dan Perizinan Perluasan usaha industri	Laporan	Pemeriksaan verifikasi teknis sebagai bagian dari proses perizinan usaha industri dan perizinan perluasan usaha industri.	4
1164	3.31.000038	Verifikasi teknis perizinan industri dan perizinan perluasan industri	Laporan	Proses verifikasi teknis dalam perizinan usaha industri dan perizinan perluasan industri sesuai ketentuan.	3
1165	3.31.000041	Data Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal di Kabupaten/Kota	Data	Jumlah objek yang menjadi sasaran pengawasan jaminan produk halal di tingkat kabupaten/kota.	13
1166	3.31.000042	Data Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal di Provinsi	Data	Jumlah objek yang menjadi sasaran pengawasan jaminan produk halal di tingkat provinsi.	23
1167	3.31.000047	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan Jumlah investasi	Data	Kumpulan data perusahaan industri di tingkat kabupaten/kota yang diklasifikasikan berdasarkan jumlah investasi.	7
1168	3.31.000048	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan	Data	Kumpulan data perusahaan industri di tingkat kabupaten/kota yang diklasifikasikan berdasarkan sektor dan subsektor, beserta satuan perusahaan.	7
1169	3.31.000049	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan	Data	Kumpulan data perusahaan industri di tingkat kabupaten/kota yang diklasifikasikan berdasarkan skala usaha, beserta satuan perusahaan.	7
1170	3.31.000050	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan tingkat risiko, satuan perusahaan	Data	Kumpulan data perusahaan industri di tingkat kabupaten/kota yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko, beserta satuan perusahaan.	7
1171	3.31.000053	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota telah berproduksi	Data	Kumpulan data perusahaan industri di tingkat kabupaten/kota yang telah berproduksi.	7

1172	3.31.000062	Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustriandi Kabupaten/Kota	Data	Jumlah pengajuan dari pelaku usaha industri kepada dinas perindustrian kabupaten/kota atau instansi berwenang untuk dilakukan verifikasi teknis terhadap pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian.	1

29. DSSD BIDANG SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
1173	4.01.000001	Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen yang berisi hasil evaluasi, analisis, serta keputusan terkait penataan kelembagaan perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota. Dokumen ini menjadi dasar hukum dan acuan dalam menata struktur organisasi perangkat daerah (sopd) agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	1
1174	4.01.000002	Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pendampingan, arahan, dan fasilitasi dari pemerintah provinsi atau kementerian terkait dalam proses penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah.	1
1175	4.01.000003	Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dokumen	Dokumen yang berisi hasil penyusunan, penghitungan, dan evaluasi terkait kebutuhan jabatan, beban kerja, serta penilaian nilai jabatan dalam suatu organisasi perangkat daerah atau instansi.	12
1176	4.01.000004	Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	Dokumen yang berisi laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencakup pencapaian, kendala, serta rekomendasi perbaikan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.	2
1177	4.01.000007	Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pelaksanaan, pengaturan, dan evaluasi tata laksana penyelenggaraan pemerintahan.	2
1178	4.01.000008	Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pendampingan atau dukungan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	3
1179	4.01.000022	Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	Dokumen berisi hasil pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, serta capaian kinerja dalam kebijakan kesejahteraan rakyat di bidang sosial.	7
1180	4.01.000026	Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen	Dokumen berisi produk hukum berupa peraturan yang telah disusun.	46
1181	4.01.000027	Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen	Dokumen berisi produk hukum berupa penetapan yang telah disusun.	430
1182	4.01.000028	Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen	Dokumen berisi produk hukum yang terdokumentasi dan dikelola dalam sistem informasi hukum.	24
1183	4.01.000029	Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Dokumen	Dokumen berisi produk hukum kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi dan evaluasi.	28
1184	4.01.000030	Masalah Hukum yang Ditanganani	Kasus	Kasus atau perasalan hukum yang telah ditangani dan diselesaikan sesuai ketentuan.	4
1185	4.01.000043	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	Laporan yang memuat hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa.	13
1186	4.01.000044	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	Laporan yang memuat hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.	4

1187	4.01.000045	Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	Laporan yang memuat hasil pengelolaan dan pemantauan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.	2
1188	4.01.000046	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	3
1189	4.01.000047	Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pengaturan, penataan, dan evaluasi kelembagaan pengadaan barang dan jasa.	1
1190	4.01.000050	Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil kegiatan pendampingan, konsultasi, atau bimbingan teknis terkait pengadaan barang dan jasa.	2
1191	4.01.000055	Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	Laporan yang memuat hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan di suatu daerah.	1
1192	4.01.000131	Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil penataan administrasi pemerintahan.	1
1193	4.01.000132	Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pengelolaan administrasi kewilayahan.	3
1194	4.01.000133	Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.	2
1195	4.01.000134	Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil fasilitasi pengelolaan bina mental dan spiritual.	2
1196	4.01.000135	Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	Dokumen yang memuat kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial, meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pengendalian penduduk dan keb	7
1197	4.01.000136	Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kependudukan dan Olahraga, Pariwisata, Perpustakaan, Kearsipan, Tradisi Lisan	Dokumen	Dokumen yang memuat kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat, meliputi urusan kependudukan dan olahraga, pariwisata, perpustakaan, kearsipan, serta tradisi lisan.	5
1198	4.01.000139	Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	Produk hukum daerah yang telah disusun sebagai dasar pelaksanaan kebijakan dan pemerintah di tingkat daerah.	346
1199	4.01.000140	Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	Kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum dari instansi terkait.	5
1200	4.01.000141	Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	Dokumentasi produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang telah disusun dan disiapkan.	29
1201	4.01.000142	Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil fasilitasi kerja sama dengan pihak dalam negeri.	10
1202	4.01.000146	Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	Laporan yang memuat hasil pengendalian dan distribusi kegiatan perekonomian.	3

1203	4.01.000150	Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil fasilitasi dalam penyusunan program pembangunan daerah.	3
1204	4.01.000151	Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	Laporan yang memuat hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan.	2
1205	4.01.000152	Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Laporan yang memuat hasil pengelolaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.	2
1206	4.01.000154	Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil layanan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik.	2

30. DSSD BIDANG SEKRETARIAT DPRD

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
1207	4.02.000001	Dokumentasi DPRD	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil kegiatan, keputusan, atau aktivitas dprd sebagai bagian dari fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.	360
1208	4.02.000002	Orang yang mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Orang	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan sosialisasi rancangan peraturan daerah.	18000
1209	4.02.000004	Publikasi DPRD	Dokumen	Dokumen atau media yang memuat informasi terkait kegiatan, keputusan, dan fungsi dprd yang dipublikasikan kepada masyarakat.	12
1210	4.02.000005	Rancangan Peraturan Daerah yang disosialisasikan	Dokumen	Dokumen rancangan peraturan daerah yang telah disosialisasikan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.	5
1211	4.02.000007	Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah.	1
1212	4.02.000008	Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah.	2
1213	4.02.000012	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilaksanakan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Orang	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan daerah yang dilaksanakan bersama oleh dprd dan pemerintah daerah.	18000
1214	4.02.000013	Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pembahasan kebijakan umum anggaran (kua) dan prioritas plafon anggaran sementara (ppas).	1
1215	4.02.000014	Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pembahasan perubahan kebijakan umum anggaran (kua) dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara (ppas).	1
1216	4.02.000015	Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd).	2
1217	4.02.000016	Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd).	2
1218	4.02.000017	Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pembahasan laporan realisasi pelaksanaan apbd setiap semester.	2
1219	4.02.000018	Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd).	1
1220	4.02.000024	Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan (bpk).	1
1221	4.02.000026	Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	Dokumen yang berisi rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) kepala daerah.	1
1222	4.02.000028	Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil kegiatan pendalaman tugas dprd.	50
1223	4.02.000029	Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	Jumlah orang yang tergabung dalam kelompok pakar dan tim ahli dprd.	10
1224	4.02.000030	Tenaga Ahli Fraksi	Orang	Jumlah tenaga ahli yang mendukung kerja fraksi di dprd.	8

1225	4.02.000031	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil penyelenggaraan kegiatan hubungan masyarakat di lingkungan dprd.	1
1226	4.02.000032	Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	Dokumen yang berisi rencana kerja dprd sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi dprd.	1
1227	4.02.000033	Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil publikasi dan dokumentasi kegiatan dprd.	1
1228	4.02.000034	Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	Laporan yang memuat hasil pelaksanaan kunjungan kerja dprd.	500
1229	4.02.000035	Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	Dokumen yang berisi pokok-pokok pikiran dprd yang telah disusun sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan daerah.	1
1230	4.02.000036	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	Jumlah dokumen yang memuat hasil pelaksanaan reses anggota dprd.	90
1231	4.02.000042	Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas dprd.	30
1232	4.02.000044	Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah dprd.	20
1233	4.02.000045	Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil fasilitasi pelaksanaan tugas pimpinan dprd.	1
1234	4.02.000046	Dokumen LKPJ dan Rencana Kerja yang Disusun	Dokumen	Dokumen yang berisi laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) dan rencana kerja yang telah disusun sebagai bagian dari perencanaan dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah.	1
1235	4.02.000055	Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pembahasan rancangan peraturan daerah.	2
1236	4.02.000063	Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) perubahan.	1

31. DSSD BIDANG PERENCANAAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
1237	5.01.000001	Aparatur yang menangani Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Orang	Jumlah aparatur yang ditugaskan menangani Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan dan Perangkat Daerah. Aparatur dimaksud dapat berdasarkan SK Tim yang terdiri dari jabatan: 1. JF Perencana 2. JF Statistisi 3. JF Analisis Kebijakan 4. JF Pranata Komputer 5. JF Peneliti	20
1238	5.01.000002	Dokumen Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dokumen	Jumlah bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan dalam rangka musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk memfaikan dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan	17
1239	5.01.000003	Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	Jumlah berita acara dari hasil pelaksanaan forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk menyatukan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.	1
1240	5.01.000004	Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	Jumlah berita acara yang dihasilkan dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	2
1241	5.01.000005	Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	Jumlah Berita Acara hasil pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota. Musrenbang Kabupaten/Kota adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.	2
1242	5.01.000006	Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	Jumlah dokumen penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berbasiskan SIPD yang mulai dikumpulkan pada tahapan persiapan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	1
1243	5.01.000010	Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bentuk Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	Jumlah dokumen yang berisikan hasil analisis Kondisi Daerah yang dilakukan dengan menelaah hasil evaluasi rencana pembangunan Daerah dan kinerja Perangkat Daerah serta dapat menggambarkan kebutuhan penerapan pelayanan dasar. Disusun sesuai dengan aspek geografi dan demografi, potensi Daerah, kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing Daerah.	2
1244	5.01.000012	Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah. Dokumen dimaksud dapat berupa laporan hasil penerapan SIPD dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan SIPD dalam pembangunan	2

1245	5.01.000013	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Infrastruktur dan dikoordinir Penyusunannya	3
1246	5.01.000014	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Kewilayahan dan dikoordinir Penyusunannya	3
1247	5.01.000015	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Pembangunan Manusia dan dikoordinir Penyusunannya	3
1248	5.01.000016	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan dikoordinir Penyusunannya	3
1249	5.01.000017	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Perekonomian dan dikoordinir Penyusunannya	3
1250	5.01.000018	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang SDA dan dikoordinir Penyusunannya	3
1251	5.01.000019	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD yang Ditetapkan	3
1252	5.01.000022	Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	Jumlah dokumen rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD yang disusun	2
1253	5.01.000024	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau kombultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja)	9
1254	5.01.000025	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau kombultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	22
1255	5.01.000026	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau kombultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	22

1256	5.01.000027	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau konsultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	15
1257	5.01.000028	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau konsultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	15
1258	5.01.000029	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau konsultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	9
1259	5.01.000030	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja selama 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan dan tahunan.	2
1260	5.01.000031	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pembangunan Manusia	2
1261	5.01.000032	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pemerintahan	3
1262	5.01.000033	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Perekonomian	3
1263	5.01.000034	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang SDA	1

1264	5.01.000035	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Infrastruktur	3
1265	5.01.000036	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Kewilayahan	2
1266	5.01.000037	Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang berisi Formulir Pengendalian Perencanaan dan Formulir Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana diatur	1
1267	5.01.000038	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2
1268	5.01.000039	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2
1269	5.01.000040	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2
1270	5.01.000041	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3
1271	5.01.000042	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3
1272	5.01.000043	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2
1273	5.01.000044	Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	Jumlah aparatur yang dilaksanakan pembinaan terkait pemanfaatan data dan informasi dalam pembangunan daerah	32
1274	5.01.000045	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil input, analisis, dan/atau konsultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (KPPD, RPJMD dan RKPD).	22

1275	5.01.000049	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau konsultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22
1276	5.01.000050	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau konsultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15
1277	5.01.000051	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau konsultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15
1278	5.01.000052	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau konsultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9
1279	5.01.000053	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau konsultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9
1280	5.01.000054	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Infrastruktur	22
1281	5.01.000055	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Kewilayahan	22
1282	5.01.000056	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pembangunan Manusia	15

1283	5.01.000057	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pemerintahan	15
1284	5.01.000058	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Perekonomian	0
1285	5.01.000059	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang SDA	0
1286	5.01.000060	Perangkat Daerah yang mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk menyusukan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota	46
1287	5.01.000061	Peserta Konsultasi Publik	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	46
1288	5.01.000064	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	Jumlah Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4
1289	5.01.000065	Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	Jumlah usulan Musrenbang Desa/Kelurahan yang diverifikasi oleh Kecamatan	83

32. DSSD BIDANG KEUANGAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
1290	5.02.000001	Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	Dokumen yang berisi kebijakan umum anggaran (kua) dan prioritas plafon anggaran sementara (ppas) yang telah disusun sebagai dasar penyusunan apbd.	2
1291	5.02.000002	Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	Dokumen yang berisi perubahan kebijakan umum anggaran (kua) dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara (ppas) yang telah disusun sebagai dasar penyusunan perubahan apbd.	2
1292	5.02.000003	RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang telah melalui proses pemeriksaan dan penyesuaian oleh tim anggaran pemerintah daerah (tapd) untuk memastikan kesesuaian dengan kua, ppas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	44
1293	5.02.000004	Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Dokumen perubahan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang telah dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan kondisi, dan kebijakan anggaran berjalan, kemudian diperiksa serta disesuaikan oleh tim anggaran pemerintah daerah (tapd) agar selaras dengan perubahan kua dan perubahan ppas serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	44
1294	5.02.000006	Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Dokumen perubahan daftar pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang telah disusun berdasarkan perubahan rka skpd, kemudian diperiksa dan disesuaikan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (ppkd)/tim anggaran pemerintah daerah (tapd) untuk memastikan kesesuaian dengan perubahan kua, perubahan ppas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	44
1295	5.02.000007	Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	Produk hukum daerah yang ditetapkan setiap tahun sebagai dasar pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd).	2
1296	5.02.000008	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	Produk hukum daerah yang ditetapkan dan diterapkan apabila terdapat kondisi yang menghendaki penyesuaian terhadap apbd berjalan.	2
1297	5.02.000009	Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	Kumpulan produk hukum, peraturan, keputusan, dan pedoman yang menjadi dasar hukum, arah, dan tata cara dalam proses pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam aspek penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran.	0
1298	5.02.000010	Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Anggaran Pendapatan	Dokumen	Dokumen resmi yang memuat hasil proses komunikasi, sinkronisasi, dan konsultasi antar perangkat kepentingan (pemerintah daerah, dprd, serta instansi terkait) mengenai rencana penerimaan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran	2

1299	5.02.000011	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	Dokumen rentu yang memuat hasil proses komunikasi, sinkronisasi, dan kesepakatan antara pemerintah daerah, dprd, serta perangkat daerah terkait mengenai rencana alokasi belanja daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.	2
1300	5.02.000012	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	Dokumen rentu yang memuat hasil proses komunikasi, sinkronisasi, dan kesepakatan antara pemerintah daerah, dprd, dan perangkat daerah terkait mengenai perencanaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.	2
1301	5.02.000013	Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	Individu dari perangkat daerah provinsi yang tercatat hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas serta pemahaman terkait perencanaan dan penganggaran daerah.	4
1302	5.02.000016	Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	Dokumen rentu yang memuat hasil penilaian, analisis, dan rekomendasi pemerintah provinsi terhadap rancangan perubahan apbd beserta peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan apbd kabupaten/kota, untuk menjamin kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan fiskal daerah, serta kepentingan pembangunan.	1
1303	5.02.000017	Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	Dokumen rentu yang berisi hasil penilaian, analisis, serta rekomendasi pemerintah provinsi terhadap rancangan perda dan peraturan kepala daerah tersebut, untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan dalam pelaksanaan apbd kabupaten/kota.	1
1304	5.02.000021	Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen rentu yang memuat hasil proses konsultasi, koordinasi, serta pembinaan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait penyusunan dan evaluasi rancangan perda apbd dan rancangan perkada penjabaran apbd agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan fiskal daerah.	3
1305	5.02.000022	Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen rentu yang memuat hasil konsultasi, koordinasi, dan pembinaan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyusunan serta evaluasi rancangan perda perubahan apbd dan rancangan perkada penjabaran perubahan apbd agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan fiskal daerah.	1

1306	5.02.000023	Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen resmi yang berisi hasil konsultasi, koordinasi, dan pembinaan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan serta evaluasi rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd dan rancangan perkada penjabaran pertanggungjawaban apbd agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntabilitas keuangan daerah.	3
1307	5.02.000024	Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Individu dari perangkat daerah kabupaten/kota yang tercatat hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan terkait penggunaan dan pengelolaan sistem informasi pemerintahan daerah (sipd) pada bidang keuangan daerah.	2
1308	5.02.000041	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	Draf/rancangan produk hukum (perda dan perkada) mengenai pertanggungjawaban apbd yang telah selesai disusun dan siap untuk diproses ke tahap selanjutnya.	3
1309	5.02.000061	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	Aparatur sipil negara (asn) pemerintah provinsi yang telah berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembinaan terkait penggunaan dan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah.	2
1310	5.02.000117	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	Draf/rancangan produk hukum (perda dan perkada) tingkat kabupaten/kota mengenai pertanggungjawaban apbd yang telah selesai disusun dan siap diproses lebih lanjut.	1
1311	5.02.000153	Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen kajian atau analisis yang berisi evaluasi potensi, usulan pengembangan, dan rekomendasi kebijakan baru di bidang pajak daerah.	2
1312	5.02.000156	Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	Laporan yang meninglom hasil kegiatan pemutakhiran data atau penambahan baru data objek, subjek dan wajib pajak di tingkat kabupaten/kota.	303
1313	5.02.000158	Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	Objek pajak (khususnya pbb-p2) yang nilai jual objek pajak (njop) nya telah diperbarui atau disesuaikan dalam satu periode penilaian.	4.963.072.047
1314	5.02.000163	Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen (surat keputusan) yang diterbitkan sebagai hasil dari proses penyelesaian permohonan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.	17

33. DSSD BIDANG KEPEGAWAIAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
1315	5.03.000001	Dokumen Hasil Penyusunan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Dokumen	Dokumen Hasil Penyusunan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN adalah dokumen yang memuat informasi kompetensi sebuah kelembagaan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, berdasarkan demografis dan geografis dan minimal memiliki, antara lain uraian untuk melaksanakan pengadaan ASN.	1
1316	5.03.000006	Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	Dokumen yang menjadi bukti adanya koordinasi dalam proses administrasi pemberhentian ash, misalnya usulan pemberhentian atau ek pensiun.	185
1317	5.03.000013	Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	Surat keputusan (sk) mutasi/perpindahan pegawai yang telah diterbitkan dan dilaksanakan, baik internal maupun antar daerah.	16
1318	5.03.000014	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan	Laporan yang mendokumentasikan proses pengusulan, verifikasi, hingga penetapan kenaikan pangkat bagi asn yang memenuhi syarat.	579
1319	5.03.000015	Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	Dokumen (seperti hasil seleksi, sk promosi) yang terkait dengan proses pengelolaan promosi jabatan bagi asn.	43
1320	5.03.000016	ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	Aparatur sipil negara (asn) yang telah menyelesaikan program pengembangan kompetensi (misalnya diklat, sertifikasi) dan menunjukkan peningkatan kinerja atau kapasitas.	80
1321	5.03.000019	Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Diizinkan	Dokumen	Dokumen yang terkait dengan pengelolaan asn yang mengikuti pendidikan lanjutan (tugas belajar/izin belajar), seperti sk atau laporan kelanjutan studi.	60
1322	5.03.000020	Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Penyelenggaraan Diklat	Dokumen	Dokumen (seperti nota, perjanjian kerja sama) yang menjadi bukti adanya koordinasi dan kerja sama dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan diklat.	5
1323	5.03.000032	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	Dokumen asesmen kinerja pegawai (skp) atau dokumen penilaian kinerja lainnya yang telah selesai dinilai dan divalidasi.	4622
1324	5.03.000033	Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan	Laporan yang menganalisis hasil penilaian kinerja aparatur secara agregat untuk mengidentifikasi tren, kelemahan, dan area perbaikan.	4622
1325	5.03.000037	ASN yang Menerapkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	Aparatur sipil negara (asn) yang dijatuhi hukuman pelanggaran disiplin dan telah menerima pembinaan atau hukuman disiplin.	5
1326	5.03.000038	Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	Laporan yang merangkum data dan proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin asn dalam satu periode.	5
1327	5.03.000039	Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	Berkas permohonan izin perceraian dari asn yang telah diproses dan diterbitkan surat keputusan/rekomendasi.	6
1328	5.03.000040	Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	Laporan yang berisi analisis dan evaluasi terhadap tingkat kedisiplinan asn secara umum serta efektivitas penegakan aturan disiplin.	5

1329	503.000047	Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Dokumen	Dokumen kajian atau laporan yang mengevaluasi pelaksanaan proses pemberhentian dan jbnik kinerja pensiun, meninggal dunia, maupun sebab lain).	145
1330	503.000059	ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	Aparatur sipil negara (asn) yang sedang aktif mengikuti program pendidikan lanjutan (tugas belajar atau izin belajar)	60
1331	503.000064	Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen	Dokumen seperti mou, pkkj yang menjadi bukti adanya kerja sama dengan lembaga lain khusus untuk penyelenggaraan diklat jabatan fungsional.	5

34. DSSD BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
1332	5.04.000003	ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	Aparatur sipil negara (asn) yang berpartisipasi penuh dalam salah satu program pengembangan kompetensi yang diselenggarakan.	46
1333	5.04.000009	Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen	Dokumen formal (mou, pks) yang menyatakan terjalinnya kerja sama dengan lembaga lain dalam bidang pengembangan kompetensi.	5
1334	5.04.000011	ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Orang	Peserta asn dan pimpinan daerah yang berpartisipasi penuh dalam program pengembangan kompetensi yang ditujukan untuk level kepemimpinan dan prajabatan.	3
1335	5.04.000012	Dokumen Hasil Perencanaan, Pengendalian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Dokumen	Dokumen yang dihasilkan dari seluruh rangkaian kegiatan manajerial program pengembangan kompetensi untuk level pimpinan (Perencanaan, Pengendalian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan).	223
1336	5.04.000014	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten atau Kota	Laporan	Laporan yang mendokumentasikan kegiatan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka penyelenggaraan program pengembangan kompetensi di tingkat kabupaten/kota.	5

35. DASD BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
1337	5.05.000001	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) yang spesifik mengkaji isu otonomi daerah.	0
1338	5.05.000002	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan litbang yang spesifik mengkaji isu pemerintahan umum.	0
1339	5.05.000003	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kerjasama dan Kemitraan	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan litbang yang spesifik mengkaji isu kolaborasi dan tata laksana pemerintahan.	0
1340	5.05.000004	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan litbang yang spesifik mengkaji isu aparatur dan reformasi birokrasi.	0
1341	5.05.000005	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan litbang yang spesifik mengkaji isu keuangan, aset, dan reformasi birokrasi.	0
1342	5.05.000006	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan litbang yang spesifik mengkaji isu ketentraman.	0
1343	5.05.000007	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemasyarakatan Kelembagaan Desa	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan litbang yang spesifik mengkaji isu kelembagaan desa.	0
1344	5.05.000008	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan litbang yang spesifik mengkaji isu tata laksana pemerintahan desa.	0
1345	5.05.000009	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan litbang yang spesifik mengkaji isu aparatur pemerintahan desa.	0
1346	5.05.000010	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan litbang yang spesifik mengkaji isu pengelolaan keuangan dan aset desa.	0
1347	5.05.000011	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan litbang yang spesifik mengkaji isu pengembangan bumdes.	0
1348	5.05.000012	Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Dokumen	Dokumen satu basis data hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang dikelola dan tersedia untuk diakses.	0

1349	5.05.000013	Rekomendasi atas Reviu Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	Konsep rekomendasi berdasarkan yang ditemukan pada hasil kajian atau evaluasi peraturan, yang disampaikan kepada pimpinan.	0
1350	5.05.000014	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dalam dan Pengkajian Peraturan	Laporan	Laporan yang mendokumentasikan kegiatan pengelolaan data dan pengkajian peraturan yang telah dilaksanakan.	0
1351	5.05.000015	Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan	Rekomendasi	Surat rekomendasi yang diterbitkan sebagai syarat bagi wna untuk mendapatkan izin melakukan penelitian di wilayah daerah.	0
1352	5.05.000016	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	Dokumen laporan, makalah kebijakan hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang berfokus pada isu isu sosial.	0
1353	5.05.000017	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	0
1354	5.05.000018	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji isu pendidikan dan kebudayaan.	0
1355	5.05.000019	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Olahraga	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji isu kependudukan dan olahraga.	0
1356	5.05.000020	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji isu pengembangan pariwisata	0
1357	5.05.000021	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji isu kesehatan masyarakat.	0
1358	5.05.000022	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji isu kependudukan dan keluarga berencana.	0
1359	5.05.000023	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji isu administrasi kependudukan.	0
1360	5.05.000024	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji isu ketenagakerjaan.	0
1361	5.05.000025	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji tingkat dan model partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	0
1362	5.05.000026	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji isu transmigrasi.	0
1363	5.05.000027	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji isu pengembangan kokm.	0
1364	5.05.000028	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji isu perindustrian dan perdagangan.	0
1365	5.05.000029	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji kinerja dan pengembangan bumd.	0

1368	5.05.000030	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji sektor pertanian, perkebunan, dan ketahanan pangan	0
1367	5.05.000031	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji sektor kelautan dan perikanan.	0
1368	5.05.000032	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji sektor energi dan sumber daya mineral (migas)	0
1369	5.05.000033	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji isu lingkungan hidup.	0
1370	5.05.000034	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji sektor kehutanan.	0
1371	5.05.000035	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji sektor pekerjaan umum (infrastruktur).	0
1372	5.05.000036	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji sektor perhubungan dan transportasi.	0
1373	5.05.000037	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Permukiman dan Kawasan Permukiman	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji sektor permukiman dan permukiman.	0
1374	5.05.000038	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji isu penataan ruang dan pertanahan.	0
1375	5.05.000039	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang spesifik mengkaji sektor komunikasi dan informatika.	0
1376	5.05.000040	Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	Dokumen hasil kegiatan penelitian, pengembangan, dan rekayasa yang menghasilkan inovasi atau teknologi baru/terapan.	0
1377	5.05.000041	Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	Laporan yang menindaklanjuti hasil proses uji coba hingga penerapan sebuah model inovasi atau teknologi di masyarakat atau pemerintahan.	0
1378	5.05.000042	Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	Laporan kegiatan pemanfaatan informasi mengenai praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	0
1379	5.05.000043	Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	Laporan kegiatan sosialisasi untuk menyebarluaskan temuan dan rekomendasi dari hasil-hasil penelitian dan pengembangan.	0
1380	5.05.000044	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	Laporan yang menindaklanjuti kegiatan fasilitasi (pendampingan, pendaftaran) bagi inovator untuk memperoleh hak kekayaan intelektual (hki).	0
1381	5.05.000045	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pranjuan Kebudayaan Bali	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang secara spesifik mengkaji upaya pemajuan kebudayaan bali.	0
1382	5.05.000046	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Pengelolan Desa Adat Bali	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang secara spesifik mengkaji inovasi untuk pengelolan peran dan fungsi desa adat di bali.	0

1383	5.07.000047	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali	Dokumen	Dokumen hasil litbang yang secara spesifik meningkaji inovasi untuk pengembangan tata kehidupan masyarakat (krama) bali.	0
1384	5.05.000046	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) yang spesifik meningkaji tata otonomi daerah.	0
1385	5.05.000059	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan litbang yang spesifik meningkaji tata kelembagaan dan tata laksana pemerintahan.	0
1386	5.05.000051	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan litbang yang spesifik meningkaji tata aparatur dan reformasi birokrasi.	0
1387	5.05.000052	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan litbang yang spesifik meningkaji tata keuangan, aset, dan reformasi birokrasi	0
1388	5.07.000057	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Laporan	Laporan yang berisi hasil kegiatan litbang yang spesifik meningkaji tata pengelolaan keuangan dan aset desa.	0
1389	5.05.000158	Data Kelembagaan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	Laporan atau hasil pengelolaan database kelembagaan dan peraturan yang terstruktur, mutakhir, dan mudah diakses.	0
1390	5.05.000042	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Laporan	Laporan yang menindaklanjuti hasil proses fasilitasi dan penerbitan rekomendasi penelitian bagi wna.	0
1391	5.07.000063	Riset Kebijakan	hasilkah	Penelitian yang berkaitan dengan perumusan dan rumusan kebijakan, implementasi kebijakan, kinerja kebijakan, dan lingkungan kebijakan	0
1392	5.05.000064	Publikasi Ilmiah	naskah	Publikasi ilmiah adalah sistem publikasi yang dilakukan bertanggung jawab melalui proses-proses tertentu seperti peer-review dalam rangka untuk mencapai tingkat objektivitas setinggi mungkin	0
1393	5.05.000065	Penangkis Kebijakan Riset dan Inovasi	Lembaga	Penangkis Kebijakan Riset dan Inovasi adalah orang atau kelompok yang berperan dan berkepentingan dalam membentuk kebijakan seputar riset dan inovasi di daerah.	0
1394	5.05.000066	Peserta Didik	Orang	Peserta Didik adalah orang yang berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan dan lulus penilaian akhir yang diselenggarakan di ujung pelatihan sebagai bukti kelulusannya dan kompetensi yang diperoleh dari kelulusannya tersebut.	0
1395	5.05.000067	Repositori Ilmiah	Dokumen	Repositori Ilmiah adalah sarana menyimpan, melestarikan, mengelola, mempanalisis dan berbagi data penelitian.	0

1396	5.05.000396	Rencana Induk dan Peta Jalan	Dokumen	Rencana Induk dan Peta Jalan adalah dokumen rancangan berisi gagasan riset beserta cara mencapai tujuan kerja organisasi.	0
1397	5.05.000397	Naskah Kebijakan	Dokumen	Naskah Kebijakan adalah dokumen akademik mengenai telaahan dan argumentasi mengenai sebuah kebijakan pemerintah.	0
1398	5.05.000070	Infrastruktur Riset dan Inovasi	Unit	Infrastruktur Riset dan Inovasi adalah serangkaian sistem fisik dasar berupa perlengkapan, peralatan, hingga bangunan untuk menopang kegiatan riset dan inovasi.	0
1399	5.05.000071	Kebun Raya Daerah	Unit	Kebun Raya Daerah adalah kebun raya lestari yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam rangka penelitian dan pengembangan ilmu botani dan ilmu yang berkaitan serta dalam rangka perlindungan alam sumber rekreasi bagi masyarakat umum.	0
1400	5.05.000072	Anggaran Riset	TOE/Miliar Rupiah	Anggaran Riset adalah susunan rencana dan perkiraan mengenai biaya-biaya belanja yang ditujukan untuk melakukan penelitian.	0
1401	5.05.000073	Hak Kekayaan Intelektual	Unit	Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit terpadu dan Merek.	0
1402	5.05.000074	Perjanjian Kerja Sama	Dokumen	Perjanjian Kerja Sama adalah perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.	0
1403	5.05.000075	Sosialisasi dan Diseminasi	Dokumen	Sosialisasi dan Diseminasi adalah upaya membuat masyarakat tersadar, paham, dan menghayati sesuatu serta merupakan proses, cara, dan tujuan agar terjadi perubahan pada pikir, sikap dan tindakan berdasarkan inovasi yang disosialisasi.	0
1404	5.05.000076	Lokakarya, Pameran, dan Promosi	Berita Acara	Lokakarya, Pameran, dan Promosi adalah kegiatan perkumpulan dan perhimpunan orang banyak untuk melihat dan mengambil inspirasi dari kegiatan yang dilakukan pelaku pameran agar dapat menilik ilmu dan pengetahuan untuk dapat digunakan dalam kehidupan kesehariam	0
1405	5.05.000077	Apresiasi Riset dan Inovasi	Berita Acara	Apresiasi Riset dan Inovasi adalah adalah setiap aktivitas penghargaan yang diberikan sebagai hasil penggunaan, penerapan, dan penilaian seseorang terhadap sebuah riset dan inovasi.	0
1406	5.05.000078	Perusahaan Rintisan	Unit	Perusahaan Rintisan merupakan perusahaan yang baru beroperasi dan masih berada pada fase pengembangan untuk menemukan pasar dan mengembangkan produk dengan pendekatan dan penekanan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.	0

1407	5.05.000079	Kondifikasi Teknologi Masyarakat	Unit	Kondifikasi Teknologi Masyarakat adalah kegiatan mendokumentasikan dan menyebarkan hasil pada teknologi yang ada berdasar di masyarakat umum	0
1408	5.05.000080	Produk Unggulan Daerah	Unit	Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendalangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat sehingga sehingga produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong mampu dan mampu memasuki pasar global.	0
1409	5.05.000081	Klaster Industri Berbasis Unggulan Daerah	Unit	Klaster industri berbasis Unggulan Daerah adalah konsentrasi geografis dari perusahaan dan institusi yang saling berhubungan pada sektor tertentu, yang saling berhubungan karena kebersamaan dan saling ketergkapi pada bidang yang menjadi keunggulan dan kekuatan daerah.	0
1410	5.05.000082	Lokakarya	Dokumen	Lokakarya adalah pertemuan antara para ahli (pakar) untuk membahas masalah praktis atau yang berhubungan dengan pelaksanaan dalam bidang keahliannya.	0
1411	5.05.000083	Riset dan Seminar Internasional	Berita Acara	Riset dan Seminar Internasional adalah kegiatan penyampaian suatu karya ilmiah yang berupa ilmu pengetahuan dari seorang akademisi, yang dipresentasikan kepada peserta seminar agar dapat mengambil keputusan yang sama terhadap karya ilmiah antara sumber dengan peserta dengan lingkup internasional.	0
1412	5.05.000084	Pakta Kerja Sama Internasional	hasikah	Pakta Kerja Sama Internasional adalah bentuk perjanjian yang merupakan persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dalam lingkup internasional yang mana masing-masing berupakan akan memati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.	0
1413	5.05.000085	Rapat Koordinasi Teknis	Berita Acara	Rapat Koordinasi Teknis adalah kegiatan pemanyawarahan pengetahuan atau suatu hal khusus atau berada teknis untuk memecahkan masalah dalam penyelesaian atau suatu permasalahan.	0
1414	5.05.000086	Laporan Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah dokumen yang berisi hasil analisis pelaksanaan suatu kegiatan sebagai bentuk pemantauan dan penilaian atas kegiatan yang telah berlangsung dalam rangka memperoleh penilaian dan perbaikan untuk masukan bagi kegiatan berikutnya.	0

1415	5.05.000087	Perangkat Lunak	Aplikasi	Perangkat lunak atau perantil lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat, dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer.	0
1416	5.05.000088	Pendampingan Masyarakat	Berita Acara	Pendampingan Masyarakat adalah kegiatan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, dinamisator, dan dinamisator.	0
1417	5.05.000089	Daftar Kerja Sama	Dokumen	Daftar Kerja Sama adalah dokumen yang memuat materi perjanjian kerja sama antara satu pihak dengan pihak atau banyak pihak lain untuk merancang dan mengelola kerja sama yang dilakukan oleh fraksinasi dan untuk menjadi bahan pertimbangan sekaligus evaluasi program ke depannya.	0
1418	5.05.000090	Laporan Kinerja	naskah	kinerja kinerja adalah hikmah dari seluruh pekerjaan baik rutin maupun tambahan dalam periode waktu tertentu yang dilakukan oleh individu atau/ atau organisasi.	0

36. DSSD BIDANG INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
1419	6.01.000001	Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	Laporan hasil pemeriksaan (lhp) yang diterbitkan oleh aipd terkait pengawasan atas aspek kinerja (ekonomis, efisien, efektif) pemerintah daerah.	18
1420	6.01.000002	Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	Lhp yang diterbitkan oleh aipd terkait pengawasan atas aspek keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan di lingkungan pemerintah daerah.	0
1421	6.01.000003	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	Laporan hasil reviu yang diterbitkan oleh aipd atas laporan kinerja (rencana) pemerintah (lkjip) skpd.	12
1422	6.01.000004	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	Laporan hasil reviu yang diterbitkan oleh aipd atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) sebelum diserahkan kepada bpk.	1
1423	6.01.000005	Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat provinsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota.	16
1424	6.01.000006	Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	Dokumen kesepakatan (jaringan audit, mou) yang terjalin antara aipd dengan pihak lain dalam rangka sinergi pengawasan internal.	
1425	6.01.000007	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	Dokumen (laporan, matriks) yang menyajikan status dan kemajuan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan bpk dan aipd.	4
1426	6.01.000008	Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	Laporan yang berisi data kasus kerugian negara/daerah dan status penyelesaiannya melalui proses tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (tp-tgr).	3
1427	6.01.000009	Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	Lhp yang diterbitkan oleh aipd dari hasil penugasan audit, reviu, atau evaluasi dengan tujuan spesifik di luar audit rutin.	3
1428	6.01.000010	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	Naskah rekomendasi yang berisi usulan perbaikan kebijakan atau sistem pengendalian intern berdasarkan temuan hasil pengawasan.	
1429	6.01.000011	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	Naskah rekomendasi yang berisi usulan perbaikan dalam proses fasilitasi dan koordinasi pengawasan.	
1430	6.01.000012	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat daerah dinas/badan yang menerima layanan pendampingan atau asistensi dari aipd dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.	10
1431	6.01.000013	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	Perangkat daerah yang menerima pendampingan dan dinilai dalam rangka evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi (pmprb)	10
1432	6.01.000014	Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	Kegiatan (rapat, verifikasi lapangan) yang dilaksanakan dalam rangka implementasi program pencegahan korupsi (misalnya melalui mcp-kpk)	8
1433	6.01.000020	Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	Lhp yang diterbitkan oleh aipd kabupaten/kota terkait pengawasan atas pengelolaan keuangan dan pemerintahan desa.	12

37. DSBD BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode DSBD	Uraian DSBD	Satuan	Definisi Operasional	Nilai Tahun 2025
1434	8.01.000001	Anggota Paskibraka	Orang	Anggota Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/ menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan *Hari Lahir Pancasila* baik di tingkat nasional/pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.	62
1435	8.01.000002	Calon Paskibraka	Orang	Para pelajar yang melamar untuk mengikuti seleksi Paskibraka	62
1436	8.01.000003	Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan	Dialog Interaktif dan Diskusi bertujuan untuk memberikan pengajian kepada peserta terkait pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan kepada para calon anggota paskibraka	4
1437	8.01.000004	Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Kegiatan	Memberikan ruang aktivitas, pelatihan, pengajaran, dan sosialisasi bagi anggota paskibraka dan anggota purnapaskibraka untuk meningkatkan pemahaman terkait ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, serta siap untuk menjadi generasi muda yang menjadi contoh dari generasi muda lainnya dalam membangun NKRI	12
1438	8.01.000005	Kelengkapan Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Unit	Forum Dialog dan Pelatihan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Calon Anggota Paskibraka dan Anggota Paskibraka	2
1439	8.01.000006	Kelengkapan pada Pembentukan Paskibraka	Orang	Penyediaan kebutuhan administrasi, seleksi, dan pelatihan calon anggota paskibraka	62
1440	8.01.060007	Kelengkapan pada pemberian lanjutan kepada purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	Kegiatan Forum dialog, diskusi interaktif, dll terkait pemberian pembinaan lanjutan terkait pancasila dan wawasan kebangsaan bagi anggota purna paskibraka duta pancasila	10
1441	8.01.060008	Kelengkapan Pelaksanaan Pembentukan Paskibraka	Unit	Penyediaan seluruh kebutuhan para calon anggota paskibraka dalam proses rekruitmen dan seleksi	30
1442	8.01.080009	Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Unit	Penyediaan seluruh kebutuhan para anggota paskibraka dalam melaksanakan tugas pengibaran Sendera	30
1443	8.01.000010	Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	Penyediaan sarana dan prasarana, serta segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas purna paskibraka duta pancasila	10
1444	8.01.000011	Kelengkapan Pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Unit	Penyediaan ruang diskusi, pelatihan dan pengajaran kepada anggota paskibraka dan purnapaskibraka	32
1445	8.01.060012	Kelengkapan Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	Pemberian ruang diskusi, pelatihan dan pengajaran kepada anggota purna paskibraka duta pancasila	10
1446	8.01.000014	Narasumber atau fasilitator kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	para pelatih dan pengajar dalam memberikan pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka	2
1447	8.01.000015	Narasumber atau fasilitator pada pembentukan Paskibraka	Orang	para pengajar dan fasilitator dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka	2
1448	8.01.000016	Narasumber atau Pelatih dalam Pembentukan Paskibraka	Orang	para pengajar dan pelatih dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka	8
1449	8.01.000017	Pamong/Pengasuh	Orang	Para pamong dan pengasuh anggota paskibraka selama pelatihan	2
1450	8.01.000018	Panitia Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka	Orang	Panitia dalam proses seleksi dan rekruitmen calon anggota paskibraka	12
1451	8.01.000019	Pelatih Paskibraka	Orang	para pengajar dan pelatih dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka	6
1452	8.01.000025	Peserta Calon Paskibraka	Orang	penyediaan sarana, prasarana, dan kebutuhan calon anggota paskibraka	160

1453	8.01.000026	Peserta Kegiatan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	Penyediaan konsumsi, penasaran, uang saku, dan kebutuhan para calon anggota panitibraka dan anggota panitibraka dalam melaksanakan diskusi pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	15
1454	8.01.000027	Peserta Kegiatan pembinaan aktivitas kepanitibrakaan dan purnapanitibraka	Orang	Penyediaan konsumsi, penasaran, uang saku, dan kebutuhan para anggota dan anggota purnapanitibraka dalam melaksanakan kegiatan pembinaan aktivitas kepanitibrakaan dan purnapanitibraka	62
1455	8.01.000029	Peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	Pembinaan untuk peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	62
1456	8.01.000030	Peserta Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	Pembinaan untuk peserta Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	62
1457	8.01.000033	Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan	Pembinaan terkait penyediaan ruang diskusi dengan pembelajaran terkait Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1
1458	8.01.000034	Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi	Orang	Pembinaan terkait Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota Panitibraka	12
1459	8.01.000035	Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Panitibraka	Orang	Penyediaan konsumsi, penasaran, kebutuhan dan honor Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Panitibraka	15
1460	8.01.000036	Training of Trainer Kepanewagan	Kegiatan	Penyelenggaraan TOT Kepanewagan bagi Anggota Panitibraka dan Anggota Purnapanitibraka	1
1461	8.01.000039	Transportasi Pelaksanaan Tugas Panitibraka	Unit	kebutuhan fasilitas sarana transportasi dan biaya transport pelaksana tugas panitibraka	1
1462	8.01.000040	Kebijakan Teknis di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Penyediaan ruang diskusi dan dialog terkait penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	3
1463	8.01.000041	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Penyediaan forum dialog dan diskusi, serta seminasi terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	62
1464	8.01.000042	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Penyediaan forum diskusi dan dialog terkait Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	10
1465	8.01.000046	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepanitibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapanitibraka	Dokumen	Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepanitibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapanitibraka	2
1466	8.01.000047	Dokumen Pelaksanaan Tugas Panitibraka	Dokumen	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Tugas Panitibraka	1
1467	8.01.000050	Panitibraka	Orang	Program Panitibraka adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila	92
1468	8.01.000053	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Rincian Orang Pertahun (3 Tahun Terakhir) beserta usaha-usaha yang mengikuti (masyarakat umum, pelajar, umum dll) yang mengikuti seminasi dan lomba, terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 partai
1469	8.01.000059	Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (dalam 3 Tahun Terakhir)	1

1470	8.01.00006)	Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Diusulkan	Dokumen	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Diusulkan	1
1471	8.01.00006J	Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Diusulkan	Dokumen	Daftar Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Diusulkan	1
1472	8.01.00006H	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti dan melaksanakan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Tahun Sebelumnya)	10
1473	8.01.00006I	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	Dokumen Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Tahun Sebelumnya)	2
1474	8.01.000069	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1
1475	8.01.000070	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Tahun Sebelumnya)	1
1476	8.01.000072	Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Hibrka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Diusulkan	Dokumen	Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Hibrka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Diusulkan (Renja dan Laporan Kinerja Tahun Sebelumnya)	1
1477	8.01.000073	Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Hibrka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Diusulkan	Dokumen	Jumlah dan Daftar Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Hibrka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Diusulkan (tiga Tahun Sebelumnya)	3
1478	8.01.000075	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Hibrka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	daftar dan Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Koordinasi (Diklat, Sosialisasi, Pelatihan dll) di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Hibrka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4

1479	8.01.000088	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pankibraka	Kegiatan	Laporan Capaian Kinerja dan Kegiatan pelaksanaan Tugas pankibraka Tahun Sebelumnya	9
1480	8.01.000091	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	Daftar dan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi, Bimtek, Rakmas, dan/atau Pelatihan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	22 ormas dan LSM
1481	8.01.000094	Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Dokumen Laporan Hasil Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun tahun Sebelumnya	1
1482	8.01.000104	Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Laporan Pelaksanaan & Dokumen SK Anggota Forkopimda)	1

BUPATI PADANG LAWAS,

PUTRA MAHKOTA ALAM HASIBUAN